



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 492 -

BAB VI
PENAHAPAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA

Sejalan dengan visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur, maka pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara akan dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam jangka panjang. Tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara pada dokumen ini dimulai pada tahun 2022 dan tahap kelima berakhir pada tahun 2045. Pembangunan Ibu Kota Nusantara dibagi menjadi lima tahap pembangunan yang meliputi: (1) Tahap 1 (2022-2024), (2) Tahap 2 (2025-2029), (3) Tahap 3 (2030-2034), (4) Tahap 4 (2035-2039), dan (5) Tahap 5 (2040-2045).

Penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara disusun untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan proses komunikasi dan konsultasi publik; kesiapan lokasi; perencanaan tata ruang, kawasan dan lingkungan; penataan kelembagaan dan regulasi; perumusan insentif fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan; penyediaan infrastruktur perkantoran, perumahan, transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya; penyiapan dan pemindahan aparatur pemerintahan; pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah yang menjadi mitra Ibu Kota Nusantara; serta penyediaan sumber daya, pembiayaan dan investasi yang diperlukan. Penahapan pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara juga disusun agar persiapan dan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan dan terpadu.

Dalam upaya membangun Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua, pelaksanaan pembangunan pada Tahap 1–5 didasarkan atas perkiraan atau proyeksi penduduk yang akan menghuni serta kebutuhan lahan dan kawasan yang akan dikembangkan. Pembangunan infrastruktur harus dimulai setidaknya dua sampai tiga tahun sebelum pertama kali dihuni. Perpindahan penduduk dimulai dengan perpindahan sektor pertahanan dan keamanan yang didukung dengan pembangunan infrastruktur sementara pada tahun 2022 dalam rangka pengamanan proses konstruksi. Infrastruktur utama seperti perkantoran, perumahan, prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, dan transportasi massal Ibu Kota Nusantara akan melayani kawasan Ibu Kota Nusantara pada tahun 2024, dengan dimulainya perpindahan ASN, TNI, dan Polri.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 493 -

Penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara di setiap tahapan pembangunan dijabarkan melalui berbagai indikasi program yang dapat menjadi acuan dalam pembangunan. Penyusunan indikasi program mengacu pada KPI Ibu Kota Nusantara 2045 yang telah dijabarkan pada Bab 2 Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Mengingat bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan dalam seluruh tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat memberikan manfaat secara luas dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara, maka dapat diartikan bahwa indikasi program yang dijabarkan dalam Perincian Rencana Induk ini dapat mendukung lebih dari satu pencapaian KPI yang telah ditetapkan sebelumnya.

6.1 TAHAP 1 : PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2024

Tahap 1 pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun 2022-2024 merupakan tahap awal pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Pada tahap pertama tersebut, akan dimulai perpindahan ASN serta TNI dan Polri di wilayah Ibu Kota Nusantara. Pemindahan representasi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif serta ASN dan TNI/Polri akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pada Tahap 1 tersebut, perkantoran pemerintah dan perumahan ASN serta TNI dan Polri akan dibangun beserta seluruh sarana prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Fasilitas dan sarana prasarana akomodasi, makanan dan minuman juga disiapkan bagi pekerja konstruksi serta unsur pertahanan dan keamanan untuk pengamanan lokasi.

Pembangunan di Ibu Kota Nusantara pada Tahap 1 difokuskan pada KIPP dengan infrastruktur utama dan jalur transportasi yang masih dalam proses pembangunan serta ditargetkan dapat mulai dimanfaatkan pada tahun 2024 ketika ASN mulai berpindah ke Ibu Kota Nusantara. Selama Tahap 1, kebutuhan infrastruktur dan transportasi bersifat sementara dan menjadi bagian dari perencanaan manajemen konstruksi untuk kepentingan pembangunan kawasan.

Penduduk yang akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara pada Tahap 1 tahun 2024 mencakup ASN kementerian/lembaga, pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik, TNI, Polri, serta unsur pertahanan dan keamanan lainnya beserta anggota keluarganya, serta tenaga kerja di berbagai sektor layanan pendukung lainnya (misalnya konstruksi, akomodasi, makanan, minuman, dan retail). Diproyeksikan total populasi Ibu Kota Nusantara beserta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 494 -

penduduk eksisting pada tahun 2024 adalah sekitar 488.409 jiwa. Adapun rincian proyeksi jumlah populasi Ibu Kota Nusantara pada Tahap 1 dapat dilihat pada Tabel 6-1.

Tabel 6-1 Proyeksi Jumlah Populasi Ibu Kota Nusantara pada Tahap 1 (Tahun 2022-2024)

No	Populasi	2022	2023	2024
1.	Jumlah Tenaga Kerja	15.713	16.313	77.398
1.1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0	0	60.000
1.2	Kemhan/TNI, Polri, BIN, BSSN, dan Bakamla	0	0	
1.3	Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik	0	0	485
1.4	Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	0	0	0
1.5	Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	0	0	0
1.6	Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan Ibu Kota Nusantara	15.713	16.313	16.913
2.	Populasi Tanggungan/Dependen	16.354	16.979	257.675
2.1	Anggota Keluarga ASN	0	0	240.000
2.2	Anggota Keluarga Kemhan/TNI, Polri, BIN, BSSN, dan Bakamla	0	0	
2.3	Anggota Keluarga Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik	0	0	72
2.4	Mahasiswa	0	0	0
2.5	Keluarga Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	0	0	0
2.6	Keluarga Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	0	0	0
2.7	Keluarga Tenaga Kerja Konstruksi pada masa Pembangunan Ibu Kota Nusantara	16.354	16.979	17.603



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 495 -

No	Populasi	2022	2023	2024
3.	Jumlah Penduduk Eksisting yang berada dalam delineasi Ibu Kota Nusantara	150.612	151.968	153.336
	TOTAL POPULASI	182.679	185.260	488.409

Catatan :

- proyeksi angka ASN serta TNI/Polri yang dipindahkan merupakan perkiraan angka maksimal
- proyeksi tenaga kerja konstruksi merupakan angka sementara berdasarkan data historis di luar perhitungan investasi sektor konstruksi
- proyeksi Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik beserta keluarga baru mencakup data pegawai Bank Indonesia.

Pada Tahap 1, fokus pembangunan KIPP secara bertahap pada kawasan Sub WP 1A1, 1A2, dan dilanjutkan dengan Sub WP 1B dan sub WP 1C. Pembangunan KIKN dan KPIKN dimulai dengan pembangunan jalan penghubung KIPP ke pusat-pusat pelabuhan dan bandara penting pendukung konstruksi pembangunan. Kawasan yang akan dibangun adalah kawasan *mixed-use* yang meliputi (1) kawasan perkantoran pemerintahan pusat (eksekutif, legislatif, yudikatif) dengan penerapan konsep *smart government*; (2) kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri; serta (3) kawasan bisnis dan ekonomi pendukung pembangunan awal KIPP. Pengembangan zona *mixed-use* tersebut didukung dengan pembangunan ruang terbuka hijau, infrastruktur transportasi, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum dasar.

6.1.1 Persiapan

Penyiapan kelembagaan dan Otorita Ibu Kota Nusantara akan ditargetkan selesai pada tahun 2022. Pembangunan Ibu Kota Nusantara akan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Ibu Kota Nusantara.

Penyediaan tanah pada Tahap 1 hingga tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan RTR KSN Ibu Kota Nusantara dan RDTR Ibu Kota Nusantara. Pada Tahap 1, pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagian besar dilakukan pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan digunakan untuk pembangunan. Dalam jangka pendek, instansi yang melakukan pembangunan atau Otorita Ibu Kota Nusantara mengusulkan permohonan penggunaan kawasan hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan permohonan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 496 -

pelepasan kawasan hutan akan dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, di wilayah yang telah ada pemilikan dan penguasaan masyarakat, dilaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Instansi yang melakukan pembangunan atau Otorita Ibu Kota Nusantara bertindak sebagai instansi yang membutuhkan tanah, sehingga perlu menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan menganggarkan biaya pembebasan lahan.

Untuk mendukung persiapan pembangunan pada Tahap 1, akan dibangun jalur atau akses logistik pembangunan Ibu Kota Nusantara. Beberapa infrastruktur yang akan dibangun sebagai akses logistik meliputi pembangunan jalan dan pelabuhan di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara yang mendukung akses menuju KIPP. Selain itu, untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara pada Tahap 1, tenaga kerja konstruksi baik yang berasal dari luar wilayah Ibu Kota Nusantara maupun tenaga lokal akan didukung dengan penyediaan rumah tenaga kerja konstruksi di fokus kawasan pembangunan di KIPP.

Sosialisasi dan komunikasi secara lebih luas akan dilakukan ke berbagai pemangku kepentingan. Sosialisasi terkait dengan pemindahan ditujukan kepada ASN, TNI dan Polri serta lembaga negara lainnya yang akan dipindahkan pada Tahap 1. Sosialisasi terkait dengan rencana pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara juga dilakukan kepada masyarakat lokal dan calon penduduk pendatang, daerah sekitar Ibu Kota Nusantara, serta PNA dan OI. Sementara itu, untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara di berbagai bidang, maka sosialisasi terkait dengan potensi investasi juga ditujukan kepada investor potensial yang akan turut berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara.

6.1.2 Pembangunan

6.1.2.1 Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia

Pada Tahap 1, pembangunan sosial dan sumber daya manusia akan dilaksanakan pada beberapa hal, yaitu:

- a. Pelibatan tokoh dan masyarakat adat dan lokal dalam berbagai forum kolaborasi yang merepresentasikan kepentingan bersama serta mendorong peningkatan peran dalam berbagai aspek pembangunan, seperti dalam hal pengelolaan, konservasi dan restorasi hutan dan lahan, serta ketahanan pangan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 497 -

- b. Penyusunan konsep, rancangan serta pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti balai adat, pusat kebudayaan, aset yang bernilai sosial dan budaya, rumah ibadah serta sarana ruang terbuka yang didesain secara inklusif dan responsif gender serta sesuai dengan kondisi sosial masyarakat untuk mendorong integrasi masyarakat sekaligus tetap menjaga kearifan lokal.
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong penyediaan fasilitas pendidikan di seluruh tingkatan pendidikan serta penyediaan fasilitas kesehatan secara merata di seluruh wilayah Ibu Kota Nusantara, termasuk dimulainya pembangunan Rumah Sakit Berstandar Internasional.
- d. Pengembangan kapasitas masyarakat lokal, penciptaan peluang ekonomi bagi kelompok rentan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas lembaga pendidikan yang ada untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil, serta penyerapan tenaga dengan keahlian sesuai minat investor di klaster-klaster ekonomi.

Adapun arahan pemanfaatan ruang untuk aspek sosial yang mendukung dapat dilihat pada Tabel 6-2 di bawah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 498 -

Tabel 6-2 Penahapan Arahana Pemanfaatan Ruang Aspek Sosial dan Sumber Daya Manusia di Tahap 1 Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
1	>75% dari 256.142 hektare area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)	Konservasi dan Restorasi hutan dan lahan	Pelibatan tokoh dan masyarakat dalam pengelolaan hutan/wanatani berkelanjutan	Identifikasi kondisi sosial budaya, termasuk penguasaan lahan oleh masyarakat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Studi hasil identifikasi kondisi sosial budaya dan penggunaan lahan	APBN	setiap tahun
				Pelibatan masyarakat pada upaya pelindungan, rehabilitasi, dan pengelolaan hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Terlaksananya program konservasi dan restorasi hutan dan lahan yang diikuti oleh masyarakat lokal	APBN	setiap tahun
2	100% integrasi seluruh penduduk	Ruang Publik, Fasilitas Nasional, dan Integrasi Sosial	Aset bernilai sosial dan budaya penting	Identifikasi dan registrasi aset Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan melibatkan lembaga pemerintah yang	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Teridentifikasinya aset Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	APBN	2023



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 499 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				bertanggung jawab atas urusan kebudayaan, serta perguruan tinggi				
				Melakukan perancangan dan pembangunan fasilitas sosial dan budaya skala nasional yang mendukung persatuan bangsa				Setiap tahun
3	100% warga dapat menjangkau layanan sosial/masyarakat	Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Aset bernilai sosial dan budaya penting	Melakukan perancangan dan pembangunan fasilitas sosial dan budaya di berbagai skala pelayanan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen desain atau pembangunan fasilitas keagamaan, fasilitas sosial, komersial, serta sarana ruang terbuka di berbagai skala pelayanan	APBN/ KPBUI IKN/ Swasta Murni	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 500 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	at dalam waktu 10 menit		Fasilitas Kesehatan	Penyediaan Posyandu	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia Minimal 1 per skala layanan wilayah setara RW	APBN/APBD	2023 dan 2024
				Penyediaan Puskesmas	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 puskesmas per skala pelayanan setara kecamatan dan dapat bertambah dengan memperhatikan tingkat kepadatan penduduk	APBN/APBD	2023 dan 2024
				Penyediaan Rumah Sakit Berstandar Internasional	KIPP	Tersedia minimal 1 RS Berstandar Internasional	APBN/ KPBU IKN	2023 dan 2024
				Penyediaan Rumah Sakit	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 RS	APBN/APBD/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2023 dan 2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 501 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Penyediaan Laboratorium Kesehatan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 Laboratorium terstandar minimal tingkat keamanan hayati (<i>Bio Safety Level/BSL</i>) 3 dan dapat ditingkatkan sampai dengan minimal BSL 4	APBN/ KPBU IKN	2023 dan 2024
				Peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ada	APBN/APBD/ KPBU IKN/ Swasta murni	2023 dan 2024
			Fasilitas Pendidikan	Pembangunan unit sekolah baru tingkat TK/RA/BA/PAUD	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 TK/RA/BA/PAUD di setiap wilayah setingkat desa/kelurahan atau tersedia minimal 1 TK/RA/BA/PAUD untuk 270 anak usia 3-6 tahun	APBN/ Swasta Murni	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 502 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Pembangunan unit sekolah baru tingkat SD/MI/SDLB/ Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SD/MI/SDLB/ Sederajat untuk 672 anak usia 7-12 tahun	APBN/ Swasta Murni	2024
				Pembangunan unit sekolah baru tingkat SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat untuk 1.056 anak usia 13-15 tahun	APBN/ Swasta Murni	2024
				Pembangunan unit sekolah baru tingkat SMA/SMK/MA/ SMLB/ Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SMA/SMK/MA/ SMLB/ Sederajat untuk 1.296 anak usia 16-18 tahun	APBN/ Swasta Murni	2024
				Pengembangan sarana dan prasarana perguruan tinggi negeri eksisting	Wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra	Minimal PTN eksisting dapat mendukung kebutuhan Prodi yang diperlukan untuk kebutuhan klaster industri	APBN	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 503 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
					Ibu Kota Nusantara			
				Pembangunan unit Tempat Penitipan Anak/ <i>Day Care</i>	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 TPA/DC di setiap wilayah setingkat desa/ kelurahan atau tersedia minimal 1 TPA/DC untuk 270 anak usia 0 - 12 tahun (sama dengan TK/RA/BA/PAUD)	APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2024
4	100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang	Ruang Publik	Balai adat/Pusat kebudayaan	Survei komprehensif di wilayah Ibu Kota Nusantara untuk mengkonfirmasi lokasi yang sesuai untuk Balai/Rumah Adat/Pusat Kebudayaan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen hasil kajian/survey komprehensif lokasi balai adat	APBN	2023



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 504 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	responsif gender dan inklusif			Mengembangkan kemitraan potensial dalam pengembangan dan pengoperasian balai adat, bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan kebudayaan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Kesepakatan kemitraan dengan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan kebudayaan	APBN	2023
				Pelibatan pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal, termasuk perempuan dan anak dalam forum kolaborasi yang merepresentasikan kepentingan bersama	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Forum kolaborasi dengan pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal, termasuk perempuan dan anak di Wilayah Ibu Kota Nusantara	APBN	2023



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 505 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Menyiapkan konsep balai adat/Pusat Kebudayaan yang tepat guna secara kolaboratif	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Konsep balai adat/pusat kebudayaan	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2023
5	10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	Kohesi dan Inklusi Sosial	Ruang publik yang aksesibel dan penuh interaksi	Pembuatan konsep desain ruang publik yang aksesibel dan mendukung terjadinya interaksi sosial di masyarakat	KIKN	Dokumen konsep desain aspek sosial yang mendukung terjadinya interaksi sosial di masyarakat	APBN	2024
6	>10% dari lahan 256.142 hektare tersedia untuk kebutuhan produksi pangan	Ketahanan Pangan	Pelibatan masyarakat perkotaan dalam aspek ketahanan pangan	Sosialisasi dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas bagi masyarakat dalam kegiatan pertanian perkotaan (<i>urban farming</i>)	KIKN	Modul sosialisasi dan pelatihan <i>urban farming</i> bagi masyarakat di kawasan perkotaan	APBN	2023



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 506 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam aspek ketahanan pangan	Sosialisasi dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas bagi masyarakat dalam kegiatan pertanian berkelanjutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Modul sosialisasi dan pelatihan bagi desa dan/atau masyarakat yang hidup dalam kawasan hutan dan/atau kawasan hijau	APBN	2023
7	60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	Ekonomi Sirkular	Pengelolaan sumber daya secara cermat untuk mendorong penurunan produksi limbah dan pemulihan nilai	Pengenalan ekonomi sirkular bagi masyarakat	KIKN	Modul sosialisasi ekonomi sirkular bagi masyarakat di KIKN	APBN/ Swasta murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2024
8	Permukiman yang ada dan terencana di kawasan	Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman	Studi kelayakan sosial terkait pengembangan dan peningkatan infrastruktur	KIKN	Dokumen studi kelayakan sosial pembangunan infrastruktur pada area permukiman KIKN	APBN/ KPBU IKN/ Swasta murni	2023



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 507 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	256.142 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045			Pembuatan konsep desain <i>smart villages/communities</i>	KIKN	Dokumen desain <i>smart villages/communities</i>	APBN/KPBU IKN/Swasta murni	2023
9	0% kemiskinan pada populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2035	Pengentasan kemiskinan	Pemberdayaan Masyarakat	Pendataan 100 persen penduduk yang telah diperingkat menurut kesejahteraan di deliniasi wilayah Ibu Kota Nusantara	Wilayah Ibu Kota Nusantara	1. Dokumen pendataan dan modul program sosial bagi masyarakat lokal dan pendatang 2. Basis data Registrasi Sosial Ekonomi mencakup seluruh penduduk Ibu Kota Nusantara	APBN	2023



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 508 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan.	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen studi program pemberdayaan yang dapat diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi lokal	APBN	2023
			Rujukan dan Layanan Sosial	Penguatan kapasitas Pemda, Desa, Kelurahan, dan Masyarakat untuk mengelola dan memberikan rujukan terhadap masalah dan layanan sosial yang dihadapi/diperlukan penduduk rentan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Uji coba Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMD/K) yang terintegrasi dengan Puskesmas.	APBN	Setiap tahun
10	Rasio Gini regional terendah	Pengurangan ketimpangan	Pengembangan kapasitas masyarakat lokal	Pelatihan vokasi berbasis kompetensi untuk bekerja dan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Pelatihan vokasi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan klaster ekonomi	APBN/Swasta murni/ Pembiayaan	2023



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 509 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	di Indonesia pada 2045			berwirausaha bagi masyarakat wilayah Ibu Kota Nusantara		di BLK dan lembaga pelatihan lainnya yang ditunjuk bagi masyarakat wilayah Ibu Kota Nusantara	Kreatif (<i>creative financing</i>)	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 510 -

6.1.2.2 Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan

Pada tahun 2022, telah dimulai proses pelibatan, negosiasi, dan pembebasan lahan bersama berbagai pemangku kepentingan yang akan dilakukan secara berkesinambungan hingga tahun 2024 dan seterusnya. Kegiatan pembangunan infrastruktur secara umum terpusat pada konsolidasi lahan, penyediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi, air baku, air minum, air limbah, persampahan, drainase perkotaan dan pengendalian banjir.

Pada akhir Tahap 1, infrastruktur kawasan yang direncanakan telah beroperasi meliputi:

- a. Pembangunan sebagian jalan tol akses Ibu Kota Nusantara, jalan akses menuju KIPP, dan sebagian jalan dalam KIPP;
- b. Penyediaan layanan dan fasilitas angkutan umum berbasis bus di KIPP;
- c. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda di KIPP;
- d. Pembangunan utilitas terintegrasi, seperti:
 1. Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dimulai dari sumber air baku (Intake Sungai Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoi) serta unit produksi, transmisi, dan distribusi air minum untuk WP-1;
 2. Pembangunan fasilitas pengelolaan persampahan, Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), pengelolaan limbah B3, limbah B3 medis, serta di sebagian KIPP Tahap 1 (WP-1);
 3. Sistem drainase makro utama perkotaan, kolam retensi dan embung serta infrastruktur pengendali banjir dan sedimen;
 4. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan gas: pembangunan pembangkit, jaringan interkoneksi, dan sistem penyaluran tenaga listrik cadangan dan penyimpanan energi, serta jaringan gas kota;
 5. Pembangunan infrastruktur TIK: jaringan utama telekomunikasi dan BTS.
- e. Sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan dan kebugaran, perdagangan, dan akomodasi, makanan dan minuman untuk mendukung perkantoran dan perumahan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 511 -

- f. Penyediaan perumahan sesuai dengan jumlah kebutuhan rumah tangga, yang terdiri dari:
1. rumah pekerja konstruksi;
 2. rumah negara/rumah dinas ASN, TNI, dan Polri;
 3. revitalisasi perumahan dan permukiman masyarakat sekitar Ibu Kota Nusantara.

Sementara itu, di akhir Tahap 1, pembangunan lingkungan meliputi:

- a. Pembangunan sistem pintar pemantauan kualitas lingkungan hidup (6 matra PPLH);
- b. Pembangunan sistem pintar peringatan dini multi ancaman bencana (Gempa, Tsunami, Cuaca Ekstrem, dan Kebakaran Lahan dan Hutan);
- c. Program konservasi dan restorasi hutan:
 1. Rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;
 2. Pembangunan sarana dan prasarana pengamanan hutan;
 3. Pembangunan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan;
 4. Pembangunan koridor satwa (jembatan dan terowongan satwa serta infrastruktur koridor lainnya);
 5. Penciptaan ruang terbuka hijau di area KIPP dan KIKN (hutan kota, taman kota, jalur hijau, dan ruang hijau lainnya);
 6. Pembangunan persemaian skala besar untuk penyediaan bibit dan sistem penyediaan airnya;
 7. Pelibatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan lokal, termasuk perempuan dan anak dalam pengelolaan hutan/wanatani;
 8. Pembangunan Pusat Konservasi Satwa.

Untuk mencapai target KPI yang telah ditentukan, rincian penahapan untuk aspek infrastruktur dan lingkungan di Tahap 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 512 -

Tabel 6-3 Penahapan Arahana Pemanfaatan Ruang Aspek Infrastruktur dan Lingkungan di Tahap 1 Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
1.	Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara	Infrastruktur Ketenagalistrikan	Gardu Distribusi, Gardu Induk Mobile, dan Infrastruktur Kelistrikan Pendukung	Pemanfaatan gardu distribusi eksisting terdekat dan gardu induk mobile beserta infrastruktur kelistrikan pendukung untuk menyediakan pasokan dan meningkatkan kehandalan listrik pada masa konstruksi	Sekitar Wilayah Ibu Kota Nusantara	2 Unit	BUMN/ Badan Usaha Otorita	2023



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 513 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Panel surya atap	Jaringan cerdas untuk memungkinkan energi matahari dari panel surya atap dialirkan ke jaringan kota	KIPP	Menyesuaikan dengan potensi atap gedung untuk dibangun panel surya atap	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2024
			<i>Solar Farm</i>	Pembangunan PLTS Tahap 1	KIKN	3.632,7 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2024
			Cadangan dan Penyimpanan Energi	Pembangkit listrik cadangan dan baterai sebagai penyimpanan untuk menjaga stabilitas jaringan	KIKN (tergabung di wilayah <i>solar farm</i>)	15% – 20% dari total kapasitas pasokan listrik	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 514 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				dan meningkatkan keandalan				
			Gardu induk terisolasi gas (<i>Gas Insulated Substation/GIS</i>) 150kV	Pembangunan Gardu Induk	KIPP	1 Unit	BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBUI IKN	2024
			Gardu Induk 150kV	Pembangunan Gardu Induk untuk interkoneksi Sistem Ketenagalistrikan Kalimantan	KPIKN	2 Unit	BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBUI IKN	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 515 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Gardu Distribusi 20kV	Pembangunan Gardu Distribusi	KIPP dan Wilayah Ibu Kota Nusantara	360 Unit	BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2024
			Jaringan Transmisi dan Distribusi Bawah Tanah (<i>Underground Cable/UGC</i>)	Pemasangan jaringan transmisi dan distribusi di dalam jaringan utilitas terpadu	KIPP	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2024
			Jaringan Transmisi dan Distribusi	Pemasangan jaringan transmisi dan distribusi di atas tanah dari Sistem Ketenagalistrikan Kalimantan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	BUMN/Badan Usaha Otorita/Swasta Murni/KPBU IKN	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 516 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			<i>Smart metering</i>	Pemasangan <i>smart metering</i> yang dapat berkomunikasi dua arah dengan <i>database</i> penyedia listrik	KIPP dan Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	APBN/ Masyarakat Pelanggan	2024
		Infrastruktur Gas	Jaringan Gas Kota	Pemasangan jaringan gas kota	KIPP	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman yang dibangun	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2024
2.	60% daur ulang semua timbunan limbah padat di tahun 2045	Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan - Daur Ulang	Fasilitas Pengomposan	Pengolahan sampah organik	TPST untuk wilayah layanan KIPP (<i>Wastehub-neksus</i>)	Minimal 1,5 hektare atau menyesuaikan kebutuhan hasil perencanaan.	APBN/ KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 517 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
		Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Fasilitas daur ulang	Terdiri dari berbagai fasilitas untuk mendaur ulang berbagai macam material sampah	TPST untuk wilayah layanan KIPP (<i>Wastehub- neksus</i>)	Minimal 1,5 hektare atau menyesuaikan kebutuhan hasil perencanaan.	APBN/ KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2024
		Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan - Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Fasilitas pengolahan sampah melalui proses termal (<i>Waste to Energy</i>) dan/atau pengolahan sampah menjadi barang (<i>Waste to Product</i>)	Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang tidak bisa didaur ulang	TPST untuk wilayah layanan KIPP (<i>Wastehub- neksus</i>)	Minimal 1,5 hektare atau menyesuaikan kebutuhan hasil perencanaan.	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 518 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Lahan Urug Saniter (<i>Sanitary Landfill</i>)	Tempat pemrosesan akhir untuk residu pengolahan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang tidak dapat didaur ulang	Di luar KIPP	±10 hektare atau menyesuaikan hasil perencanaan	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2024
		Infrastruktur sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	Fasilitas Pengolahan Limbah Berbahaya (B3)	Pengolahan limbah berbahaya untuk meminimalkan pencemaran lingkungan atau kerusakan saat dibuang dan diolah bersama dalam fasilitas	Infrastruktur Pusat (pusat pengelolaan limbah)	Tergantung dari tipe limbah berbahaya dan perawatannya	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 519 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				pengolahan dari industri.				
			Lahan Urug B3 (<i>Secure Landfill</i>)	Tempat pembuangan akhir untuk limbah berbahaya untuk mencegah pencemaran lingkungan	Infrastruktur Pusat (pusat pengelolaan limbah)	Dengan asumsi kedalaman 10 m, membutuhkan luasan 1,25 hektare	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2024
			Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis	Tempat pengolahan (pembakaran) limbah B3 medis	Infrastruktur Pusat (pusat pengelolaan limbah)	Sekitar 0,3 hektare	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 520 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
		Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan	Jaringan pengangkutan sampah melalui <i>pneumatic</i> (<i>Pneumatic Waste Collection System</i> atau PWCS)	Jaringan pengumpul sampah dari bangunan vertikal ke stasiun pengumpulan PWCS	Klaster bangunan vertikal	Menyesuaikan dari besaran wilayah pelayanan PWCS	APBN/ KPBUIKN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2024
			Stasiun Pengumpulan PWCS	Tempat pengumpulan sampah dari jaringan PWCS	Klaster bangunan vertikal	Menyesuaikan dari besaran wilayah pelayanan PWCS	APBN/ KPBUIKN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 521 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	Sarana pengumpulan sampah dari sumber dan pengangkutan sampah ke TPST	Wilayah area pelayanan		APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2024
3.	100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035	Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	Pembangunan SPALD-T skala kawasan tertentu untuk melayani area kawasan prioritas	Pengelolaan Air Limbah dengan Sistem Terpusat (<i>off-site</i>) yang berada di area kawasan prioritas.	Di dalam KIPP	Sesuai dengan kebutuhan kawasan	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2024
			Pembangunan SPALD-T (IPALD & Jaringan perpipaan skala perkotaan	Pengelolaan Air Limbah dengan Sistem Terpusat (<i>off-site</i>) skala kota dilengkapi dengan fasilitas	Di wilayah layanan IPAL KIPP	Menyesuaikan kebutuhan lahan dari hasil perencanaan	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 522 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				pengolahan lumpur				
			Jaringan perpipaan air limbah domestik	Sarana pengumpulan air limbah domestik ke instalasi pengolahan air limbah domestik	Sepanjang area pelayanan dan mengikuti riparian sungai	Menyesuaikan hasil perencanaan dan kajian lebih lanjut	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2024
4.	Permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045	Infrastruktur sumber daya air -sumber air	Intake Sungai Sepaku	Kapasitas total terpasang 3,0 m ³ /detik	KIKN	Pengambilan bebas. Tidak terdapat genangan	APBN	2024
			Bendungan Sepaku Semoi - Sistem Pompa	Kapasitas total terpasang 2 m ³ /detik	Wilayah Ibu Kota Nusantara	volume tampungan 38 juta m ³	APBN	2024
			Optimalisasi pengelolaan Bendungan Samboja	Optimalisasi pengelolaan Bendungan Samboja untuk	KPIKN	Peningkatan pengelolaan Bendungan Samboja	APBN	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 523 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				penyediaan air baku, irigasi, dan pemasangan <i>solar PV</i>				
		Infrastruktur Air Minum untuk KIPP	IPA (Instalasi Pengolahan Air Minum) 2x300 lpd	Fasilitas pengolahan untuk peningkatan target kualitas air minum	Di luar KIPP (Dekat dengan <i>Intake</i> Sungai Sepaku)	±9 hektare atau disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBUI KN	2024
			Jaringan perpipaan transmisi air minum	Jaringan transmisi air minum dari IPA menuju reservoir	Di luar dan di dalam KIPP	±12,5 km di luar KIPP dan ±3,5 km di dalam KIPP atau disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN	2024
			Reservoir induk	Penyimpanan air yang akan melayani setiap daerah pengembangan	Di dalam KIPP	Total 2 unit, ±2,5 hektare atau disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 524 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Jaringan distribusi	Pengaliran air minum yang memenuhi air minum aman dan 3K (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas)	Di dalam KIPP	± 4.000 meter di luar MUT dan ± 50.170 meter di dalam MUT	APBN/ KPBU IKN	2024
		Infrastruktur sumber daya air - Banjir dan Drainase Perkotaan	Pembangunan infrastruktur drainase, pengendali banjir dan pengendali sedimen	1. <i>Check</i> dam, pengendali dasar sungai 2. Sistem peringatan dini banjir	KIPP (SubDAS Sanggai)	29 <i>check</i> dam dan 14 pengendali dasar sungai	APBN	2024
5.	Pemukiman layak, aman, dan terjangkau yang memenuhi rasio	Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Peremajaan perumahan dan permukiman	Peningkatan kualitas perumahan; penyediaan infrastruktur dasar	KIPP	Perumahan dan permukiman layak untuk masyarakat lokal	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 525 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	hunian berimbang			permukiman; konsolidasi lahan				
			Penyediaan perumahan baru untuk masyarakat umum	Pengalokasian ruang dan lahan; Penyediaan peraturan spasial; Perencanaan Kawasan; Konstruksi Percontohan; Fasilitas pembiayaan	KIPP	Kawasan percontohan perumahan masyarakat umum yang terintegrasi dengan layanan infrastruktur dasar	Swasta Murni	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 526 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
6.	100% konektivitas digital dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk semua penduduk dan bisnis	<i>Fixed Broadband</i>	Serat Optik	Penghubung jaringan telekomunikasi	KIPP	2-4 Ring (100, 400 GbE)	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2024
		Infrastruktur Telekomunikasi - <i>Mobile Broadband</i>	BTS	Penghubung jaringan telekomunikasi	Jaringan bergerak seluler (Jarbersel) KIPP	30-100 unit	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2024
7.	80% perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif	Transportasi umum	Bus	Penyediaan layanan angkutan umum bus dan fasilitas pendukung (halte/ <i>shelter</i>)	KIPP	Operasional angkutan umum bus dan fasilitas pendukung	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2024
		Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda	Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda	Pembangunan sebagian fasilitas	KIPP	Operasional sebagian fasilitas pejalan kaki dan pesepeda	APBN/ Swasta Murni/	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 527 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				pejalan kaki pesepeda			BUMN/Badan Usaha Otorita	
8.	10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	Infrastruktur Jalan	Sebagian Jalan di KIPP	Pembangunan jalan kolektor sekunder secara bertahap	KIPP	Operasional sebagian jalan akses utama (sumbu kebangsaan sisi barat)	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2024
			Sebagian jalan lokal sekunder di KIPP	Pembangunan jalan lokal sekunder secara bertahap	KIPP	Operasional sebagian jalan lokal sekunder	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2024
9.	<50 menit koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara	Transportasi umum	Bus	Penyediaan layanan angkutan umum bus koridor Bandara Balikpapan – KIPP	Balikpapan, KIPP	Operasional angkutan umum bus koridor Bandara Balikpapan - KIPP	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 528 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	strategis pada tahun 2030	Infrastruktur Jalan	Jalan Bebas Hambatan	Pembangunan sebagian jalan bebas hambatan koridor Balikpapan – KIPP	Balikpapan, KIPP	Sebagian jalan bebas hambatan koridor Balikpapan - KIPP	APBN/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2024
			Sebagian Jalan Akses menuju KIPP	Peningkatan jalan eksisting akses menuju KIPP secara bertahap	KIPP, KIKN, KPIKN dan di luar KPIKN	Operasional sebagian jalan akses menuju KIPP	APBN/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2024
10	>75% dari 256.142 hektare area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)	Konservasi dan Restorasi Hutan	Pengurangan deforestasi	Moratorium dan/atau pencabutan izin tambang dan sawit dalam kawasan hutan dan lindung	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Seluruh izin tambang batubara dan kebun sawit dalam kawasan hutan	APBN/BUMN/ Badan Usaha Otorita/Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 529 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Penyelesaian penguasaan dan/atau tenurial kawasan hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	30.000 hektare	APBN/BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
			Perlindungan hutan	Pemenuhan sarana dan prasarana pengamanan hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	7 paket unit pengamanan hutan	APBN/BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
				Pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	7 paket unit pengendalian kebakaran hutan	APBN/BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 530 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
							Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
				Patroli dan penegakan hukum pidana kehutanan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tergantung ancaman dan kejadian	APBN/BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
				Patroli dan pemadaman kebakaran hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tergantung kerawanan kebakaran	APBN/BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 531 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Konservasi keanekaragaman hayati	Perlindungan koridor satwa alami	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Koridor Samboja Koridor KIKN	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
				Perlindungan koridor satwa buatan (jembatan atau terowongan)	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Di lokasi pembangunan infrastruktur	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2024
				Konservasi eksitu keanekaragaman hayati	Wilayah Ibu Kota Nusantara	BOSF Samboja, Yayasan Jejak Pulang, PSO Arsari	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 532 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
							Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
				Pembangunan Pusat Penyelamatan Satwa terpadu	Wilayah Ibu Kota Nusantara	1 unit Pusat Penyelamatan Satwa Terpadu	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2024
				Inventarisasi dan monitoring tanaman dan satwa liar	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 533 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Pembangunan taman tematik (kebun raya, rimba kota, <i>mangrove</i> <i>eco-park</i> , dan arboretum)	Wilayah Ibu Kota Nusantara	3 unit satuan luas	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2024
				Konservasi spesies perairan, padang lamun, dan terumbu karang	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
			Pengelolaan hutan/wanatani berkelanjutan	Pembangunan Pusat Kendali Pengelolaan Kota Hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	1 kompleks bangunan dan perangkat teknologi	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 534 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
							Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
			Restorasi hutan	Pembangunan persemaian skala besar	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Satu persemaian di Mentawir	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita /Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2024
				Penyediaan air baku untuk persemaian	Satu embung di persemaian Mentawir	160.000 m3 untuk menyediakan 40 L/detik	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 535 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Rehabilitasi dan/atau penanaman pohon	Wilayah Ibu Kota Nusantara	15.000 hektare	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
				Reklamasi dan/atau pemanfaatan lahan bekas tambang dan kebun sawit	Wilayah Ibu Kota Nusantara	1.000 hektare/tahun	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
			Integrasi konservasi hutan dalam tata ruang	Penetapan kawasan dilindungi berdasarkan nilai keanekaragaman	Wilayah Ibu Kota Nusantara	159.180 hektare	APBN	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 536 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				hayati dan karbon stok				
		Infrastruktur sumber daya air - Konservasi air penerapan prinsip kota spons	Pembangunan kolam retensi dan embung multiguna	Kolam-kolam tampungan air yang memiliki multifungsi untuk penyediaan air, pengendalian banjir, konservasi air, vista kota, serta mengurangi <i>urban heat</i>	KIPP	19 embung dan 5 kolam retensi	APBN	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 537 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
		Produksi makanan sehat dan organik	Area pertanian regeneratif pangan	1. Intensifikasi pertanian sirkular 2. Peningkatan kapasitas bagi petani lokal	Wilayah Ibu Kota Nusantara	± 35.000 hektare (memenuhi >10% lahan untuk pemenuhan pangan sebesar ± 25.000 hektare)	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	Setiap tahun
11	100 % penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian	Konservasi air penerapan prinsip kota spons	Penerapan <i>Zero Delta Q</i> (fasilitas pemanenan maupun peresapan air hujan)	Dipasang terutama di bangunan-bangunan institusional pemerintahan termasuk rumah negara untuk ASN dan TNI Polri dalam konteks bangunan hijau	KIPP	Peraturan <i>Zero Delta Q</i> untuk gedung dan bangunan sudah ditetapkan dan mulai ditegakkan	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 538 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
12	Net zero emission untuk Ibu Kota Nusantara di 2045 di kawasan 256.142 hektare	Penggunaan Lahan Pertanian dengan teknologi pertanian konservasi, rendah karbon, dan permakultur	Perkebunan kelapa sawit dengan lanskap agroforestri	Rehabilitasi perkebunan kelapa sawit dengan lanskap agroforestri	Wilayah Ibu Kota Nusantara	± 2.412 hektare (berdasarkan KLHS IKN, 2020)	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	Setiap tahun
		Umum	Penataan Ruang dan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penetapan Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	256.142 hektare	APBN	2023
		Transportasi umum	Bus	Penerapan moda transportasi umum berbasis listrik (ET) serta fasilitas	KIPP	60% Bus berbasis listrik (ET)	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 539 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				pendukung (<i>charging facility</i>)				
13	100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif	KIKN	Penataan Ruang KIKN	1. Penetapan Rencana Tata Ruang 2. Penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Penataan Ruang - Wilayah Ibu Kota Nusantara Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan - KIPP	56.920 hektare	APBN	Setiap tahun
14	Ranking 10 besar kota paling layak huni di dunia pada tahun 2045	Lingkungan Hidup	Pembangunan sistem pintar pemantauan kualitas lingkungan hidup	Pembangunan awal sistem, pusat kendali, dan infrastruktur, serta pemasangan peralatan pendukung untuk	KIKN dan KPIKN	Pusat kendali, sistem terpadu, jaringan telekomunikasi/internet, alat pemantauan, fasilitas pendukung lainnya	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 540 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				pemantauan kualitas lingkungan hidup				
		Penanganan Bencana	Pembangunan sistem pintar peringatan dini multi ancaman bencana	Pembangunan awal pusat kendali, sistem dan infrastruktur, serta pemasangan peralatan pendukung untuk sistem peringatan dini multi ancaman bencana	KIKN dan KPIKN	Pusat kendali, sistem terpadu, jaringan telekomunikasi/internet, alat pemantauan, fasilitas pendukung lainnya	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2024



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 541 -

6.1.2.3 Pembangunan Industri dan Pusat Ekonomi

Kegiatan pembangunan ekonomi berpusat pada upaya untuk menarik minat pelaku industri pelopor (*anchor tenant*) serta sumber daya manusia/talenta yang berkualitas agar bersedia tinggal, hidup dan bekerja di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra. Pada tahun 2022-2023 akan dilakukan sosialisasi kepada pelaku industri pelopor yang potensial dan pengembangan hubungan kemitraan di setiap sektor target dan pengembangan penunjang administratif untuk menarik minat investor misalnya dalam bentuk layanan satu pintu, rancangan kebijakan, kerangka insentif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan, dan lain sebagainya. Pada tahun 2023 dan 2024, para pelaku industri mulai menyiapkan perancangan kawasan dan fasilitas, serta mengoperasikan bisnisnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 542 -

Tabel 6-4 Penahapan Arahkan Pemanfaatan Ruang Aspek Industri dan Pusat Ekonomi di Tahap 1 Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
1.	Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita negara (setara ekonomi) berpendapatan tinggi	Kawasan Industri dan pusat ekonomi	Perencanaan	1. Penyusunan <i>grand design</i> Kawasan dan Ekosistem Ekonomi Superhub Ibu Kota Nusantara 2. Penyusunan Masterplan Kawasan dan/atau <i>site plan</i> Penyusunan <i>Feasibility Study</i>	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di wilayah	Paket dokumen per indikasi program per lokasi	APBN/APBD/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2023



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 543 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Perizinan	1. Penyusunan Dokumen Izin Lingkungan 2. Proses pengajuan perizinan lahan 3. Proses pengajuan Izin Usaha	Kalimantan Timur lainnya	Paket dokumen per indikasi program per lokasi	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2024
			Tata Ruang dan Wilayah	1. Revisi RTRW 2. Penetapan dan/atau revisi RDTR		Paket dokumen per indikasi program per lokasi	APBN/ APBD	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 544 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Infrastruktur Dalam Kawasan	1. Pengadaan Lahan Kawasan Industri dan Penetapan Lokasi 2. Pematangan Lahan Kawasan 3. Penyiapan infrastruktur dasar dalam kawasan (air baku, jalan, sistem drainase dan air limbah, energi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan lainnya)	KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), dan Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur)	1. Paket kegiatan per lokasi 2. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	Swasta Murni/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ APBD/APBN	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 545 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Konektivitas Luar Kawasan	Pembangunan dan/ atau peningkatan jalan mendukung akses menuju kawasan industri	KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai	Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/ APBD/ KPBK IKN/ BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 546 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Infrastruktur Penunjang Luar Kawasan	1. Pengadaan Lahan untuk pengembangan infrastruktur penunjang luar kawasan 2. Penyiapan pembangunan infrastruktur penunjang lainnya (termasuk pengembangan Bandara APT Pranoto)	Timur), serta di wilayah Kalimantan Timur lainnya	1. Paket kegiatan per lokasi 2. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/ APBD/ KPBK IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 547 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Peningkatan Investasi	1. Fasilitasi Investasi 2. Pameran/ <i>Roadshow</i> Investasi 3. Penyusunan Profil Investasi 4. Pendampingan Investasi 5. Investasi Pembangunan Fasilitas Produksi	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di wilayah	Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/ APBD/ KPBK IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 548 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Promosi Ekspor	1. Penyelesaian Hambatan Perdagangan dengan Negara Mitra 2. Simplifikasi Regulasi Ekspor 3. Perumusan Insentif Fiskal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan	Kalimantan Timur lainnya	Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 549 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Kemitraan Usaha	1. Pengembangan Rantai Pasok UMKM 2. Fasilitasi Produksi UMKM 3. Logistik UMKM 4. Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Mikro dan Besar		Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/ APBD/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 550 -

			Penyediaan SDM	<ol style="list-style-type: none">1. Pelatihan SDM2. Riset permintaan pasar (<i>market demand analysis</i>) dan analisis kebutuhan pelatihan (<i>training needs analysis</i>)3. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja (<i>manpower planning</i>)4. Pembangunan layanan informasi pasar kerja5. Pengembangan konsep afirmasi pelibatan tenaga kerja lokal6. Pembangunan konsep afirmasi		Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/ APBD/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2024
--	--	--	----------------	--	--	---	---	------



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 551 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				pelibatan tenaga kerja pasangan ASN yang non-ASN				
			Harmonisasi Regulasi	1. Kebijakan Rantai Pasok Hulu Hilir 2. Penyusunan Insentif Fiskal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan dan Non Fiskal		Paket kebijakan per indikasi program per klaster ekonomi sesuai kebutuhan	APBN/ APBD	2024

Catatan: Paket kegiatan pembangunan infrastruktur dan penyiapan SDM terbuka untuk dilaksanakan melalui investasi swasta/BUMN/Badan Usaha Otorita atau dukungan pemerintah, atau kerja sama antara swasta, BUMN/Badan Usaha Otorita dan pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 552 -

6.1.2.4 Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Pada Tahap 1, pembangunan dimulai dengan pemenuhan 15 persen hingga 20 persen pembangunan simbol dan pembangunan sistem di KIPP dan sebagian KIKN atau wilayah Ibu Kota Nusantara secara keseluruhan sesuai yang tercantum di dalam Tabel 6-5.

Tabel 6-5 Penahapan Pembangunan Simbol dan Sistem Pertahanan dan Keamanan di Tahap 1 Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024

	Sistem dan Strategi Pertahanan	Sistem dan Strategi Keamanan Cerdas	Dukungan Intelijen Negara
Simbol	a) Gedung Kementerian Pertahanan; b) Subden Panglima TNI; c) Subden Kepala Staf TNI AD; d) Subden Kepala Staf TNI AL; e) Subden Kepala Staf TNI AU.	Kantor Pusat Polri	Kantor Satelit BIN
Sistem	a) Paspampres; b) Kodim IKN; c) Koramil IKN; d) Mabes TNI; e) Skadud 17, 45 dan Kompi Paskhas, Wing, Paskhas, di Sepinggan (Sementara)	a) Polrestabes KIPP; b) Polsek KIPP; c) <i>Command Center</i> ; d) Gedung Pusat Pelayanan Kepolisian Terpadu KIPP. Selain pembangunan infrastruktur keamanan cerdas yang sebagian besar akan dimulai pada tahun 2023, pembangunan infrastruktur dasar lainnya juga didukung oleh pengamanan yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur beserta Polres jajarannya.	a) Peralatan teknologi kantor satelit BIN; b) <i>Data Center</i> ; c) <i>Network Operating Center (NOC)</i> ; d) <i>Security Operating Center (SOC)</i> .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 553 -

6.1.3 Pemindahan ASN, Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik, Pelayanan Publik Bagi PNA dan OI, serta Pemindahan TNI dan Polri.

6.1.3.1 Pemindahan ASN dan Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik.

ASN yang akan berpindah pada Tahap 1 terbagi dalam dua alternatif sebagai berikut:

a. Alternatif Pertama

Alternatif kesatu berupaya memfokuskan pemindahan ASN serta pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik di tahap pertama pada kementerian/lembaga klaster I dan kementerian/lembaga klaster II dengan komposisi pemindahan dari **47 kementerian/lembaga** dengan masing-masing kementerian/lembaga memindahkan pegawainya secara **keseluruhan (100 persen)**, sebagai berikut:

Gambar 6- 1 Rincian Kementerian/Lembaga yang Dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara pada Tahap 1 (Alternatif Pertama)

Klaster I (100%)

1. Lembaga Tinggi Negara (MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK)
2. Kementerian Koordinator (Kemenko Ekon, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemenko Marves)
3. Kementerian 'Triumvirat' (Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan), sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945)
4. K/L yang mendukung kerja Presiden-Wakil Presiden secara langsung (Kemensekneg, Setkab, KSP, Wantimpres)
5. K/L yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan (KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, KemenPANRB, BPKP)
6. Kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (Kemenkominfo, KemenPUPR, KemenATR/BPN)
7. Alat Pertahanan dan Keamanan dan K/L yang mendukung penegakan hukum (Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polri, Paspampres, BIN, BSSN, Kejaksaan, Kemenkumham, KPK)
8. Lembaga Negara Independen dan Badan Publik (BI, OJK, LPS, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan)

Klaster II (100%)

1. Kementerian yang mendukung pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara (Kemenhub, KLHK, KemenBUMN)
2. Kementerian yang mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar, pembangunan manusia, dan kebudayaan (Kemendes-PDTT, KemenPPPA, Kemenpora)

b. Alternatif Kedua

Alternatif kedua berupaya memfokuskan pemindahan ASN serta pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik di tahap pertama pada kementerian/lembaga klaster I, II, III dan IV dengan komposisi pemindahan dari **74 kementerian/lembaga**, dengan masing-masing kementerian/lembaga memindahkan pegawainya secara **sebagian (±50 persen)**, sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 554 -

Gambar 6- 2 Rincian Kementerian/Lembaga yang Dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara pada Tahap 1 (Alternatif Kedua)

Klaster I (50%)

1. Lembaga Tinggi Negara (MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK)
2. Kementerian Koordinator (Kemenko Ekon, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemenko Marves)
3. Kementerian "Triumvirat" (Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan), sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945)
4. K/L yang mendukung kerja Presiden-Wakil Presiden secara langsung (Kemensetneg, Setkab, KSP, Wantimpres)
5. K/L yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan (KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, KemenPANRB, BPKP)
6. Kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (Kemenkominfo, KemenPUPR, KemenATR/BPN)
7. Alat Pertahanan dan Keamanan dan K/L yang mendukung penegakan hukum (Mabas TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polri, Paspampres, BIN, BSSN, Kejagung, Kemenkumham, KPK)
8. Lembaga Negara Independen dan Badan Publik (BI, OJK, LPS, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan)

Klaster II (50%)

1. Kementerian yang mendukung pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara (Kemenhub, KLHK, KemenBUMN)
2. Kementerian yang mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar, pembangunan manusia, dan kebudayaan (Kemenag, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemensos, Kemendes-PDPT, KemenPPPA, Kemenpora)

Klaster III (50%)

1. Kementerian yang mendukung pengembangan ekonomi dan investasi (Kemendag, Kemenperin, Kemenkop-UKM, Kemenaker, Kementan, KemenESDM, KKP, Kemenparekraf/Baparekraf, Kemenirves/BKPM)

Klaster IV (50%)

1. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) (BPS, BKN, LAN, BKKBN, BNN, BNPB, BNPT, Basarnas, BIG, Bakamla, Lemhannas, LKPP, BRIN, BPOM)

Dalam upaya pemindahan sejumlah ASN serta pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik tersebut, diperlukan rangkaian persiapan dan dukungan teknis infrastruktur perkantoran pemerintahan dan hunian yang perlu disediakan, sebagaimana terlampir dalam Tabel 6-6.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 555 -

Tabel 6-6 Penahapan Arahana Pemanfaatan Ruang terkait Pemindahan ASN serta Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik di Tahap 1
Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024

Komponen	Jenis/ Komponen Infrastruktur	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
Pemindahan ASN serta pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik ke Ibu Kota Nusantara	Bangunan Negara, bangunan gedung dan infrastruktur dasar bangunan rumah	Perkantoran Pemerintahan	Pembangunan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Kompleks Kepresidenan, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, dan Kantor Sekretariat Kabinet secara bertahap	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) – WP IA	Terbangunnya: Istana Presiden; Istana Wakil Presiden; sebagian Kompleks Kepresidenan; Bangunan pendukung	APBN	2024
			Pembangunan perkantoran Lembaga Tinggi Negara secara bertahap (sementara dalam bentuk <i>shared-office</i>) (MPR-DPR-DPD RI), BPK RI, MA RI, MK RI, dan KY RI);	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) – WP IA	Terbangunnya perkantoran secara bertahap (dalam bentuk <i>shared-office</i>) (MPR RI-DPR RI-DPD RI), BPK RI, MA RI, MK RI, dan KY RI)	APBN	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 556 -

Komponen	Jenis/ Komponen Infrastruktur	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Pembangunan perkantoran Lembaga negara yang diamanatkan peraturan berkantor di Ibu Kota Negara (BI, OJK, LPS, BPJS)	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan/ atau KIKN	Gedung perkantoran BI	Pendanaan secara mandiri	2024
			Pembangunan perkantoran pemerintahan sesuai dengan K/L yang dipindahkan dalam bentuk kantor bersama (<i>shared office</i>)	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) – WP IA	Terbangunnya gedung perkantoran dalam bentuk kantor bersama untuk K/L yang dipindahkan	APBN/KPBU IKN/Swasta murni	2024
		Rumah Negara/Rumah Dinas	Pembangunan hunian sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan: Rumah Tapak: a. Menteri/Kepala Lembaga (580m ²)	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)–WP 1, WP 2, WP 4, dan WP 5	Terbangunnya rumah negara/rumah dinas sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan	APBN/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)/ BI dengan	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 557 -

Komponen	Jenis/ Komponen Infrastruktur	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			b. Pejabat Negara (490 m ²) c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (390 m ²) Rumah Susun: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (290 m ²) b. Pejabat Administrator/ Koordinator (190 m ²) c. Pejabat Fungsional (98 m ²)			pendanaan mandiri/ Swasta murni	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 558 -

Salah satu komponen pembiayaan dalam tahapan pemindahan ASN adalah pemberian fasilitas (*benefit*) pemindahan ASN, yang meliputi:

- a. Biaya pindah ASN dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur terkait Standar Biaya Masukan. Komponen biaya pindah dapat berupa:
 1. Uang harian;
 2. Biaya barang pindahan;
 3. Biaya transportasi;
 4. Biaya tunggu.

Pemberian biaya pindah ASN ini diberikan kepada ASN beserta anggota keluarga ASN (meliputi 1 orang pasangan, 2 orang anak, dan 1 orang Asisten Rumah Tangga (ART) dari tiap ASN yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara).

- b. ASN yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara juga berhak memperoleh tunjangan kemahalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.1.3.2 Pemindahan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bagi PNA dan OI

Proses pemindahan penyelenggaraan pelayanan publik bagi PNA dan OI di setiap penahapannya akan mempertimbangkan kebutuhan fasilitasi yang muncul atas perkembangan keberadaan dan kesanggupan PNA dan OI untuk berpindah ke Ibu Kota Nusantara.

Pada Tahap 1, yaitu periode 2022 hingga 2024, akan dilaksanakan persiapan transisi pelayanan publik bagi PNA dan OI. Kegiatan yang akan dilakukan adalah kajian persiapan transisi meliputi operasional teknis, evaluasi dan penyempurnaan proses bisnis dan mekanisme kerja pelayanan kepada PNA dan OI, penguatan sistem digitalisasi serta mitigasi potensi risiko transisi pelayanan publik di Ibu Kota Nusantara. Di tahapan ini upaya pendekatan bilateral, promosi, dan sosialisasi pembangunan Ibu Kota Nusantara mulai secara aktif dilakukan kepada PNA dan OI di dalam negeri dan negara pengirim/kantor pusat OI melalui Perwakilan Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 559 -

6.1.3.3 Pemindahan TNI dan Polri

Jumlah personil bidang Pertahanan dan Keamanan yang akan dipindahkan pada Tahap 1 berjumlah 5.716 orang dengan perincian pada Tabel 6-7.

Tabel 6-7 Jumlah Pemindahan Personil Bidang Pertahanan dan Keamanan Tahap 1
Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024

KEMENTERIAN/LEMBAGA	TAHAP 1
Kementerian Pertahanan	734
TNI	149
TNI AD	578
TNI AL	793
TNI AU	500
Paspampres	800
Polri	1.667
BIN	395
BSSN	100
BAKAMLA	-
Total	5.716

6.2 TAHAP 2 : PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2025-2029

Pada Tahap 2, infrastruktur utama ditargetkan sudah terhubung ke kawasan baru yang dikembangkan. Sementara itu, untuk mencapai KPI kota 10 menit, fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder direncanakan sudah dapat digunakan pada kawasan yang dihuni oleh penduduk Ibu Kota Nusantara. Pada pengembangan di tahun terakhir pada Tahap 2 ini, jumlah penduduk di dalam wilayah Ibu Kota Nusantara diperkirakan meningkat seiring dengan tahap awal pembangunan universitas unggulan yang mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi berbasis riset dan teknologi pada periode tahun 2035 menuju 2045.

Pada Tahap 2, jumlah populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2029 diperkirakan sekitar 1.283.589 jiwa. Pemindahan penduduk ke Ibu Kota Negara pada Tahap 2 mencakup ASN dan aparatur pertahanan dan keamanan yang meliputi Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla, serta perkiraan calon penduduk baru lainnya yang meliputi mahasiswa, akademisi dan peneliti serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 560 -

tambahan tenaga kerja di sektor layanan pendukung lainnya (antara lain sektor konstruksi, akomodasi, makanan, minuman dan ritel) beserta tambahan populasi tanggungan. Proses pemindahan ASN diperkirakan telah dapat diselesaikan pada periode ini. Adapun rincian proyeksi jumlah populasi Ibu Kota Nusantara pada Tahap 2 dapat dilihat pada Tabel 6-8.

Tabel 6-8 Proyeksi Jumlah Populasi Ibu Kota Nusantara
pada Tahap 2 (Tahun 2025-2029)

No	Populasi	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Jumlah Tenaga Kerja					365.389
1.1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	68.000	76.000	84.000	92.000	100.023
1.2	Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla					43.065
1.3	Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik					485
1.4	Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	51.256	52.690	54.124	55.560	56.994
1.5	Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	130.706	134.270	137.834	141.398	144.962
1.6	Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan Ibu Kota Nusantara*	17.500	18.090	18.680	19.270	19.860
2.	Populasi Tanggungan/Dependen					758.851
2.1	Anggota Keluarga ASN	272.000	304.000	336.000	368.000	400.092
2.2	Anggota Keluarga Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla					120.582
2.3	Anggota Keluarga Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik					72
2.4	Mahasiswa	7.128	7.135	7.149	7.178	7.235



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 561 -

No	Populasi	2025	2026	2027	2028	2029
2.5	Keluarga Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	53.348	54.841	56.333	57.828	59.320
2.6	Keluarga Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	136.041	139.750	143.460	147.169	150.879
2.7	Keluarga Tenaga Kerja Konstruksi pada masa Pembangunan Ibu Kota Nusantara	18.214	18.828	19.442	20.057	20.671
3.	Jumlah Penduduk Eksisting yang berada dalam delineasi Ibu Kota Nusantara	154.717	155.862	157.016	158.178	159.349
	TOTAL POPULASI					1.283.589

Catatan :

- Pemindahan ASN diproyeksikan selesai pada tahap ini.
- Proyeksi tenaga kerja konstruksi merupakan angka sementara berdasarkan data historis di luar perhitungan investasi sektor konstruksi.
- Proyeksi Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik beserta keluarga baru mencakup data pegawai Bank Indonesia. Tidak ada tambahan pegawai beserta keluarganya yang dipindahkan pada Tahap 2.

Pembangunan pada Tahap 2 adalah lanjutan pembangunan (1) KIPP sub WP 1A, 1B, 1C; (2) Kawasan Ibu Kota Nusantara Barat; (3) Kawasan Ibu Kota Nusantara Timur dengan pengembangan zona *mixed-use* dengan sejumlah tipologi yang meliputi (a) perluasan kawasan perkantoran pemerintahan pusat (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif) dengan penerapan konsep *smart government*; (b) perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri; serta (c) perluasan kawasan bisnis dan ekonomi pendukung termasuk pengembangan hotel bisnis dan MICE; (d) pengembangan kluster industri (termasuk Industri 4.0 *center of excellence*); (e) pengembangan riset dan pengembangan talenta serta universitas unggulan; (f) pembangunan rumah sakit berstandar internasional. Pengembangan zona *mixed-use* tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga ruang terbuka hijau, serta pengembangan infrastruktur transportasi, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 562 -

6.2.1 Persiapan

Penyediaan tanah pada Tahap 2 dilakukan melalui pelepasan kawasan hutan maupun pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah langsung. Sementara itu, pada wilayah yang telah ada pemilikan dan penguasaan masyarakat, apabila dilakukan melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun DPPT dan menganggarkan biaya pembebasan lahan.

Pembangunan jalur atau akses logistik pembangunan Ibu Kota Nusantara terus dilakukan untuk pengembangan kawasan yang lebih luas meliputi pembangunan jalan akses kerja di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara yang mendukung akses menuju KIPP serta KIKN. Selain itu, dukungan penyediaan rumah tenaga kerja juga terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan perluasan pembangunan Ibu Kota Nusantara pada Tahap 2 untuk mencakup tambahan tenaga kerja konstruksi baik yang berasal dari luar wilayah Ibu Kota Nusantara maupun tenaga lokal.

Sosialisasi dan komunikasi secara lebih luas akan terus dilanjutkan ke berbagai pemangku kepentingan. Sosialisasi terkait dengan pemindahan ditujukan kepada ASN, TNI dan Polri serta lembaga negara lainnya yang akan dipindahkan pada Tahap 2. Sosialisasi terkait dengan rencana pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara juga dilakukan kepada masyarakat lokal dan calon penduduk pendatang, daerah sekitar Ibu Kota Nusantara, serta PNA dan OI seiring dengan pemindahan awal Ibu Kota Nusantara. Sosialisasi terkait dengan potensi investasi juga ditujukan kepada investor potensial yang akan turut berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara.

6.2.2 Pembangunan

6.2.2.1 Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia

Pada Tahap 2, pembangunan sosial dan sumber daya manusia akan dilaksanakan pada beberapa hal, yaitu:

- a. Penguatan pelibatan tokoh dan masyarakat adat dan lokal dalam berbagai forum kolaborasi yang merepresentasikan kepentingan bersama serta mendorong penguatan peran dalam berbagai aspek pembangunan, seperti dalam hal pengelolaan, konservasi dan restorasi hutan dan lahan, serta ketahanan pangan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 563 -

- b. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti balai adat, pusat kebudayaan, aset yang bernilai sosial dan budaya, rumah ibadah serta sarana ruang terbuka yang didesain secara inklusif dan responsif gender serta sesuai dengan kondisi sosial masyarakat untuk mendorong integrasi masyarakat sekaligus tetap menjaga kearifan lokal.
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong penyediaan fasilitas pendidikan di seluruh tingkatan pendidikan serta penyediaan fasilitas kesehatan secara merata di seluruh wilayah Ibu Kota Nusantara, termasuk beroperasinya Rumah Sakit Berstandar Internasional.
- d. Pengembangan kapasitas masyarakat lokal dan penciptaan peluang ekonomi bagi kelompok rentan melalui pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas lembaga pendidikan yang ada untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil sesuai minat investor di klaster-klaster ekonomi.

Adapun arahan pemanfaatan ruang untuk aspek sosial dan sumber daya manusia yang mendukung dapat dilihat pada Tabel 6-9 di bawah ini.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 645 -

6.3.2.2 Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan

Pada Tahap 3, selain pengembangan lanjutan KIPP, akan dilakukan pembangunan lanjutan WP II Kawasan Ibu Kota Nusantara Barat dan dimulainya pembangunan WP IV Kawasan Ibu Kota Nusantara Timur, maka kawasan yang dipersiapkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembangunan jalan di wilayah KIKN secara bertahap;
- b. Pengembangan KA akses Bandara Balikpapan-KIPP;
- c. Pembangunan dan pengembangan utilitas terintegrasi, seperti:
 1. SPALD-T yang berlokasi di daerah infrastruktur pusat dengan kapasitas sekitar 50 persen;
 2. SPAM yang berlokasi di daerah infrastruktur pusat dengan kapasitas sekitar 50 persen;
 3. Pembangunan fasilitas pengelolaan persampahan;
 4. Pembangunan/peningkatan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi 100 persen kebutuhan pengembangan Ibu Kota Nusantara Tahap 3 serta melanjutkan identifikasi potensi sumber air baku;
 5. Penambahan kapasitas penyediaan tenaga listrik dan gas melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan gas: pembangunan pembangkit, sistem penyaluran tenaga listrik, cadangan dan penyimpanan energi, serta jaringan gas kota;
 6. Pembangunan infrastruktur TIK: pengembangan pusat data tepi dan jaringan utama telekomunikasi, dan BTS.
- d. Melanjutkan pembangunan infrastruktur (hijau dan abu-abu) untuk penerapan prinsip kota spons dan pengembangan/pemutakhiran *smart early warning system*;
- e. Pengembangan sarana pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, olahraga);
- f. Program kota hutan konservasi dan restorasi hutan:
 1. Rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;
 2. Penambahan penanaman di area pengembangan;
 3. Penambahan penanaman pohon dan vegetasi di area KIPP dan KIKN;
 4. Pelibatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan lokal, termasuk perempuan dan anak dalam pengelolaan hutan/wanatani.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 646 -

- g. Penyediaan perumahan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga yang mempertimbangkan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya KPBU IKN untuk:
1. pengembangan rumah umum (lanjutan);
 2. rumah negara ASN, TNI dan Polri (lanjutan);
 3. rumah masyarakat/tenaga pendukung Ibu Kota Nusantara (komersial maupun swadaya).

Rincian penahapan untuk aspek infrastruktur dan lingkungan di Tahap 3 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 647 -

Tabel 6-16 Penahapan Arahkan Pemanfaatan Ruang Aspek Infrastruktur dan Lingkungan di Tahap 3 Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2030-2034

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
1.	Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara	Infrastruktur Ketenagalistrikan	Panel surya atap	Pemasangan panel surya atap (Penambahan dari panel surya atap pada tahap sebelumnya)	KIPP dan seluruh perkotaan Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan potensi atap gedung untuk dibangun panel surya atap	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	Setiap tahun
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i> (Penambahan dari pembangunan <i>Solar Farm</i> pada tahap sebelumnya)	KIKN	3.632,7 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 648 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i> (Penambahan dari pembangunan <i>Solar Farm</i> pada tahap sebelumnya)	KPIKN	2.484,7 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2034
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i> (Penambahan dari pembangunan <i>Solar Farm</i> pada tahap sebelumnya)	KPIKN	392,6 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2034
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i>	KPIKN	3.675,3 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 649 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i>	KPIKN	310,7 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2034
			Cadangan dan Penyimpanan Energi	Pembangkit listrik cadangan dan baterai sebagai penyimpanan untuk menjaga stabilitas jaringan dan meningkatkan keandalan	KIKN dan KPIKN (Tergabung di wilayah <i>solar farm</i>)	15%-20% dari total kapasitas pasokan listrik	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2034
			Gardu induk terisolasi gas (<i>Gas Insulated Substation/GIS</i>) 150kV	Pembangunan Gardu Induk	KIPP	1 Unit	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni / KPBU IKN	2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 650 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Gardu Induk 150kV	Pembangunan Gardu Induk	KPIKN	Menyesuaikan dengan penambahan permintaan pasokan listrik	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2034
			Gardu Distribusi 20kV	Pembangunan Gardu Distribusi	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan penambahan permintaan pasokan listrik	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2034
			Jaringan Transmisi dan Distribusi	Pemasangan jaringan transmisi dan distribusi bawah tanah (bila sudah tersedia jaringan utilitas terpadu di lokasi setempat)	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 651 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			<i>Smart metering</i>	Pemasangan <i>smart metering</i> yang dapat berkomunikasi dua arah dengan <i>database</i> penyedia listrik	Tersebar di Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	APBN/ Masyarakat Pelanggan	Setiap tahun
		Infrastruktur Gas	Jaringan Gas Kota	Pemasangan jaringan gas kota	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman yang dibangun	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2030
2.	60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan - Daur Ulang	Fasilitas Pengomposan	Pengolahan limbah organik	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 652 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
		Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Fasilitas daur ulang	Terdiri dari berbagai fasilitas untuk mendaur ulang berbagai macam material	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2034
		Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Fasilitas pengolahan sampah melalui proses termal (<i>Waste to Energy</i>) dan/atau pengolahan sampah menjadi barang (<i>Waste to Product</i>)	Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang tidak bisa didaur ulang	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/Swasta Murni	2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 653 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Lahan Urug Saniter (<i>Sanitary Landfill</i>)	Tempat pemrosesan akhir untuk residu pengolahan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang tidak dapat didaur ulang	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2034
		Infrastruktur sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	Fasilitas Pengolahan Limbah Berbahaya (B3)	Pengolahan limbah berbahaya untuk meminimalkan pencemaran lingkungan atau kerusakan saat dibuang dan diolah bersama dalam fasilitas pengolahan dari industri	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 654 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Fasilitas Pengolahan Limbah B3 medis	Pengolahan limbah B3 medis untuk meminimalkan pencemaran lingkungan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2034
			Lahan Urug B3 (<i>Secure Landfill</i>)	Tempat pembuangan akhir untuk limbah berbahaya untuk mencegah pencemaran lingkungan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2034
		Infrastruktur Persampahan- Pengumpulan Sampah	Jaringan pengangkutan sampah melalui <i>pneumatic</i> (<i>Pneumatic Waste Collection System</i> atau PWCS)	Jaringan pengumpul sampah dari bangunan vertikal ke stasiun pengumpulan PWCS	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 655 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Stasiun Pengumpulan PWCS	Tempat pengumpulan sampah dari jaringan PWCS	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2034
			Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	Sarana pengumpulan sampah dari sumber dan pengangkutan sampah ke TPST	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
3.	100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan	Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah	SPALD-T (IPAL-D dan jaringan perpipaan air limbah domestik)	Pengelolaan Air Limbah dengan Sistem Terpusat (<i>off- site</i>) dilengkapi	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 656 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	pada tahun 2035			dengan fasilitas pengolahan lumpur				
4.	Permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045	Infrastruktur SDA-Sumber Air	Mempertahankan layanan infrastruktur terbangun	Operasi dan pemeliharaan sumber air baku: Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN	2034
			Dimulainya pembangunan sumber air baku lainnya	Pemenuhan target kapasitas terpasang untuk kebutuhan tahap 4 dan/atau sekaliigus untuk kebutuhan tahap 4 dan 5	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Potensi reservoir dan intake sungai Mahakam	APBN/ KPBUI IKN	2034
			Pengelolaan infrastruktur penyediaan air baku	Operasi dan Pemeliharaan Sumber dan Intake Air Baku	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBUI IKN	2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 657 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
		Infrastruktur SDA -Banjir dan Drainase Perkotaan	Pembangunan infrastruktur drainase, pengendali banjir dan pengendali sedimen	Lanjutan pembangunan infrastruktur drainase, pengendali banjir dan pengendali sedimen Operasi dan pemeliharaan infrastruktur drainase, pengendali banjir dan pengendali sedimen	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN	
		Infrastruktur Air Minum untuk KIPP	Reservoir pembagi	Penyimpanan air yang akan melayani setiap daerah pengembangan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 658 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Jaringan distribusi	Optimisasi penyerapan <i>idle capacity</i> IPA yang terbangun pada tahap 1	KIPP	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan serta ketersediaan MUT	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	2034
5.	100% konektivitas digital dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk semua penduduk dan bisnis	Pusat Data Tepi (<i>Edge Data Center</i>)	Pusat Data	Sebagai Pusat Data Tepi guna menunjang Sistem Data dan Teknologi Informasi	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Total 2 unit	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2034
		<i>Fixed Broadband</i>	Serat Optik	Penghubung jaringan telekomunikasi	KIPP	2-4 Ring (100, 400 GbE)	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2030
		<i>Mobile Broadband</i>	BTS	Penghubung jaringan telekomunikasi	Jarbersel KIPP	100-200 unit	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2030



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 659 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
6.	80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif	Transportasi umum	Bus	Pengembangan layanan angkutan umum bus dan fasilitas pendukung (<i>halte/ shelter</i>)	KIKN	Operasional angkutan umum bus dan fasilitas pendukung	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2034
			Fasilitas transit atau perpindahan antar-moda	Sistem transit dan/atau TOD	KIKN	Operasional sistem transit dan/atau TOD	APBN/Swasta Murni	2034
			Kereta Api	Pembangunan jalur KA akses Bandara Balikpapan – KIPP	KIKN, Balikpapan	Operasional jalur KA akses Bandara Balikpapan - KIPP	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2034
7.	10 menit ke fasilitas penting dan simpul	Infrastruktur Jalan	Jalan di KIKN	Operasional jaringan Jalan di Kawasan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya	KIKN, Balikpapan, Samarinda	100% jaringan jalan di KIPP dan fasilitas pendukung	APBN/Swasta Murni	2030



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 660 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	transportasi publik	Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Penataan lingkungan	Penataan perumahan dan permukiman terintegrasi	KIKN	100% prasarana/sarana dasar perumahan dan simpul transportasi umum dapat ditempuh <10 menit	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni/ masyarakat	2034
8.	>75% dari 256.142 hektare area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)	Konservasi dan Restorasi Hutan	Pengurangan deforestasi Perlindungan hutan	Moratorium dan/atau pencabutan izin tambang dan sawit dalam kawasan hutan dan lindung	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Seluruh izin tambang batubara dan kebun sawit dalam kawasan hutan	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
				Penyelesaian penguasaan kawasan hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	30.000 hektare	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 661 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
							Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
				Penghentian dan/atau pencabutan izin tambang dan sawit dalam kawasan hutan dan lindung	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Seluruh izin tambang batubara dan kebun sawit dalam kawasan hutan	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
				Penyelesaian penguasaan dan/atau	Wilayah Ibu Kota Nusantara	30.000 hektare	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 662 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				tenurial kawasan hutan			Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
				Patroli dan penegakan hukum pidana kehutanan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tergantung ancaman dan kejadian	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
				Patroli dan pemadaman kebakaran hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tergantung kerawanan kebakaran	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 663 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
							Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
			Konservasi keanekaragaman hayati	Perlindungan koridor satwa alami	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Koridor Samboja Koridor KIKN	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
				Perlindungan koridor satwa buatan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Di lokasi pembangunan infrastruktur	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 664 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				(jembatan atau terowongan)			Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
				Konservasi eks-situ keanekaragaman hayati	Wilayah Ibu Kota Nusantara	BOSF Samboja, Yayasan Jejak Pulang, PSO Arsari	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
				Pembangunan Pusat Penyelamatan Satwa terpadu	Wilayah Ibu Kota Nusantara	1 unit Pusat Penyelamatan Satwa Terpadu	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan	2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 665 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
							Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
				Inventarisasi dan monitoring tanaman dan satwa liar	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
			Pengelolaan hutan/wanatani berkelanjutan	Pegembangan bisnis kehutanan dari jasa ekosistem dan HHBK	Wilayah Ibu Kota Nusantara	3 bisnis kehutanan (karbon, wisata alam, HHBK)	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 666 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
							Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
			Restorasi hutan	Pembangunan persemaian skala besar	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Satu persemaian di Mentawir	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
				Rehabilitasi dan/atau penanaman pohon	Wilayah Ibu Kota Nusantara	15.000 hektare	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 667 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
							Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
				Reklamasi dan/atau pemanfaatan lahan bekas tambang dan kebun sawit	Wilayah Ibu Kota Nusantara	1.000 hektare/tahun	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 668 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Integrasi konservasi hutan dalam tata ruang	Penetapan kawasan dilindungi berdasarkan nilai keanekaragaman hayati dan karbon stok	Wilayah Ibu Kota Nusantara	159.180 hektare	APBN	
		Infrastruktur SDA-Konservasi air penerapan prinsip kota spons	Pengelolaan kolam retensi dan embung multiguna	Lanjutan pembangunan kolam-kolam tampungan air yang memiliki multifungsi untuk penyediaan air, pengendalian banjir, konservasi air, vista kota, serta mengurangi <i>urban heat</i>	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN	2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 669 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
		Produksi makanan sehat dan organik	Area pertanian regeneratif pangan	1. Intensifikasi pertanian 2. Peningkatan kapasitas bagi petani lokal	KPIKN	±35.000 hektare (memenuhi >10% lahan untuk pemenuhan pangan sebesar ±25.000 hektare)	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	Setiap tahun
			Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) dengan teknologi pertanian konservasi dan permakultur	Pengembangan KSPP dengan teknologi pertanian konservasi dan permakultur	KPIKN	Seluruh luasan lahan	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	Setiap tahun
9	100 persen penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat	Infrastruktur SDA - Konservasi air penerapan prinsip kota spons	Penerapan <i>Zero Delta Q</i>	Fasilitas pemanenan maupun peresapan air hujan yang diterapkan di gedung- gedung dan bangunan-bangunan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	75% ketaatan pemilik gedung dan bangunan dalam penerapan <i>zero delta Q</i>	APBN/ KPBU/Swasta Murni	2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 670 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	institusional, komersial, dan hunian							
10	100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif	Infrastruktur Kawasan Permukiman	Pengembangan kawasan permukiman yang sudah ada Pembangunan KIKN	Pembangunan KIKN secara bertahap termasuk penyediaan fasum fasos	KIKN	56.920 hektare	APBN/ KPBUIKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 671 -

6.3.2.3 Pembangunan Industri dan Pusat Ekonomi

Pada tahun 2030-2034 pengembangan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi, sebagaimana telah dijabarkan pada tahap sebelumnya, akan dilanjutkan dengan rencana sebagai berikut:

- a. Peningkatan investasi untuk klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan, dan kapasitas produksinya di Daerah Mitra;
- b. Peningkatan investasi untuk klaster industri masa depan yang berbasis energi terbarukan di Daerah Mitra dalam rangka merespon permintaan dalam negeri dan peluang pasar ekspor;
- c. Peningkatan kapasitas produksi pada klaster farmasi terintegrasi di Daerah Mitra untuk meraup pasar ekspor, serta memperluas ke bidang pengemasan primer dan sekunder;
- d. Diversifikasi klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif yang didukung perluasan investasi dan kerja sama dengan daya tarik wisata yang dikelola masyarakat;
- e. Diversifikasi klaster industri kimia maju dan turunannya di Daerah Mitra yang akan mendukung daya saing ekspor;
- f. Peningkatan kapasitas dan inovasi pada klaster energi rendah karbon di Daerah Mitra untuk memperluas pemanfaatan teknologi *enhanced oil recovery* (EOR) untuk peningkatan produksi dari ladang minyak tua, revitalisasi kilang minyak di Balikpapan, mengembangkan pabrik gasifikasi batu bara untuk mengurangi ketergantungan pada impor *liquified petroleum gas* (LPG), memperluas aktivitas ke hilir dengan mengembangkan pusat *original equipment manufacturer* (OEM), serta meningkatkan rehabilitasi pertambangan dan memperluas penerapan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan;
- g. Penguatan kota cerdas dan pusat digital untuk meningkatkan efisiensi klaster-klaster ekonomi; serta
- h. Penguatan pendidikan abad ke-21 pada sekolah menengah, sekolah kejuruan, dan perguruan tinggi sesuai kebutuhan talenta pada aktivitas ekonomi yang semakin berkembang di Ibu Kota Nusantara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 672 -

Tabel 6-17 Penahapan Arahkan Pemanfaatan Ruang Aspek Industri dan Pusat Ekonomi di Tahap 3 Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2030-2034

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
1.	Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita negara (setara ekonomi) berpendapatan tinggi	Infrastruktur Kawasan Industri dan pusat ekonomi	Perencanaan	1. Pemutakhiran Masterplan Kawasan dan/atau <i>site plan</i> 2. Penyusunan <i>Feasibility Study</i>	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di wilayah Kalimantan Timur lainnya	Paket dokumen per indikasi program per lokasi	APBN/APBD/ BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2030
			Perizinan	1. Penyusunan dan/atau pemutakhiran dokumen Izin Lingkungan 2. Proses pengajuan baru dan/atau perpanjangan perizinan lahan		Paket dokumen per indikasi program per lokasi	Swasta Murni/ BUMN/ Badan Usaha Otorita	2030



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 673 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				3. Proses pengajuan baru dan/atau perpanjangan Izin Usaha				
			Tata Ruang dan Wilayah	1. Revisi RTRW 2. Penetapan dan/atau revisi RDTR		Paket dokumen per indikasi program per lokasi	APBN/ APBD	2030
			Infrastruktur Dalam Kawasan	1. Pengadaan Lahan Kawasan Industri dan Penetapan Lokasi 2. Pematangan Lahan Kawasan 3. Pengembangan infrastruktur dasar dalam kawasan (air baku, jalan, sistem drainase dan air limbah, energi,	KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur),	1. Paket kegiatan per lokasi 2. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	Swasta Murni/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ APBD/ APBN	2032



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 674 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan lainnya				
			Infrastruktur pemampu (<i>enabler</i>)	1. Pembangunan pusat dan infrastruktur digital 2. Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan vokasi, dan perguruan tinggi 3. Penyusunan kebijakan dan penerapan konsep kota cerdas dan industri 4.0	Wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara	Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program sesuai kebutuhan	APBN/ APBD/KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2032



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 675 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Konektivitas Luar Kawasan	1. Pembangunan dan/atau peningkatan Jalan mendukung akses menuju kawasan industri 2. Pengembangan Pelabuhan mendukung Kawasan Industri	KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di wilayah Kalimantan Timur lainnya	Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/APBD/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2032
			Infrastruktur Penunjang Luar Kawasan	1. Pengadaan Lahan untuk pengembangan infrastruktur penunjang luar kawasan		1. Paket kegiatan per lokasi 2. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/APBD/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2032



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 676 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				2. Pengembangan infrastruktur penunjang lainnya 3. infrastruktur penunjang lainnya				
			Peningkatan Investasi	1. Fasilitasi Investasi 2. Pameran/Roadshow Investasi 3. Penyusunan dan/atau pemutakhiran profil Investasi 4. Pendampingan Investasi 5. Investasi Pembangunan Fasilitas Produksi	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di wilayah Kalimantan Timur lainnya	Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN	2030
			Promosi Ekspor	1. Penyelesaian Hambatan		Paket kegiatan per indikasi program per	APBN/APBD/Swasta Murni/	2030



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 677 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Perdagangan dengan Negara Mitra 2. Simplifikasi Regulasi Ekspor 3. Perumusan Insentif Fiskal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan		lokasi sesuai kebutuhan	BUMN/Badan Usaha Otorita	
			Kemitraan Usaha	1. Pengembangan Rantai Pasok UMKM 2. Fasilitasi Produksi UMKM 3. Logistik UMKM 4. Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Mikro dan Besar		Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/APBD/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2030



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 678 -

			Penyediaan SDM	<ol style="list-style-type: none">1. Pelatihan SDM2. Riset permintaan pasar (<i>market demand analysis</i>) dan analisis kebutuhan pelatihan (<i>training needs analysis</i>)3. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja (<i>manpower planning</i>)4. Pembangunan layanan informasi pasar kerja5. Pengembangan konsep afirmasi pelibatan tenaga kerja lokal6. Pembangunan konsep afirmasi pelibatan tenaga kerja pasangan ASN yang non-ASN		Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2030
--	--	--	----------------	---	--	---	---	------



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 679 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Harmonisasi Regulasi	1. Kebijakan Rantai Pasok Hulu Hilir 2. Penyusunan Insentif Fiskal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan, dan Non Fiskal		Paket kebijakan per indikasi program per klaster ekonomi sesuai kebutuhan	APBN/APBD	2030

Catatan:

- Rencana indikasi program Infrastruktur pemampu (*enabler*) dijabarkan dalam penahapan Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia serta Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan.
- Paket kegiatan pembangunan infrastruktur dan penyiapan SDM terbuka untuk dilaksanakan melalui investasi swasta/BUMN/Badan Usaha Otorita atau dukungan pemerintah, atau kerja sama antara swasta, BUMN/Badan Usaha Otorita dan pemerintah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 680 -

6.3.2.4 Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Pada tahap selanjutnya yaitu periode 2030 - 2034, pembangunan akan berfokus pada pembangunan sistem pertahanan dan keamanan yang terdiri atas:

- a. Simbol sistem dan strategi pertahanan: Gedung Kementerian Pertahanan (lanjutan);
- b. Sistem dan strategi pertahanan:
 1. Paspampres (lanjutan);
 2. Mabes TNI (lanjutan);
 3. Makodam & Balakdam IKN;
 4. Yonarhanud C;
 5. Yonhub;
 6. Flite Penerbad;
 7. Yonif;
 8. Pasmars dan Kodamar Samboja (lanjutan);
 9. Lanud (KPIKN), Wing Udara, Skadron 17 45 9, Skadron Jet Tanker, Skatek. (lanjutan);
 10. Kosek IKN, Satrudal Jauh-Sedang, Sat Anti Drone Taktis-Strategis. (lanjutan);
 11. Resimen Arhanud (lanjutan);
 12. Yonko 467 (lanjutan).
- c. Sistem dan strategi keamanan cerdas:
 1. Mako Korbrimob;
 2. Mako Korpolairud;
 3. Polsek KP-IKN;
 4. Pemenuhan peralatan;
 5. Pemenuhan rumah dinas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 681 -

6.3.3 Pemindahan Pelayanan Publik Bagi PNA dan OI, serta Pemindahan TNI dan Polri

6.3.3.1 Pemindahan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi PNA dan OI

Pada Tahap 3, yaitu periode 2030-2034, upaya pelayanan publik bagi PNA dan OI telah dapat beroperasi dengan baik. Upaya pendekatan bilateral, promosi dan sosialisasi kepada PNA dan OI di dalam negeri dan negara pengirim/kantor pusat OI melalui Perwakilan Republik Indonesia, terus dilakukan guna terus mendorong PNA dan OI lainnya untuk memberikan indikasi ketertarikan dan komitmen untuk membangun kantor perwakilan di Ibu Kota Nusantara.

6.3.3.2 Pemindahan TNI dan Polri

Jumlah personil bidang Pertahanan dan Keamanan yang akan dipindahkan pada Tahap 3 berjumlah 23.841 orang, seperti yang dicantumkan di dalam Tabel 6-18:

Tabel 6-18 Jumlah pemindahan personil bidang pertahanan dan keamanan pada Tahap 3

KEMENTERIAN/LEMBAGA	TAHAP 3
Kementerian Pertahanan	-
TNI	-
TNI AD	5.977
TNI AL	4.731
TNI AU	1.981
Paspampres	-
Polri	10.527
BIN	625
BSSN	-
BAKAMLA	-
Total	23.841



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 682 -

6.4 TAHAP 4: PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2035-2039

Pada Tahap 4 diperkirakan jumlah penduduk Ibu Kota Nusantara mencapai sekitar 1,6 juta jiwa, dengan pemindahan lanjutan tambahan TNI/Polri. Selain lanjutan pemindahan TNI/Polri yang masih terus dilakukan, fokus pengembangan kawasan semakin progresif pada pengembangan kawasan-kawasan di luar KIPP yang meliputi kawasan industri dan sektor-sektor lainnya dalam klaster ekonomi superhub.

Tahap 4 ditandai dengan dimulainya perkembangan pesat di bidang pendidikan, dan kesehatan yang akan menjadi motor penggerak sektor ekonomi lain di Ibu Kota Nusantara. Perluasan kawasan perkotaan pada tahap ini telah mencapai Ibu Kota Nusantara Utara, terutama pada kawasan yang terhubung langsung dengan Ibu Kota Nusantara Timur.

Penahapan pemindahan penduduk ke Ibu Kota Negara pada Tahap 4 tahun 2035-2039 berkembang ke sebagian besar tenaga kerja sektor ekonomi dan industri baru beserta keluarganya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6-20 Proyeksi Jumlah Populasi Ibu Kota Nusantara
Sampai Dengan Tahap 4 (Tahun 2035-2039)

No	Populasi	2035	2036	2037	2038	2039
1.	Jumlah Tenaga Kerja					493.368
1.1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023
1.2	Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla					89.691
1.3	Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik					856
1.4	Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	69.482	72.859	76.236	79.613	82.403
1.5	Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	168.398	172.987	177.576	182.165	188.771
1.6	Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan Ibu Kota Nusantara	24.735	26.458	28.180	29.902	31.624



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 683 -

No	Populasi	2035	2036	2037	2038	2039
2.	Populasi Tanggungan/Dependen					1.004.779
2.1	Anggota Keluarga ASN	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092
2.2	Anggota Keluarga Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla					251.135
2.3	Anggota Keluarga Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik					3.425
2.4	Mahasiswa	14.802	18.133	22.394	27.881	34.990
2.5	Keluarga Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	72.318	75.833	79.348	82.863	85.766
2.6	Keluarga Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	175.271	180.048	184.824	189.600	196.476
2.7	Keluarga Tenaga Kerja Konstruksi pada masa Pembangunan Ibu Kota Nusantara	25.745	27.538	29.330	31.122	32.915
3.	Jumlah Penduduk Eksisting yang berada dalam delineasi Ibu Kota Nusantara	165.160	165.854	166.551	167.251	167.954
	TOTAL POPULASI					1.666.121

Catatan :

- Pemindahan ASN diproyeksikan selesai pada tahap kedua.
- proyeksi tenaga kerja konstruksi merupakan angka sementara berdasarkan data historis di luar perhitungan investasi sektor konstruksi.
- proyeksi Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik beserta keluarga baru mencakup data pegawai Bank Indonesia. Pada Tahap 4 diproyeksikan tidak ada tambahan pegawai beserta keluarganya yang dipindahkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 684 -

Pada Tahap 4, pengembangan kawasan akan difokuskan pada KIPP tahap 2A, dan sebagian tahap 2B sub-BWP II; Kawasan Ibu Kota Nusantara Barat; Kawasan Ibu Kota Nusantara Timur; serta Kawasan Ibu Kota Nusantara Utara. Pembangunan pada Tahap 3 akan difokuskan kepada zona *mixed-use* dengan sejumlah tipologi, meliputi (1) Perluasan Kawasan Perkantoran Pemerintahan Pusat (Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) dengan penerapan *smart government*; (2) Perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri; serta (3) Perluasan Kawasan bisnis dan ekonomi pendukung termasuk pengembangan hotel bisnis, *Eco resort* dan MICE; (4) Perluasan Kluster Industri (termasuk Industri 4.0 *center of excellence*); (5) Perluasan riset dan pengembangan talenta serta Universitas unggulan; (6) Perluasan rumah sakit internasional; (7) Perluasan Kawasan Industri di Daerah Mitra. Pengembangan kawasan zona *mixed-use* tersebut didukung dengan menjaga ruang terbuka hijau, serta pengembangan infrastruktur transportasi, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Dalam rangka mendukung pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara pada tahap keempat, maka diperlukan langkah persiapan, pembangunan dan pemindahan dengan rincian penjelasan sebagai berikut.

6.4.1 Persiapan

Penyediaan tanah pada Tahap 3 dapat dilakukan melalui pelepasan kawasan hutan maupun pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah langsung. Sementara itu, pada wilayah yang telah ada pemilikan dan penguasaan masyarakat, apabila dilakukan melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun DPPT dan menganggarkan biaya pembebasan lahan.

Untuk mendukung pembangunan dan pengembangan pada Tahap 4, maka akan terus dilanjutkan sosialisasi secara lebih luas ke berbagai pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sosialisasi ini tidak hanya mencakup masyarakat lokal dan calon penduduk pendatang di Ibu Kota Nusantara serta PNA dan OI, namun juga terhadap berbagai investor potensial yang akan berperan dalam pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 685 -

6.4.2 Pembangunan

6.4.2.1 Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia

Pada Tahap 4, kegiatan pembangunan sosial difokuskan pada dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat, pengembangan Ibu Kota Nusantara yang sesuai rencana tata ruang, pengembangan kebijakan ekonomi hijau dan berkelanjutan bagi sektor-sektor baru.
- b. Peningkatan kapasitas dan daya saing lembaga pendidikan dan riset kelas dunia.

Adapun arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 686 -

Tabel 6-19 Penahapan Arahan Pemanfaatan Ruang Aspek Sosial dan Sumber Daya Manusia di Tahap 4 Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2035-2039

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
1	>75% dari 256.142 hektare area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)	Konservasi dan Restorasi hutan dan lahan	Pelibatan tokoh dan masyarakat dalam konservasi dan restorasi hutan dan lahan	Evaluasi peran lembaga yang melibatkan masyarakat lokal untuk mengatur masalah terkait lahan dan konservasi hutan dan perumusan kegiatan ke depan	KIKN	Dokumen evaluasi terhadap pemukiman dan lahan garapan masyarakat dalam kawasan hutan dan/atau lahan negara	APBN	Setiap tahun
				Penghijauan kembali area yang terdampak pembangunan fisik dan area pemukiman penduduk	KIKN	Pemukiman masyarakat dan kawasan hutan	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 687 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
2	100% integrasi seluruh penduduk	Ruang Publik, Fasilitas Nasional, serta Integrasi Sosial	Diskusi forum sosial dan keagamaan	Penguatan pelaksanaan forum diskusi dengan pemangku kepentingan dari komunitas lokal/adat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Forum dengan lembaga dan masyarakat adat dan lokal yang diperkuat	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2035
				Pergelaran Festival Nusantara untuk menghamornisasikan hubungan antar seluruh penduduk di Wilayah Ibu Kota Nusantara	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Pergelaran Festival yang dihadiri oleh penduduk lokal dan pendatang	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2038
			Aset bernilai budaya penting	Lanjutan pengkajian dan pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayah Ibu Kota Negara	APBN	2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 688 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Kebudayaan dengan melibatkan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan kebudayaan, serta perguruan tinggi				
			Aset bernilai sosial dan budaya penting	Pemeliharaan cagar budaya dan aset penting nasional dengan melibatkan peran masyarakat adat dan lokal dan pemeliharanya	KIPP	Fasilitas keagamaan dan fasilitas sosial pada tingkat nasional yaitu Rumah Ibadah, Museum Nasional, Galeri, serta Perpustakaan Nasional	APBN	2035
3	100% warga dapat menjangkau layanan sosial/	Infrastruktur Perkotaan, Fasilitas Umum	Aset bernilai sosial dan budaya penting	Pembangunan fasilitas sosial dan budaya di luar pembangunan tahap 3	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Fasilitas keagamaan dan fasilitas sosial di berbagai skala pelayanan, seperti	APBN/ KPBUN/ Swasta Murni	2036



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 689 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	masyarakat dalam waktu 10 menit	dan Fasilitas Sosial				Rumah Ibadah, Perpustakaan, Taman Rekreasi, dan ruang terbuka		
			Fasilitas Kesehatan	Penyediaan Posyandu	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Minimal 1 per skala layanan wilayah setara RW	APBN/APBD	2035-2039
				Penyediaan Puskesmas	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Minimal 1 puskesmas per skala pelayanan setara kecamatan dapat bertambah dengan memperhatikan pada tingkat kepadatan penduduk	APBN/APBD	2035-2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 690 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Penyediaan Rumah Sakit Berstandar Internasional	KIPP	Minimal 1 RS Berstandar Internasional	APBN/KPBU IKN	2035-2039
				Penyediaan Rumah Sakit	Wilayah Ibu Kota Nusantara	minimal 1 RS	APBN/APBD/ KPBU IKN/Swasta Murni	2035-2039
				Penyediaan Laboratorium Kesehatan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 Laboratorium terstandar minimal tingkat keamanan hayati (<i>Bio Safety Level/BSL</i>) 3 dan dapat ditingkatkan sampai dengan minimal BSL 4	APBN/APBD/ KPBU IKN/Swasta murni	2035-2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 691 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ada	APBN/APBD/ KPBU IKN	2035-2039
			Fasilitas Pendidikan	Pembangunan lanjutan unit sekolah baru dan pengembangan tingkat TK/RA/BA/PAUD	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 TK/RA/BA/PAUD di setiap wilayah setingkat desa/kelurahan atau tersedia minimal 1 TK/RA/BA/PAUD untuk 270 anak usia 3-6 tahun	APBN/ Swasta Murni	2039
				Pembangunan lanjutan unit sekolah baru dan pengembangan tingkat SD/MI/SDLB/ Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SD/MI/SDLB/ Sederajat untuk 672 anak usia 7-12 tahun	APBN/ Swasta Murni	2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 692 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Pembangunan lanjutan unit sekolah baru dan pengembangan tingkat SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat untuk 1.056 anak usia 13-15 tahun	APBN/ Swasta Murni	2039
				Pembangunan lanjutan unit sekolah baru dan pengembangan tingkat SMA/SMK/MA/ SMALB/ Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SMA/SMK/MA/SMALB/ Sederajat untuk 1.296 anak usia 16-18 tahun	APBN/ Swasta Murni	2039
				Penguatan perguruan tinggi unggulan	Wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara	Tercukupinya sarana dan prasarana PT unggulan untuk mendapatkan akreditasi internasional	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 693 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Pembangunan lanjutan unit Tempat Penitipan Anak/ <i>Day Care</i>	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 TPA/DC di setiap wilayah setingkat desa/ kelurahan atau tersedia minimal 1 TPA/DC untuk 270 anak usia 0 - 12 tahun (sama dengan TK/RA/BA/PAUD)	APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2039
4	100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain	Fasilitas umum	Balai Adat/ Pusat kebudayaan	Pengembangan pembangunan balai adat/pusat kebudayaan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Balai adat/pusat kebudayaan pada skala pelayanan setara kecamatan	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2035
				<i>Monitoring</i> pembangunan balai adat agar tetap sejalan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen evaluasi pembangunan balai adat	APBN/ Pembiayaan Kreatif	2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 694 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	yang responsif gender dan inklusif			dengan prinsip yang telah ditetapkan			(<i>creative financing</i>)	
		Pembangunan universal	Diskusi forum sosial	Pelibatan secara aktif kelompok kelompok rentan seperti Organisasi Penyandang Disabilitas, Perempuan, Anak, dan Lansia untuk sama sama mengevaluasi pembangunan fisik dan sosial yang telah dan akan berjalan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen evaluasi pembangunan fisik dan sosial dari kelompok kelompok rentan	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2035



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 695 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
5	10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	Kohesi dan Inklusi Sosial	Ruang Publik yang aksesibel dan penuh interaksi	Melengkapi ruang ruang publik (seperti terminal, stasiun, bandara) dengan berbagai <i>tenant</i> lokal yang terstandarisasi	Area Luar KIKN	Partisipasi <i>tenant</i> lokal di berbagai fasilitas publik untuk mendukung interaksi sosial	APBN	2036
6	>10% dari lahan 256.142 hektare tersedia untuk kebutuhan produksi pangan	Ketahanan Pangan	Pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam mendorong aspek ketahanan pangan	Penguatan kelompok kelompok tani lokal dengan pelatihan pertanian modern dan bantuan subsidi dan lahan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Modul pelatihan bagi desa dan/atau masyarakat yang hidup dalam kawasan hutan dan/atau kawasan pertanian	APBN	2035



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 696 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Pelatihan peningkatan nilai tambah produk pertanian dan mengintegrasikannya ke platform digital	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Modul pelatihan bagi desa dan/atau masyarakat yang hidup dalam kawasan hutan dan/atau kawasan pertanian	APBN	2035
7	60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	Ekonomi Sirkular	Pemanfaatan Sisa Pangan dan Daur Ulang Sampah	Pengintegrasian produk daur ulang untuk pemenuhan kebutuhan lokal melalui pembudayaan penggunaan produk produk daur ulang	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Produk daur ulang menjadi budaya masyarakat	APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2035
			Pemanfaatan Sisa Pangan dan Daur Ulang Sampah	Lanjutan pembuatan Bank Sampah dengan memberdayakan kelompok masyarakat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Adanya Bank Sampah di berbagai daerah pada level pelayanan setingkat desa	APBN/ Swasta Murni/	2035



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 697 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				lokal atas inisiasi perangkat desa			Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
8	Permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045	Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman	Pelibatan lanjutan tenaga kerja lokal dalam pembangunan dan perbaikan Infrastruktur Permukiman di area permukiman masyarakat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Operasionalisasi Infrastruktur Permukiman di area permukiman masyarakat	APBN	2035
				Evaluasi keterlibatan tenaga kerja lokal pada pembangunan Ibu Kota Nusantara	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen evaluasi ketenagakerjaan penduduk lokal usia kerja	APBN	2035



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 698 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Pembangunan atau pengembangan <i>smart villages/ communities</i>	KIKN	Lanjutan Pengembangan <i>pilot project smart communnities</i>	APBN/ KPBUN/KN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2039
9	0% kemiskinan pada populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2035	Pengentasan Kemiskinan	Pendataan	Evaluasi 5 tahun pendataan terintegrasi basis data terpadu di Wilayah Ibu Kota Nusantara	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen evaluasi pendataan bagi masyarakat lokal dan pendatang	APBN	2035
			Rujukan dan Layanan Sosial	Penguatan kapasitas Pemda, Desa, Kelurahan, dan Masyarakat untuk mengelola dan memberikan rujukan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	DMD/K yang terintegrasi dengan Puskesmas di seluruh Ibu Kota Nusantara terlaksana dengan kapasitas spesialisik untuk	APBN	2035



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 699 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				terhadap masalah dan layanan sosial yang dihadapi/diperlukan penduduk rentan		layanan penduduk berkebutuhan khusus (lansia, penyandang disabilitas, dan seterusnya)		
			Kemandirian Ekonomi	Membangun kemandirian ekonomi dengan membuka akses terhadap permodalan mandiri (perbankan) dan permodalan bantuan (pemerintah), serta internet (teknologi)	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Bertambahnya jumlah masyarakat yang dapat mengakses layanan perbankan dan layanan teknologi (internet)	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (creative financing)	2036
10	Rasio Gini regional	Pengurangan ketimpangan	Pemberdayaan Masyarakat	Evaluasi kurikulum pelatihan kemampuan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen evaluasi bagi BLK yang sudah ada dan	APBN/	2035



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 700 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	terendah di Indonesia pada 2045			UMKM dan tenaga kerja lokal yang ada di BLK		yang baru di wilayah Ibu Kota Nusantara	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
				Penyaluran tenaga kerja terlatih pada berbagai industri dan kegiatan di wilayah Ibu Kota Nusantara bekerja sama dengan pemerintah daerah dan badan swasta	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersalurnya tenaga kerja terlatih ke berbagai industri di Wilayah Ibu Kota Negara	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif	2035



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 701 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
							(creative financing)	
				Pemanfaatan potensi lokal baik itu pariwisata, produk unggulan, produk ekonomi kreatif, maupun seni budaya untuk membuka peluang ekonomi baru masyarakat lokal	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Peningkatan ekonomi baru bagi Masyarakat lokal dan masyarakat adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (creative financing)	2036



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 702 -

6.4.2.2 Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan

Penambahan fasilitas infrastruktur pada Tahap 4 adalah sebagai berikut:

1. Lanjutan pembangunan jalan di KIKN serta sebagian jalan di KPIKN;
2. Pembangunan utilitas terintegrasi, seperti:
 - a. ekspansi SPALD-T yang berlokasi di daerah infrastruktur pusat dengan kapasitas sekitar 100 persen;
 - b. pembangunan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi 100 persen kebutuhan pengembangan Ibu Kota Nusantara Tahap 4;
 - c. melanjutkan pembangunan infrastruktur (hijau dan abu-abu) untuk penerapan prinsip kota spons dan pengembangan/pemutakhiran *smart early warning system*;
 - d. penambahan kapasitas penyediaan tenaga listrik dan gas melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan gas: pembangunan pembangkit, sistem penyaluran tenaga listrik, cadangan dan penyimpanan energi, serta jaringan gas kota;
 - e. melanjutkan identifikasi potensi dan rancangan detail bendungan multiguna dan sumber air baku lainnya, termasuk peluang kerja sama pemerintah dan swasta;
 - f. penambahan amenitas digital dan perkotaan untuk penerapan solusi kota cerdas di KIKN;
 - g. pembangunan infrastruktur TIK: pengembangan pusat data tepi dan jaringan utama telekomunikasi, dan BTS.
3. Program konservasi dan restorasi hutan:
 - a. rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - b. penambahan penanaman di area pengembangan;
 - c. penambahan penanaman pohon dan vegetasi di area KIPP dan KIKN;
 - d. pelibatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan lokal, termasuk perempuan dan anak dalam pengelolaan hutan/wanatani.
4. Pengembangan sarana pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, olahraga);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 703 -

5. Penyediaan perumahan sesuai dengan jumlah kebutuhan rumah tangga yang mempertimbangkan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya KPBU IKN untuk:
 - a. pengembangan rumah umum (lanjutan);
 - b. rumah negara/rumah dinas ASN, TNI dan Polri (lanjutan);
 - c. rumah masyarakat/tenaga pendukung Ibu Kota Nusantara (komersial maupun swadaya).

Rincian penahapan untuk aspek infrastruktur dan lingkungan di Tahap 4 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 564 -

Tabel 6-9 Penahapan Arahkan Pemanfaatan Ruang Aspek Sosial dan Sumber Daya Manusia di Tahap 2 Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2025-2029

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
1	>75% dari 256.142 hektare area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)	Konservasi dan restorasi hutan dan lahan	Pelibatan tokoh dan masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan dan pemberian kompensasi	Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat lokal terkait penguasaan kawasan hutan	KIKN	Terselesaikannya kasus sengketa	APBN	Setiap tahun
				Pemberian kompensasi terhadap pelepasan lahan masyarakat kepada masyarakat adat dan lokal (jika masih diperlukan)	KIKN	Jumlah kompensasi untuk pelepasan lahan minimal	APBN	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 565 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
2	100% integrasi seluruh penduduk	Ruang Publik, Fasilitas Nasional, serta integrasi sosial	Aset bernilai sosial dan budaya penting	Pengkajian dan pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan melibatkan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan kebudayaan, serta perguruan tinggi	KIKN	Dokumen kajian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayah Ibu Kota Negara	APBN	2025
				Pembangunan lanjutan fasilitas sosial dan budaya nasional yang mendukung persatuan bangsa	KIPP	Fasilitas keagamaan dan fasilitas sosial pada tingkat nasional yaitu Rumah Ibadah, Museum Nasional, Galeri, serta Perpustakaan Nasional	APBN	2025



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 566 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
3	100% warga dapat menjangkau layanan sosial/ masyarakat dalam waktu 10 menit	Fasilitas Perkotaan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Aset bernilai sosial dan budaya penting	Pembangunan lanjutan fasilitas sosial dan budaya di berbagai skala layanan di luar pembangunan Tahap 1	KIKN	Fasilitas keagamaan dan fasilitas sosial di berbagai skala pelayanan, seperti Rumah Ibadah, Perpustakaan, Taman Rekreasi, dan ruang terbuka	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2026
			Fasilitas Kesehatan	Penyediaan Posyandu	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Minimal 1 per skala layanan wilayah setara RW	APBN/APBD	2025-2029
				Penyediaan Puskesmas	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 puskesmas per skala pelayanan setara kecamatan dan dapat bertambah dengan memperhatikan tingkat kepadatan penduduk	APBN/APBD	2025-2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 567 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Penyediaan Rumah Sakit Berstandar Internasional	KIPP	Tersedia minimal 1 RS Berstandar Internasional	APBN/KPBU IKN	2025-2029
				Penyediaan Rumah Sakit	Wilayah Ibu Kota Nusantara	minimal 1 RS	APBN/APBD/ KPBU IKN/Swasta Murni	2025-2029
				Penyediaan Laboratorium Kesehatan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 Laboratorium terstandar minimal tingkat keamanan hayati (<i>Bio Safety Level/BSL</i>) 3 dan dapat ditingkatkan sampai dengan minimal BSL 4	APBN/APBD/ KPBU IKN/Swasta murni	2025-2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 568 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ada	APBN/APBD/ KPBU IKN	2025-2029
			Fasilitas Pendidikan	Pembangunan lanjutan unit sekolah baru tingkat TK/RA/BA/PAUD	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 TK/RA/BA/PAUD di setiap wilayah setingkat desa/ tersedia kelurahan atau minimal 1 TK/RA/BA/PAUD untuk 270 anak usia 3-6 tahun	APBN/ Swasta Murni	2029
				Pembangunan lanjutan unit sekolah baru tingkat SD/MI/SDLB/ Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SD/MI/SDLB/ Sederajat untuk 672 anak usia 7-12 tahun	APBN/ Swasta Murni	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 569 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Pembangunan lanjutan unit sekolah baru tingkat SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat untuk 1.056 anak usia 13-15 tahun	APBN/ Swasta Murni	2029
				Pembangunan lanjutan unit sekolah baru tingkat SMA/SMK/MA/ SMALB/Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SMA/SMK/MA/SMALB/ Sederajat untuk 1.296 anak usia 16-18 tahun	APBN/ Swasta Murni	2029
				Pengembangan perguruan tinggi unggulan	Wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara	Minimal 1 fakultas di bidang Saintek, 1 pusat riset dan inovasi, dan sarana penunjang lainnya	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 570 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Pembangunan lanjutan unit Tempat Penitipan Anak/ <i>Day Care</i>	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 TPA/DC di setiap wilayah setingkat desa/ kelurahan atau tersedia minimal 1 TPA/DC untuk 270 anak usia 0 - 12 tahun (sama dengan TK/RA/BA/PAUD)	APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2029
4	100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif	Ruang Publik	Balai Adat/ Pusat kebudayaan	Desain dan konstruksi awal pembangunan balai adat/pusat kebudayaan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Desain dan konstruksi awal balai adat /pusat kebudayaan pada skala pelayanan setara kecamatan	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 571 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Mengembangkan kemitraan potensial (lanjutan) dengan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan kebudayaan	KIKN	Kemitraan dengan lembaga bidang kebudayaan lainnya	APBN	2025
				Monitoring dan evaluasi pembangunan balai adat (akhir tahap 2) agar tetap sejalan dengan prinsip yang telah ditetapkan di awal perencanaan	KIPP	Dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan balai adat Tahap 2	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 572 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
5	10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	Kohesi dan Inklusi Sosial	Ruang Publik yang aksesibel dan penuh interaksi	Sosialisasi pengarusutamaan budaya berjalan kaki dan penggunaan transportasi publik	KIKN	Tersosialisasikannya budaya berjalan kaki dan penggunaan transportasi publik	APBN	2027
6	>10% dari lahan 256.142 hektare tersedia untuk kebutuhan produksi pangan	Ketahanan Pangan	Pelibatan masyarakat perkotaan dalam mendorong aspek ketahanan pangan	Sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan lahan perkarangan untuk pemenuhan pangan rumah tangga secara mandiri	KIKN	Modul sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat di kawasan perkotaan	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2025



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 573 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam mendorong aspek ketahanan pangan	Sosialisasi dan pelatihan (lanjutan) untuk pengembangan kapasitas bagi masyarakat dalam kegiatan pertanian berkelanjutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Modul sosialisasi dan pelatihan bagi Desa dan/atau masyarakat yang hidup dalam kawasan hutan dan/atau kawasan hijau	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2025
7	60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	Ekonomi Sirkular	Pengelolaan sumber daya secara cermat untuk mendorong penurunan produksi limbah dan pemulihan nilai	Pelatihan teknis daur ulang sampah dan pemanfaatan sisa makanan rumahan untuk barang yang lebih bernilai	KIKN	Modul pelatihan daur ulang bagi masyarakat KIKN	APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 574 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
8	Permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045	Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman	Pelibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan dan perbaikan Infrastruktur Permukiman di area permukiman masyarakat	KIKN	Operasionalisasi Infrastruktur Permukiman di area permukiman masyarakat	APBN	2025
				Pembangunan atau pengembangan <i>smart villages/ communities</i>	KIKN	Pengembangan <i>pilot project smart communities</i>	APBN/ KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2025
9	0% kemiskinan pada populasi Ibu Kota	Pengentasan Kemiskinan	Pendataan	Pendataan terintegrasi masyarakat di wilayah Ibu Kota Nusantara untuk	Wilayah Ibu Kota Nusantara	1. Dokumen pendataan dan modul program sosial bagi masyarakat lokal dan pendatang	APBN	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 575 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	Nusantara pada tahun 2035			evaluasi dan penargetan program sosial		2. Basis data Registrasi Sosial Ekonomi mencakup seluruh penduduk Ibu Kota Nusantara		
			Rujukan dan Layanan Sosial	Penguatan kapasitas Pemda, Desa, Kelurahan, dan Masyarakat untuk mengelola dan memberikan rujukan terhadap masalah dan layanan sosial yang dihadapi/diperlukan penduduk rentan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Uji coba Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMD/K) yang terintegrasi dengan Puskesmas	APBN	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 576 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian pengelolaan lahan dan kemudahan akses permodalan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Pengembangan <i>pilot project</i> integrasi program pemberdayaan ekonomi terintegrasi dengan pengembangan ekonomi lokal	APBN	2025
10	Rasio Gini regional terendah di Indonesia pada 2045	Pengurangan ketimpangan	Pengembangan kapasitas masyarakat lokal	Pelatihan vokasi berbasis kompetensi untuk bekerja dan berwirausaha bagi masyarakat wilayah Ibu Kota Nusantara	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Pelatihan vokasi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan kluster ekonomi di BLK dan lembaga pelatihan lainnya yang ditunjuk bagi masyarakat wilayah Ibu Kota Nusantara	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2025



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 577 -

6.2.2.2 Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan

Tahap pembangunan kawasan inti pada tahun 2025-2029 akan berfokus pada penyelesaian KIPP serta pengembangan kawasan perekonomian kota dan pusat inovasi. Pada Tahap 2, infrastruktur kawasan yang perlu disiapkan meliputi:

- a. Lanjutan pembangunan jalan bebas hambatan koridor Balikpapan-KIPP, pembangunan sebagian jalan akses menuju KIPP (arteri primer dan sekunder), serta pembangunan jalan di dalam KIPP;
- b. Lanjutan penyediaan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda di KIPP;
- c. Pengembangan sistem transit dan angkutan umum berbasis bus di KIKN;
- d. Pembangunan dan pengembangan utilitas terintegrasi, seperti:
 1. Dimulainya investigasi dan penilaian kelayakan potensi sumber air baku untuk pemenuhan layanan tahap selanjutnya;
 2. Perencanaan untuk infrastruktur dasar di KIPP dan kawasan lainnya yang akan dikembangkan serta pembangunan fasilitas persampahan dan SPALD-T;
 3. Operasional dan pemeliharaan infrastruktur dasar yang sudah terbangun;
 4. Pembangunan infrastruktur yang mendukung prinsip kota spons (lanjutan), termasuk infrastruktur pengendalian banjir dan sedimen serta pengembangan *smart early warning system*;
 5. Pembangunan infrastruktur TIK: pengembangan pusat data terpadu untuk mendukung pemerintahan dan publik serta jaringan utama telekomunikasi dan BTS;
 6. Penambahan kapasitas penyediaan tenaga listrik dan gas melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan gas: pembangunan pembangkit, sistem penyaluran tenaga listrik, cadangan dan penyimpanan energi, serta jaringan gas kota.
- e. Penambahan amenities perkotaan (layanan sekunder dan tersier) untuk mendukung aktivitas umum, bekerja, berusaha, dan wisata kota;
- f. Pengembangan sarana pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan olahraga;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 578 -

- g. Penyediaan perumahan sesuai dengan jumlah kebutuhan rumah tangga yang mempertimbangkan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya KPBU IKN untuk:
1. rumah negara/rumah dinas ASN, TNI dan Polri (lanjutan);
 2. rumah masyarakat/tenaga pendukung Ibu Kota Nusantara (komersial maupun swadaya).

Sedangkan pembangunan dan pengembangan lingkungan Ibu Kota Nusantara pada Tahap 2 meliputi:

- a. Pembangunan sistem pintar pemantauan kualitas lingkungan hidup (6 matra PPLH);
- b. Pembangunan sistem pintar peringatan dini multi ancaman bencana (Gempa, Tsunami, Cuaca Ekstrem, dan Kebakaran Lahan dan Hutan);
- c. Pelibatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan lokal, termasuk perempuan dan anak dalam pengelolaan hutan/wanatani;
- d. Program kota hutan:
 1. Rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;
 2. Penambahan penanaman di area pengembangan;
 3. Penambahan penanaman pohon dan vegetasi di area KIPP dan KIKN;
 4. Pembangunan sarana dan prasarana pengamanan hutan;
 5. Pembangunan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan;
 6. Pembangunan koridor satwa (jembatan dan terowongan satwa serta infrastruktur koridor lainnya);
 7. Penciptaan ruang terbuka hijau di area KIPP dan KIKN (hutan kota, taman kota, jalur hijau, dan ruang hijau lainnya);
 8. Pembangunan persemaian skala besar untuk penyediaan bibit dan sistem penyediaan airnya;
 9. Pelibatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan lokal, termasuk perempuan dan anak dalam pengelolaan hutan/wanatani.
 10. Pembangunan Pusat Konservasi Satwa.

Rincian penahapan untuk aspek infrastruktur dan lingkungan di Tahap 2 dapat dilihat pada Tabel 6-10 di bawah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 579 -

Tabel 6-10 Penahapan Arahana Pemanfaatan Ruang Aspek Infrastruktur dan Lingkungan di Tahap 2 Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2025-2029

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
1.	Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara	Infrastruktur Ketenagalistrikan	Panel surya atap	Pemasangan panel surya atap (penambahan dari panel surya atap pada tahap sebelumnya)	KIPP dan seluruh perkotaan Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan potensi atap gedung untuk dibangun panel surya atap	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	Setiap tahun
			PV Terapung	Pemasangan panel terapung di atas permukaan bendungan (pemanfaatan ruang dan mengurangi potensi evapotranspirasi)	Bendungan Sepaku Semoi dan potensi bendungan lainnya	maksimal 5 persen genangan	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 580 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i> (penambahan dari pembangunan <i>Solar Farm</i> pada tahap sebelumnya)	KIKN	3.632,7 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2029
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i>	KPIKN	2.484,7 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2029
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i>	KPIKN	392,6 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 581 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Cadangan dan Penyimpanan Energi	Pembangkit listrik cadangan dan baterai sebagai penyimpanan untuk menjaga stabilitas jaringan dan meningkatkan keandalan	KIKN dan KPIKN (Tergabung di wilayah <i>solar farm</i>)	15%-20% dari total kapasitas pasokan listrik	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2029
			Gardu Induk 150kV	Pembangunan Gardu Induk	KPIKN	6 Unit	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2029
			Gardu Distribusi 20kV	Pembangunan Gardu Distribusi	KIPP dan Wilayah Ibu Kota Nusantara	842 Unit	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 582 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Jaringan Transmisi dan Distribusi	Pemasangan jaringan transmisi dan distribusi bawah tanah (bila sudah tersedia jaringan utilitas terpadu di lokasi setempat)	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2029
			<i>Smart metering</i>	Pemasangan <i>smart metering</i> yang dapat berkomunikasi dua arah dengan <i>database</i> penyedia listrik	Tersebar di Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	APBN/ Masyarakat Pelanggan	Setiap tahun
		Infrastruktur Gas	Jaringan Gas Kota	Pemasangan jaringan gas kota	KIPP dan Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman yang dibangun	BUMN/Badan Usaha Otorita / Swasta Murni/ KPBU IKN	2025



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 583 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
2.	60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan - Daur Ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Fasilitas Pengomposan	Pengolahan sampah organik	TPST sesuai wilayah layanan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2029
			Fasilitas daur ulang	Terdiri dari berbagai fasilitas untuk mendaur ulang berbagai macam material sampah	TPST sesuai wilayah layanan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2029
		Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan - Pengolahan Sampah Rumah	Fasilitas pengolahan sampah melalui proses termal (<i>Waste to Energy</i>) dan/atau	Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang tidak bisa didaur ulang	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 584 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
		Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	pengolahan sampah menjadi barang (<i>Waste to Product</i>)					
			Lahan Urug Saniter (<i>Sanitary Landfill</i>)	Tempat pemrosesan akhir untuk residu pengolahan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang tidak dapat didaur ulang	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2029
		Infrastruktur sistem pengelolaan limbah bahan	Fasilitas Pengolahan Limbah B3 medis	Pengolahan limbah B3 medis untuk meminimalkan pencemaran lingkungan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 585 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
		berbahaya dan beracun	Fasilitas Pengolahan Limbah Berbahaya (B3)	Pengolahan limbah berbahaya untuk meminimalkan pencemaran lingkungan atau kerusakan saat dibuang dan diolah bersama dalam fasilitas pengolahan dari industri	Infrastruktur Pusat (pusat pengelolaan limbah)	Tergantung dari tipe limbah berbahaya dan perawatannya	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2029
			Lahan Urug B3 (<i>Secure Landfill</i>)	Tempat pembuangan akhir untuk limbah berbahaya untuk mencegah pencemaran lingkungan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 586 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
		Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan	Jaringan pengangkutan sampah melalui <i>pneumatic</i> (<i>Pneumatic Waste Collection System</i> atau PWCS)	Jaringan pengumpul sampah dari bangunan vertikal ke stasiun pengumpulan PWCS	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2029
			Stasiun Pengumpulan PWCS	Tempat pengumpulan sampah dari jaringan PWCS	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2029
			Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	Sarana pengumpulan sampah dari sumber dan pengangkutan sampah ke TPST	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 587 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
3.	100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035	Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	SPALD-T (IPAL-D dan jaringan perpipaan air limbah domestik)	Pengelolaan Air Limbah dengan Sistem Terpusat (<i>off-site</i>) dilengkapi dengan fasilitas pengolahan lumpur	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2029
4.	Permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045	Infrastruktur sumber daya air - sumber air	Pengelolaan infrastruktur penyediaan air baku melalui Operasi dan Pemeliharaan	Operasi dan pemeliharaan Intake Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoi	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN	Setiap tahun
		Infrastruktur sumber daya air - Banjir dan Drainase Perkotaan	Pengelolaan infrastruktur drainase, pengendali banjir dan pengendali sedimen	Lanjutan pembangunan infrastruktur drainase, pengendali banjir dan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 588 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				pengendali sedimen Operasi dan pemeliharaan infrastruktur drainase, pengendali banjir dan pengendali sedimen				
		Infrastruktur air minum untuk KIPP	Jaringan Distribusi	Optimalisasi penyerapan <i>idle capacity</i> IPA yang terbangun pada tahap 1	KIPP	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan serta ketersediaan MUT	APBN/ KPBU IKN	2029
		Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Peremajaan perumahan dan permukiman	Peningkatan kualitas perumahan; penyediaan infrastruktur dasar	KIPP	Perumahan dan permukiman layak untuk masyarakat lokal	APBN	2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 589 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				permukiman; konsolidasi lahan				
			Penyediaan perumahan untuk pekerja konstruksi	Pengalokasian ruang dan lahan; Perencanaan Kawasan;	KIPP	Hunian pekerja konstruksi	APBN	2022
			Penyediaan perumahan baru untuk masyarakat umum	Pengalokasian ruang dan lahan; Penyediaan peraturan spasial; Perencanaan Kawasan; Fasilitas pembiayaan	KIPP	Kawasan percontohan perumahan masyarakat umum yang terintegrasi dengan layanan infrastruktur dasar	Swasta Murni	2024
5.	100% konektivitas digital dan teknologi informasi dan	Pusat Data Pemerintah	Pusat Data	Sebagai Pusat Data guna melayani Sistem Data dan Teknologi Informasi Pemerintah	KIPP	Total 1 unit	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2028



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 590 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	komunikasi (TIK) untuk semua penduduk dan bisnis	Pusat Data Tepi (<i>Edge Data Center</i>)	Pusat Data	Sebagai Pusat Data Tepi guna menunjang Sistem Data dan Teknologi Informasi	KIPP dan Wilayah Ibu Kota Nusantara	Total 2 unit	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2029
		<i>Fixed Broadband</i>	Serat Optik	Penghubung jaringan telekomunikasi	KIPP	2-4 <i>Ring</i> (100, 400 GbE)	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2025
		<i>Mobile Broadband</i>	BTS	Penghubung jaringan telekomunikasi	Jaringan bergerak seluler (Jarbersel) KIPP	100-200 unit	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2025
6.	80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif	Transportasi umum	Bus	Pengembangan layanan angkutan umum bus dan fasilitas pendukung (halte/ <i>shelter</i>)	KIPP, KIKN	Operasional angkutan umum bus dan fasilitas pendukung	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 591 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Fasilitas transit atau perpindahan antar-moda	Pengembangan sistem transit dan/atau TOD	KIPP, KIKN	Operasional sistem transit dan/atau TOD	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2029
		Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda	Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda	Pembangunan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda di KIPP dan sebagian di KIKN	KIPP, KIKN	Operasional sebagian fasilitas pejalan kaki dan pesepeda	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2029
7.	10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	Infrastruktur Jalan	Penyelesaian Jalan di KIPP dan sebagian Jalan di KIKN	Pembangunan jalan kolektor sekunder secara bertahap	KIPP, KIKN	Operasional jalan akses utama KIPP dan sebagian jalan di KIKN	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2029
			Penyelesaian jalan lokal sekunder di KIPP dan sebagian jalan lokal di KIKN	Pembangunan jalan lokal sekunder secara bertahap	KIPP, KIKN	Operasional sebagian jalan lokal sekunder	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 592 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
8.	<50 menit Koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara strategis pada tahun 2030	Transportasi umum	Bus	Pengembangan layanan angkutan umum bus koridor Bandara Balikpapan - KIPP	Balikpapan, KIKN	Operasional angkutan umum bus koridor Balikpapan KIPP	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2025
			Kereta Api	Tahap pengembangan jalur KA akses Bandara Balikpapan - KIPP	Balikpapan, KIKN	Penyiapan jalur KA Akses Bandara Balikpapan- KIPP	APBN/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2029
		Infrastruktur Jalan	Penyelesaian Jalan Bebas Hambatan akses ke KIPP	Lanjutan pembangunan jalan bebas hambatan koridor Balikpapan - KIPP	Balikpapan, KIKN	Operasional jalan bebas hambatan koridor Balikpapan - KIPP	APBN/KPBU IKN/BUMN/ Badan Usaha Otorita	2029
			Penyelesaian Jalan Akses menuju KIPP	Peningkatan jalan eksisting akses menuju KIPP secara bertahap	KIPP, KIKN, KPIKN dan di luar KPIKN	Operasional jalan akses menuju KIPP	APBN/KPBU IKN/BUMN/ Badan Usaha Otorita	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 593 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
9.	>75% dari 256.142 hektare area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)	Konservasi dan Restorasi Hutan	Pengurangan deforestasi	Moratorium dan/atau pencabutan izin tambang dan sawit dalam kawasan hutan dan lindung	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Seluruh izin tambang batubara dan kebun sawit dalam kawasan hutan	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
				Penyelesaian penguasaan dan/atau tenurial kawasan hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	30.0000 hektare	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	setiap tahun
			Perlindungan hutan	Pemenuhan sarana dan prasarana pengamanan hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	7 paket unit pengamanan hutan	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/	setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 594 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
							Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
				Pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	7 paket unit pengendalian kebakaran hutan	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	setiap tahun
				Patroli dan penegakan hukum pidana kehutanan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tergantung ancaman dan kejadian	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 595 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Patroli dan pemadaman kebakaran hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tergantung kerawanan kebakaran	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	setiap tahun
			Konservasi keanekaragaman hayati	Perlindungan koridor satwa alami	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Koridor Samboja Koridor KIKN	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	setiap tahun
				Perlindungan koridor satwa buatan (jembatan atau terowongan)	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Di lokasi pembangunan infrastruktur	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/	setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 596 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
							Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
				Konservasi eksitu keanekaragaman hayati	Wilayah Ibu Kota Nusantara	BOSF Samboja, Yayasan Jejak Pulang, PSO Arsari	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	setiap tahun
				Pembangunan Pusat Penyelamatan Satwa terpadu	Wilayah Ibu Kota Nusantara	1 unit Pusat Penyelamatan Satwa Terpadu	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 597 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Inventarisasi dan monitoring tanaman dan satwa liar	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	setiap tahun
			Pengelolaan hutan/wanatani berkelanjutan	Pembangunan Pusat Kendali Pengelolaan Kota Hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	1 kompleks bangunan dan perangkat teknologi	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2029
				Pegembangan bisnis kehutanan dari jasa ekosistem dan hasil	Wilayah Ibu Kota Nusantara	3 bisnis kehutanan (karbon, wisata alam, HHBK)	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/	setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 598 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				hutan bukan kayu (HHBK)			Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
			Restorasi hutan	Pembangunan persemaian skala besar	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Satu persemaian di Mentawir	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2029
				Rehabilitasi dan/atau penanaman pohon	Wilayah Ibu Kota Nusantara	15.000 hektare	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 599 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Reklamasi dan/atau pemanfaatan lahan bekas tambang dan kebun sawit	Wilayah Ibu Kota Nusantara	1.000 hektare/tahun	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
				Pembangunan ruang terbuka hijau (rimba kota, taman, dan lain-lain)	KIPP	3.000 hektare	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 600 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Integrasi konservasi hutan dalam tata ruang	Penetapan kawasan dilindungi berdasarkan nilai keanekaragaman hayati dan karbon stok	Wilayah Ibu Kota Nusantara	159.180 hektare	APBN	Setiap tahun
		Infrastruktur sumber daya air -Konservasi air penerapan prinsip kota spons	Pengelolaan kolam retensi dan embung multiguna	Lanjutan pembangunan kolam-kolam tampungan air yang memiliki multifungsi untuk penyediaan air, pengendalian banjir, konservasi air, vista kota, serta mengurangi <i>urban heat</i>	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 601 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
		Produksi makanan sehat dan organik	Area pertanian regeneratif pangan	1. Pertanian konservasi, pertanian regeneratif, dan rendah karbon; 2. Peningkatan kapasitas bagi petani lokal; 3. Pengembangan perikanan dan peningkatan kapasitas bagi nelayan/pembu didaya ikan lokal	KPIKN	±35.000 hektare (memenuhi >10% lahan untuk pemenuhan pangan sebesar ±25.000 hektare	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 602 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) dengan teknologi pertanian konservasi dan permakultur	Pengembangan KSPP dengan teknologi pertanian konservasi dan permakultur	KPIKN	± >14.000 hektare ; dengan asumsi dasar: (i) kebutuhan minimal sawah; (ii) pemenuhan pangan tahun 2029-2030 untuk 1,2 juta orang; (iii) konsumsi beras 111 kg/kapita/tahun; (iv) produktivitas 5 ton/hektare dengan 2 kali tanam)	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	Setiap tahun
10	100 persen penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional,	Infrastruktur SDA - Konservasi air penerapan prinsip kota spons	Penerapan Zero Delta Q	Fasilitas pemanenan maupun peresapan air hujan yang diterapkan di gedung-gedung dan bangunan- bangunan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	50% ketaatan pemilik gedung dan bangunan dalam penerapan zero delta Q	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 603 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	komersial, dan hunian							
11	Net zero emission untuk Ibu Kota Nusantara di 2045 di kawasan 256.142 hektare	Penggunaan Lahan	Perkebunan kelapa sawit dengan lanskap agroforestri	Rehabilitasi perkebunan kelapa sawit dengan lanskap agroforestri	KPIKN	Seluruh luasan lahan	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita	Setiap tahun
		Transportasi umum	Bus	Penerapan moda transportasi umum berbasis listrik serta fasilitas pendukung (<i>charging facility</i>)	KIKN	Operasional bus berbasis listrik	APBN/KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2029
12	100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang	Kawasan Permukiman	Pengembangan kawasan permukiman yang sudah ada	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman saat ini dan pengembangan kawasan permukiman baru (jika diperlukan)	KIKN	Kualitas permukiman yang meningkat	APBN/ Swasta Murni	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 604 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	responsif gender dan inklusif			secara bertahap termasuk penyediaan fasum fasos				
		Infrastruktur KIKN	Penataan Ruang KIKN	Penetapan Rencana Tata Ruang	KIKN	56.920 hektare	APBN	
			Pembangunan KIKN	Pembangunan KIKN secara bertahap termasuk penyediaan fasum fasos	KIKN	56.920 hektare	APBN/KPBU IKN/BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	
13	Ranking 10 besar kota paling layak huni di dunia pada tahun 2045	Lingkungan Hidup	Pembangunan sistem pintar pemantauan kualitas lingkungan hidup	Pembangunan lanjutan sistem, pusat kendali, dan infrastruktur, serta pemasangan peralatan pendukung untuk	KIKN dan KPIKN	Pusat kendali, sistem terpadu, jaringan telekomunikasi/internet, alat pemantauan, fasilitas pendukung lainnya	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 605 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				pemantauan kualitas lingkungan hidup				
		Penanganan Bencana	Pembangunan sistem pintar peringatan dini multi-ancaman bencana	Pembangunan lanjutan pusat kendali, sistem dan infrastruktur, serta pemasangan peralatan pendukung untuk sistem peringatan dini multi ancaman bencana	KIKN dan KPIKN	Pusat kendali, sistem terpadu, jaringan telekomunikasi/internet, alat pemantauan, fasilitas pendukung lainnya	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2029



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 606 -

6.2.2.3 Pembangunan Industri dan Pusat Ekonomi

Pada Tahap 2 (dan dilanjutkan pada Tahap 3), rencana pembangunan ekonomi yang dikembangkan meliputi 6 klaster industri dan 2 klaster pemampu yang terdiri atas:

- a. Pengembangan klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan yang akan berfokus untuk meningkatkan daya tarik bagi perusahaan dan pelaku industri untuk berinvestasi dan mendirikan basis penelitian dan pengembangan di Ibu Kota Nusantara, dan fasilitas pengolahan di Daerah Mitra/penunjang dalam rangka hilirisasi sumber daya lokal yang diarahkan untuk menghasilkan produk baru bernilai tambah tinggi;
- b. Pengembangan klaster industri masa depan yang berbasis energi terbarukan yang berfokus untuk meningkatkan daya tarik bagi industri pelopor baik badan usaha milik negara (BUMN/Badan Usaha Otorita), swasta dalam negeri maupun perusahaan internasional untuk berinvestasi dan membangun basis penelitian dan pengembangan di Ibu Kota Nusantara dan pabrik perakitan solar panel dan kendaraan listrik roda dua di Daerah Mitra/penunjang untuk melayani permintaan di Ibu Kota Nusantara dan Kawasan Timur Indonesia;
- c. Pengembangan klaster farmasi terintegrasi yang difokuskan pada pengembangan basis penelitian dan pengembangan di Ibu Kota Nusantara dan fasilitas produksi di Daerah Mitra/penunjang untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku obat dan produk farmasi maju;
- d. Pengembangan klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif yang difokuskan untuk mengembangkan destinasi wisata di kawasan pesisir, taman margasatwa, dan perkotaan yang terintegrasi dengan gaya hidup dan kesehatan;
- e. Pengembangan klaster industri kimia maju dan turunannya yang difokuskan pada pengembangan basis penelitian dan pengembangan di Ibu Kota Nusantara dan penggalan potensi untuk pembangunan pabrik petrokimia baru di Daerah Mitra yang direncanakan akan mulai berproduksi pada tahun 2030 dengan tetap memantau penawaran-permintaan global di semua kategori produk kimia;
- f. Pengembangan klaster energi rendah karbon yang difokuskan pada pengembangan basis penelitian dan pengembangan di Ibu Kota Nusantara, perluasan kegiatan hulu (produksi energi), penarikan investasi untuk kegiatan eksplorasi, serta pemanfaatan teknologi *enhanced oil recovery* (EOR) untuk peningkatan produksi dari ladang minyak tua, serta pengembangan *biofuel*;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 607 -

- g. Pengembangan kota cerdas dan pusat digital yang dimulai dengan pengembangan konsep industri 4.0 untuk berbagai sektor yang ada di Ibu Kota Nusantara dan wilayah penunjang di Kalimantan Timur; serta
- h. Pengembangan pendidikan abad ke-21 difokuskan pada peningkatan kualitas pada sekolah menengah, sekolah kejuruan, dan perguruan tinggi sesuai kebutuhan pengembangan strategi talenta pada klaster-klaster ekonomi yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 608 -

Tabel 6-10 Penahapan Arahkan Pemanfaatan Ruang Aspek Industri dan Pusat Ekonomi di Tahap 2 Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2025-2029

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
1.	Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita negara (setara ekonomi) berpendapatan tinggi	Infrastruktur Kawasan Industri dan pusat ekonomi	Perencanaan	1. Penyusunan dan/atau pemutakhiran Masterplan Kawasan dan/atau <i>site plan</i> 2. Penyusunan <i>Feasibility Study</i>	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di wilayah Kalimantan Timur lainnya	Paket dokumen per indikasi program per lokasi	APBN/ APBD/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2025
			Perizinan	1. Penyusunan dan/atau pemutakhiran dokumen Izin Lingkungan		Paket dokumen per indikasi program per lokasi	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2025



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 609 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				2. Proses pengajuan baru dan/atau perpanjangan perizinan lahan 3. Proses pengajuan baru dan/atau perpanjangan Izin Usaha				
			Tata Ruang dan Wilayah	1. Revisi RTRW 2. Penetapan dan/atau revisi RDTR		Paket dokumen per indikasi program per lokasi	APBN/ APBD	2025



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 610 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Infrastruktur Dalam Kawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan Lahan Kawasan Industri dan Penetapan Lokasi2. Pematangan Lahan Kawasan3. Pembangunan infrastruktur dasar dalam kawasan (air baku, jalan, sistem drainase dan air limbah, energi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan lainnya	KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), dan Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur),	<ol style="list-style-type: none">1. Paket kegiatan per lokasi2. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	Swasta Murni / KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ APBD/ APBN	2027



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 611 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Infrastruktur pemampu (<i>enabler</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan pusat dan infrastruktur digital2. Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan vokasi, dan perguruan tinggi3. Penyusunan kebijakan dan penerapan konsep kota cerdas dan industri 4.0	Wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara	<ol style="list-style-type: none">1. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program sesuai kebutuhan2. Paket kebijakan per indikasi program per klaster ekonomi sesuai kebutuhan	APBN/ APBD/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2027



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 612 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Konektivitas Luar Kawasan	1. Pembangunan dan/ atau peningkatan jalan mendukung akses menuju kawasan industri 2. Pembangunan Pelabuhan mendukung Kawasan Industri	KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di wilayah	Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/ APBD/ KPBUIKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2027



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 613 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Infrastruktur Penunjang Luar Kawasan	1. Pengadaan Lahan untuk pengembangan infrastruktur penunjang luar Kawasan 2. Pembangunan infrastruktur penunjang lainnya (termasuk pengembangan Pelabuhan Kariangau dan Semayang serta Bandara Sepinggang)	Kalimantan Timur lainnya	1. Paket kegiatan per lokasi 2. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/ APBD/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2027



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 614 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Peningkatan Investasi	Fasilitasi Investasi 1. Pameran/ <i>Roadshow</i> Investasi 2. Penyusunan dan/atau pemutakhiran profil Investasi 3. Pendampingan Investasi 4. Investasi Pembangunan Fasilitas Produksi	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di Kalimantan Timur lainnya	Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN	2025
			Promosi Ekspor	1. Penyelesaian Hambatan Perdagangan dengan Negara Mitra		Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/APBD/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2025



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 615 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				2. Simplifikasi Regulasi Ekspor 3. Perumusan Insentif Fiskal mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 616 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Kemitraan Usaha	1. Pengembangan Rantai Pasok UMKM 2. Fasilitasi Produksi UMKM 3. Logistik UMKM 4. Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Mikro dan Besar			APBN/APBD/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2025



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 617 -

			Penyediaan SDM	<ol style="list-style-type: none">1. Pelatihan SDM2. Riset permintaan pasar (<i>market demand analysis</i>) dan analisis kebutuhan pelatihan (<i>training needs analysis</i>)3. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja (<i>manpower planning</i>)4. Pembangunan layanan informasi pasar kerja5. Pengembangan konsep afirmasi pelibatan tenaga kerja lokal6. Pembangunan konsep afirmasi pelibatan tenaga kerja pasangan		Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2025
--	--	--	----------------	--	--	---	---	------



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 618 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				ASN yang non-ASN				
			Harmonisasi Regulasi	1. Kebijakan Rantai Pasok Hulu Hilir 2. Perumusan Insentif Fiskal mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan, dan Non Fiskal		Paket kebijakan per indikasi program per klaster ekonomi sesuai kebutuhan	APBN/ APBD	2025

Catatan:

- Rencana indikasi program Infrastruktur pemampu (*enabler*) dijabarkan dalam penahapan Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia serta Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan.
- Paket kegiatan pembangunan infrastruktur dan penyiapan SDM terbuka untuk dilaksanakan melalui investasi swasta/BUMN/Badan Usaha Otorita atau dukungan pemerintah, atau kerja sama antara swasta, BUMN/Badan Usaha Otorita dan pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 619 -

6.2.2.4 Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Pada Tahap 2, yaitu periode 2025 - 2029, pembangunan simbol dan sistem yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 6-11 Penahapan Pembangunan Simbol dan Sistem Pertahanan dan Keamanan
Ibu Kota Nusantara di Tahap 2 Tahun 2025-2029

	Sistem dan Strategi Pertahanan	Sistem dan Strategi Keamanan Cerdas	Sistem dan Strategi Keamanan Siber	Sistem dan Strategi Keamanan Laut	Dukungan Intelijen Negara
Simbol	Gedung Kementerian Pertahanan di KIPP (lanjutan)	-	Kantor BSSN	Kantor Bakamla	-
Sistem	a) Mabes TNI (lanjutan); b) Paspampres (lanjutan) c) Mabes TNI AD d) Mabes TNI AL e) Mabes TNI AU f) Koramil KIKN g) Kogartap IKN h) Yonif A i) Yonif C j) Yonarmed k) Yonarhanud B l) Pasmars Sepaku m) Pasmars dan Kodamar Samboja n) Lanud (KPIKN), Wing Udara, Skadron 17 45 9,	a) Pemenuhan peralatan yang mendukung keamanan cerdas di KIPP b) Brimob Resimen IV Yon C c) Mabes Polri. Mabes Polri akan menampung berbagai satuan kerja Polri yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok maupun pendukungnya. Unsur tersebut terdiri dari Baintelkam, Baharkam, Bareskrim, Puslabfor, Korlantas, Densus 88 AT, Divisi TIK, Lemdiklat,	a) <i>Special Security Operation Center</i> IKN b) Pusat Rekam Cadang Data Strategis Nasional c) CSIRT Khusus IKN d) <i>Secure Government Intra Network</i>	a) Pangkalan Pengamanan Laut Ibukota dengan faslabuh/dermaga sandar b) Gedung Kantor pendukung operasional pelabuhan c) Pusat Kendali Informasi <i>Virtual Maritime Gate</i> d) Modul Sistem <i>Ground Data Terminal</i> e) Modul Sistem deteksi dini terapung yang berada di Selat Makassar	a) Pembangunan Mabes BIN di KIKN hingga 100 persen b) Pembangunan STIN c) Pembangunan PUSDIKLAT BIN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 620 -

	Sistem dan Strategi Pertahanan	Sistem dan Strategi Keamanan Cerdas	Sistem dan Strategi Keamanan Siber	Sistem dan Strategi Keamanan Laut	Dukungan Intelijen Negara
	Skadron Jet Tanker, Skatek o) Kosek IKN, Satrudal Jauh-Sedang, Sat Anti Drone Taktis-Strategis p) Resimen Arhanud, q) Yonko 467 r) Yonzipur	Divisi Hubinter, Slog, Gedung Arsip d) Rumah Sakit Bhayangkara di KIKN e) Pusedokkes Polri di KIKN f) Polres KIKN g) Polsek KIKN h) Gedung Pusat Pelayanan Kepolisian Terpadu KIKN i) Domat Slog j) Brimob Resimen IV Yon D k) Pemenuhan peralatan l) Pemenuhan rumah dinas			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 621 -

6.2.3 Pemindahan ASN, Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik, Pelayanan Publik Bagi PNA dan OI, serta TNI dan Polri

6.2.3.1 Pemindahan ASN dan Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik

Pemindahan ASN dan pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik, ke Ibu Kota Nusantara di tahapan kedua akan terbagi dalam dua alternatif sebagai berikut:

a. Alternatif Pertama

Alternatif kesatu berupaya memfokuskan pemindahan ASN dan pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik, di Tahap 2 pada kementerian/lembaga klaster II, III, IV, dan V dengan komposisi pemindahan dari **39 kementerian/lembaga** dengan masing-masing kementerian/lembaga memindahkan pegawainya secara **keseluruhan (100 persen)**, sebagai berikut:

Gambar 6-3 Rincian kementerian/lembaga yang Dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara pada Tahap II - Alternatif Kesatu

Klaster II (100%)

1. Kementerian yang mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar, pembangunan manusia, dan kebudayaan (Kemenag, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemensos)

Klaster III (100%)

1. Kementerian yang mendukung pengembangan ekonomi dan investasi (Kemendag, Kemenperin, Kemenkop-UKM, Kemenaker, Kementan, KemenESDM, KKP, Kemenparekraf/Baparekraf, Kemenirves/BKPM)

Klaster IV (100%)

1. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) (BPS, BKN, LAN, BKKB, BNN, BNPB, BNPT, Basarnas, BIG, Bakamla, Lemhannas, LKPP, BRIN, BPOM)

Klaster V (100%)

1. Lembaga Non Struktural (LNS) (KPU, Bawaslu, Wantannas, DKPP, PPATK, ORI, KASN, BPIP, BNPP, KIP, KKIP)

b. Alternatif Kedua

Alternatif kedua berupaya memfokuskan pemindahan ASN dan pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik, di Tahap 2 pada kementerian/lembaga klaster I, II, III, IV, dan V dengan komposisi pemindahan dari **86 kementerian/lembaga** dengan masing-masing kementerian/lembaga memindahkan pegawainya secara **sebagian (± 50 persen)** melanjutkan proses pemindahan yang telah sebagian sisanya dilakukan di tahapan pertama, terkecuali pada kementerian/lembaga klaster V yang dipindahkan secara keseluruhan (100 persen) di tahapan ini, sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 622 -

Gambar 6-4 Rincian Kementerian/Lembaga yang Dipindahkan ke I
pada Tahap II – Alternatif Kedua

Klaster I (50%)

1. Lembaga Tinggi Negara (MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK)
2. Kementerian Koordinator (Kemenko Ekon, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemenko Marves)
3. Kementerian *'Triumvirat'* (Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan), sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945)
4. K/L yang mendukung kerja Presiden-Wakil Presiden secara langsung (Kemensekneg, Setkab, KSP, Wantimpres)
5. K/L yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan (KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, KemenPANRB, BPKP)
6. Kementerian yang mendukung penyediaan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (Kemenkominfo, KemenPUPR, KemenATR/BPN)
7. Alat Pertahanan dan Keamanan dan K/L yang mendukung penegakan hukum (Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polri, Paspampres, BIN, BSSN, Kejagung, Kemenkumham, KPK)
8. Lembaga Negara Independen dan Badan Publik (BI, OJK, LPS, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan)

Klaster II (50%)

1. Kementerian yang mendukung pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara (Kemenhub, KLHK, KemenBUMN)
2. Kementerian yang mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar, pembangunan manusia, dan kebudayaan (Kemenag, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemensos, Kemendes-PDPT, KemenPPPA, Kemenpora)

Klaster III (50%)

1. Kementerian yang mendukung pengembangan ekonomi dan investasi (Kemendag, Kemenperin, Kemenkop-UKM, Kemenaker, Kementan, KemenESDM, KKP, Kemenparekraf/Baparekraf, Kemenrinvet/BKPM)

Klaster IV (50%)

1. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) (BPS, BKN, LAN, BKKBN, BNN, BNPB, BNPT, Basarnas, BIG, Bakamla, Lemhannas, LKPP, BRIN, BPOM)

Klaster V (100%)

1. Lembaga Non Struktural (LNS) (KPU, Bawaslu, Wantannas, DKPP, PPATK, ORI, KASN, BPIP, BNPP, KIP, KKIP)

Seiring dengan selesainya proses pemindahan di Tahap 2 ini, penyelenggaraan pemerintahan pusat di Ibu Kota Nusantara dapat mencapai tingkat yang optimal mendukung visi Ibu Kota Nusantara sebagai 'Kota Dunia untuk Semua'. Sementara itu, pemindahan Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik akan berlanjut sampai dengan tahun 2045 secara independen dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing Lembaga Negara Independen/Badan Publik.

Dalam upaya pemindahan sejumlah ASN dan pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik tersebut, diperlukan akselrasi pembangunan dukungan teknis infrastruktur perkantoran pemerintahan dan hunian yang perlu disediakan guna mendukung operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan pusat di Ibu Kota Nusantara, sebagaimana terlampir dalam Tabel 6-12:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 623 -

Tabel 6-12 Arahana Pemanfaatan Ruang terkait Pemindahan ASN dan Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik, di Tahap 2 Tahun 2025-2029

Komponen	Jenis/Komponen Infrastruktur	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
Pemindahan ASN dan pegawai Lembaga Negara Independen/ Badan Publik, ke Ibu Kota Nusantara	Bangunan Negara, Bangunan gedung dan infrastruktur dasar Bangunan Rumah	Perkantoran Pemerintahan	Akselerasi pembangunan Kompleks Kepresidenan, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, dan Kantor Sekretariat Kabinet	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) – WP IA	Kompleks Kepresidenan, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, dan Kantor Sekretariat Kabinet	APBN	2029
			Akselerasi pembangunan perkantoran Lembaga Tinggi Negara secara bertahap dalam bentuk kantor masing-masing (Kompleks Parlemen (MPR RI-DPR RI-DPD RI), BPK RI, MA RI, MK RI, KY RI)	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) – WP IA	Gedung perkantoran Lembaga Tinggi Negara	APBN	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 624 -

			Akselerasi pembangunan perkantoran pemerintahan sesuai dengan K/L secara bertahap dalam bentuk kantor masing-masing K/L	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) – WP IA	Gedung perkantoran K/L	APBN/KPBU IKN/ BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2029
			Akselerasi pembangunan perkantoran Lembaga negara yang diamanatkan peraturan berkantor di Ibu Kota Negara. (BI, OJK, LPS, BPJS)	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan/atau KIKN	Gedung perkantoran Lembaga Negara	Pendanaan secara mandiri	2029
			Pembangunan fasilitas khusus perkantoran pemerintahan	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) – WP IA	Fasilitas perkantoran pemerintahan	APBN/KPBU IKN/ BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif	2029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 625 -

						(creative financing)	
		Rumah Negara/ Rumah Dinas	Akselerasi pembangunan hunian sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan: Rumah Tapak: 1. Menteri/Kepala Lembaga(580 m ²) 2. Pejabat Negara (490 m ²) 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (390 m ²) Rumah Susun: 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (290 m ²) 2. Pejabat Administrator/Koordinator (190 m ²) 3. Pejabat Fungsional (98 m ²)	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)-WP 1, WP 2, WP 4, dan WP 5	Hunian Rumah Negara/ Rumah Dinas sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan	KPBU IKN/ BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (creative financing)/ Pendanaan secara mandiri/ APBN	2029



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 626 -

Di tahapan kedua ini, diberikan pemberian fasilitas (*benefit*) pemindahan ASN, yang meliputi:

- a. Biaya pindah ASN dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur terkait Standar Biaya Masukan. Komponen biaya pindah adalah sebagai berikut:
 1. Uang harian;
 2. Biaya barang pindahan;
 3. Biaya transportasi;
 4. Biaya tunggu.

Pemberian biaya pindah ASN ini diberikan kepada ASN beserta anggota keluarga ASN (meliputi 1 orang pasangan, 2 orang anak, dan 1 orang Asisten Rumah Tangga (ART) dari tiap ASN yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara).

- b. ASN yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara juga berhak memperoleh tunjangan kemahalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.2.3.2 Pemindahan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi PNA dan OI

Pada Tahap 2, yaitu periode 2025-2029, proses transisi pelayanan publik bagi PNA dan OI mulai diujicobakan secara parsial di Ibu kota Nusantara, dan tetap menjalankan operasional pelayanan publik di Jakarta mengingat sebagian besar PNA dan OI masih berada di Jakarta. Pada tahapan ini diharapkan sudah terdapat minat dan komitmen PNA akan membangun kantor perwakilan di komplek diplomatik dan OI di Ibu Kota Nusantara. Selain itu berbagai pendekatan promosi dan kerja sama internasional melalui forum bilateral, regional dan global terus diupayakan guna menunjang tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

6.2.3.3 Pemindahan TNI dan Polri

Jumlah personil bidang Pertahanan dan Keamanan yang akan dipindahkan pada Tahap 2 berjumlah 37.349 orang. Berikut merupakan rincian jumlah dari masing-masing kementerian/lembaga:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 627 -

Tabel 6-13 Jumlah pemindahan personil bidang pertahanan dan keamanan
pada Tahap 2

KEMENTERIAN/LEMBAGA	TAHAP 2
Kementerian Pertahanan	4.637
TNI	4.364
TNI AD	7.730
TNI AL	4.873
TNI AU	2.332
Paspampres	424
Polri	11.054
BIN	498
BSSN	1.212
BAKAMLA	495
Total	37.349

6.3 TAHAP 3: PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2030-2034

Tahap 3 pembangunan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan pada tahun 2030-2034. Pada tahap ini, diperkirakan jumlah penduduk Ibu Kota Nusantara mencapai sekitar 1,45 juta jiwa, dengan pemindahan lanjutan tambahan TNI/Polri. Selain lanjutan pemindahan TNI/Polri yang masih terus dilakukan, fokus pengembangan kawasan semakin progresif pada pengembangan kawasan-kawasan lain selain KIPP, serta kawasan industri dan sektor-sektor lainnya dalam klaster ekonomi superhub.

Adapun proyeksi jumlah populasi Ibu Kota Nusantara pada Tahap 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 6-14 Proyeksi Jumlah Populasi Ibu Kota Nusantara
Sampai Dengan Tahap 3 (Tahun 2030-2034)

No	Populasi	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Jumlah Tenaga Kerja					421.577
1.1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 628 -

No	Populasi	2030	2031	2032	2033	2034
1.2	Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla					66.906
1.3	Pegawai Lembaga Negara Independen/ Badan Publik					856
1.4	Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	58.428	59.862	61.296	62.730	66.105
1.5	Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	148.526	152.090	155.654	159.218	163.809
1.6	Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan Ibu Kota Nusantara	20.450	21.307	22.164	23.021	23.878
2.	Populasi Tanggungan/Dependen					867.167
2.1	Anggota Keluarga ASN	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092
2.2	Anggota Keluarga Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla					187.337
2.3	Anggota Keluarga Pegawai Lembaga Negara Independen/ Badan Publik					3.425
2.4	Mahasiswa	7.401	8.141	9.118	10.395	12.162
2.5	Keluarga Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	60.813	62.305	63.798	65.290	68.803
2.6	Keluarga Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	154.588	158.298	162.007	165.717	170.495
2.7	Keluarga Tenaga Kerja Konstruksi pada masa Pembangunan Ibu Kota Nusantara	21.285	22.177	23.069	23.961	24.853



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 629 -

No	Populasi	2030	2031	2032	2033	2034
3.	Jumlah Penduduk Eksisting yang berada dalam delineasi Ibu Kota Nusantara	160.529	161.445	162.366	163.292	164.223
	TOTAL POPULASI					1.452.967

Catatan :

- pemindahan ASN diproyeksikan selesai pada Tahap 2.
- proyeksi tenaga kerja konstruksi merupakan angka sementara berdasarkan data historis di luar perhitungan investasi sektor konstruksi.
- proyeksi Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik beserta keluarga baru mencakup data pegawai Bank Indonesia.

Pada Tahap 3, pengembangan kawasan akan difokuskan pada KIPP tahap 1B Sub-BWP I, sebagian tahap 2A sub-BWP II; Kawasan Ibu Kota Nusantara Barat; dan Kawasan Ibu Kota Nusantara Timur. Pembangunan pada Tahap 3 akan difokuskan kepada zona *mixed-use* dengan sejumlah tipologi, meliputi (1) Perluasan Kawasan Perkantoran Pemerintahan Pusat (Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Eksaminatif) dengan penerapan *smart government*; (2) Perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri; serta (3) Perluasan Kawasan bisnis dan ekonomi pendukung termasuk pengembangan hotel bisnis, *Eco resort* dan MICE; (4) Perluasan Kluster Industri (termasuk Industri 4.0 *center of excellence*); (5) Perluasan riset dan pengembangan talenta serta Universitas unggulan; (6) Perluasan rumah sakit internasional; (7) Perluasan Kawasan Industri di Daerah Mitra. Pengembangan kawasan zona *mixed-use* tersebut didukung dengan menjaga ruang terbuka hijau, serta pengembangan infrastruktur transportasi, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Dalam rangka mendukung pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara pada tahap ketiga, maka diperlukan langkah persiapan, pembangunan dan pemindahan dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

6.3.1 Persiapan

Penyediaan tanah pada Tahap 3 dapat dilakukan melalui pelepasan kawasan hutan maupun pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah langsung. Sementara itu, pada wilayah yang telah ada pemilikan dan penguasaan masyarakat, apabila dilakukan melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun DPPT dan menganggarkan biaya pembebasan lahan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 630 -

Pada Tahap 3, diperkirakan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara telah selesai dilakukan pada akhir Tahap 2, sehingga untuk mendukung persiapan pembangunan pada Tahap 3 akan terus dilanjutkan sosialisasi secara lebih luas ke berbagai pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sosialisasi ini tidak hanya mencakup masyarakat lokal dan calon penduduk pendatang di Ibu Kota Nusantara serta PNA dan OI, namun juga terhadap berbagai investor potensial yang akan berperan dalam pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara.

6.3.2 Pembangunan

6.3.2.1 Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia

Sebagai langkah lanjutan untuk melakukan kegiatan pembangunan sosial Tahap 1 dan 2, rincian pemanfaatan ruang pada aspek sosial dan sumber daya manusia yang dapat dilakukan di Tahap 3 adalah sebagai berikut:

- a. Lanjutan penguatan pelibatan tokoh dan masyarakat adat dan lokal dalam berbagai forum kolaborasi yang merepresentasikan kepentingan bersama serta mendorong penguatan peran dalam berbagai aspek pembangunan.
- b. Lanjutan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti balai adat, pusat kebudayaan, aset yang bernilai sosial dan budaya, rumah ibadah serta sarana ruang terbuka yang didesain secara inklusif, responsif gender, ramah anak, serta sesuai dengan kondisi sosial masyarakat untuk mendorong integrasi masyarakat sekaligus tetap menjaga kearifan lokal.
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong penyediaan fasilitas pendidikan di seluruh tingkatan pendidikan serta penyediaan fasilitas kesehatan secara merata di seluruh wilayah Ibu Kota Nusantara.
- d. Pengembangan kapasitas masyarakat lokal dan penciptaan peluang ekonomi bagi kelompok rentan melalui pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas lembaga pendidikan yang ada untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil sesuai minat investor di klaster-klaster ekonomi.

Adapun arahan pemanfaatan ruang untuk aspek sosial dan sumber daya manusia yang mendukung dapat dilihat pada Tabel 6-15 di bawah ini:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 631 -

Tabel 6-15 Arahana Pemanfaatan Ruang Aspek Sosial di Tahap 3 Tahun 2030-2034

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
1	>75% dari 256.142 hektare area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)	Konservasi dan Restorasi hutan dan lahan	Pelibatan tokoh dan masyarakat dalam pengaturan lahan dan usaha penghijauan	Inisiasi dan perkuatan lembaga dengan melibatkan masyarakat lokal untuk mengatur masalah terkait lahan dan konservasi hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Forum dengan lembaga dan masyarakat lokal	APBN	Setiap tahun
				Penghijauan area permukiman penduduk sekaligus sosialisasi pentingnya menjaga area hijau	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Sosialisasi terkait penghijauan area	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
2	100% integrasi seluruh penduduk	Ruang Publik, Fasilitas	Diskusi forum sosial dan keagamaan	Pelaksanaan forum diskusi dengan pemangku	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Forum dengan lembaga dan masyarakat adat dan lokal	APBN/ Pembiayaan Kreatif	2030



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 632 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
		Nasional, dan Integrasi Sosial		kepentingan dari komunitas lokal/adat			(creative financing)	
			Aset bernilai sosial dan budaya penting	Pembangunan lanjutan fasilitas sosial dan budaya nasional yang mendukung persatuan bangsa	KIPP	Fasilitas keagamaan dan fasilitas sosial pada tingkat nasional yaitu Rumah Ibadah, Museum Nasional, Galeri, serta Perpustakaan Nasional	APBN	2030
				Lanjutan pengkajian dan pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan melibatkan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan	KIKN	Kajian Lanjutan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayah Ibu Kota Negara	APBN	2030



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 633 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				kebudayaan, serta perguruan tinggi				
3	100% warga dapat menjangkau layanan sosial/masyarakat dalam waktu 10 menit	Infrastruktur Permukiman-Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Aset bernilai sosial dan budaya penting	Pembangunan fasilitas sosial dan budaya di berbagai skala pelayanan di luar pembangunan Tahap 2	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Fasilitas keagamaan dan fasilitas sosial di berbagai skala pelayanan, seperti rumah ibadah, perpustakaan, taman rekreasi, dan ruang terbuka	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2030
			Fasilitas Kesehatan	Penyediaan Posyandu	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Minimal 1 per skala layanan wilayah setara RW	APBN/APBD	2030-2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 634 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Penyediaan Puskesmas	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Minimal 1 puskesmas per skala pelayanan setara kecamatan dapat bertambah dengan memperhatikan pada tingkat kepadatan penduduk	APBN/APBD	2030-2034
				Penyediaan Rumah Sakit Berstandar Internasional	KIPP	Minimal 1 RS Berstandar Internasional	APBN/KPBU IKN	2030-2034
				Penyediaan Rumah Sakit	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Minimal 1 RS	APBN/APBD/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2030-2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 635 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Penyediaan Laboratorium Kesehatan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 Laboratorium terstandar minimal tingkat keamanan hayati (<i>Bio Safety Level/BSL</i>) 3 dan dapat ditingkatkan sampai dengan minimal BSL 4	APBN/APBD/ KPBU IKN/ Swasta murni	2030-2034
				Peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ada	APBN/APBD/ KPBU IKN	2030-2034
			Fasilitas Pendidikan	Pembangunan lanjutan unit sekolah baru dan pengembangan tingkat TK/RA/BA/PAUD	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 TK/RA/BA/PAUD di setiap wilayah setingkat desa/kelurahan atau tersedia minimal 1 TK/RA/BA/PAUD untuk 270 anak usia 3-6 tahun	APBN/ Swasta Murni	2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 636 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Pembangunan lanjutan unit sekolah baru dan pengembangan tingkat SD/MI/SDLB/ Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SD/MI/SDLB/ Sederajat untuk 672 anak usia 7-12 tahun	APBN/ Swasta Murni	2034
				Pembangunan lanjutan unit sekolah baru dan pengembangan tingkat SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat untuk 1.056 anak usia 13-15 tahun	APBN/ Swasta Murni	2034
				Pembangunan lanjutan unit sekolah baru dan pengembangan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SMA/SMK/MA/SMALB/ Sederajat untuk 1.296 anak usia 16-18 tahun	APBN/ Swasta Murni	2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 637 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				tingkat SMA/SMK/MA/ SMALB/Sederajat				
				Pengembangan lanjutan perguruan tinggi unggulan	Wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara	Tercukupinya sarana dan prasarana program studi pada PT unggulan untuk mendapatkan akreditasi internasional	APBN	Setiap tahun
				Pembangunan lanjutan unit Tempat Penitipan Anak/ <i>Day Care</i>	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 TPA/DC di setiap wilayah setingkat desa/ kelurahan atau tersedia minimal 1 TPA/DC untuk 270 anak usia 0 - 12 tahun (sama dengan TK/RA/BA/PAUD)	APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 638 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
4	100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif	Ruang Publik	Balai Adat/ Pusat kebudayaan	Pengembangan balai adat/pusat kebudayaan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Balai adat/pusat kebudayaan pada skala pelayanan setara kecamatan	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2030
				Monitoring pembangunan Balai Adat (akhir tahap 3) agar tetap sejalan dengan prinsip yang telah ditetapkan di awal perencanaan	KIPP	Dokumen evaluasi pembangunan balai adat tahap 1	APBN	2034
		Pembangunan universal	Diskusi forum sosial	Pelibatan secara aktif kelompok kelompok rentan seperti Organisasi Penyandang Disabilitas,	KIKN	Dokumen evaluasi pembangunan fisik dan sosial dari kelompok kelompok rentan	APBN	2030



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 639 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Perempuan, Anak, dan Lansia untuk sama sama mengevaluasi pembangunan fisik dan sosial yang telah dan akan berjalan				
5	10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	Infrastruktur Permukiman- Kohehi dan Inklusi Sosial	Ruang Publik yang aksesibel dan penuh interaksi	Melengkapi ruang ruang publik dan fasilitas transportasi dengan reklame edukatif terkait sosial budaya	KIPP	Reklame edukatif untuk mendukung interaksi	APBN/ KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2031



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 640 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
6	>10% dari lahan 256.142 hektare tersedia untuk kebutuhan produksi pangan	Ketahanan Pangan	Pelibatan masyarakat perkotaan dalam mendorong aspek ketahanan pangan	Penguatan kelompok masyarakat dalam kegiatan pertanian perkotaan (<i>urban farming</i>)	KIKN	Modul sosialisasi dan modul pelatihan bagi masyarakat di kawasan perkotaan dan kelompok pertanian perkotaan	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2030
			Pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam mendorong aspek ketahanan pangan	Penguatan kelompok kelompok tani lokal dengan pelatihan pertanian modern dan bantuan subsidi dan lahan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Modul sosialisasi dan modul pelatihan bagi masyarakat dan kelompok pertanian	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2030
7	60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	Ekonomi Sirkular	Pemanfaatan Sisa Pangan dan Daur Ulang Sampah	Gerakan daur ulang sampah dan pemanfaatan sisa makanan rumahan untuk barang yang	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Terlaksananya gerakan daur ulang sampah dan pemanfaatan sisa makanan rumahan untuk barang yang lebih bernilai	APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2030



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 641 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				lebih bernilai ke berbagai daerah				
				Pembuatan Bank Sampah dengan memberdayakan kelompok masyarakat lokal atas inisiasi perangkat desa	KIKN	Bank Sampah di berbagai daerah pada level pelayanan setingkat desa.	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2031
8	Permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 hektare memiliki akses terhadap	Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman	Pelibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan dan perbaikan lanjutan Infrastruktur Permukiman dan dasar di area	KIKN	Lanjutan operasionalisasi Infrastruktur Permukiman di area permukiman masyarakat	APBN	2031



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 642 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	infrastruktur penting pada 2045			permukiman masyarakat pada daerah yang belum dibangun				
				Pembangunan atau pengembangan <i>smart villages/communities</i>	KIKN	Lanjutan Pengembangan <i>pilot project smart communities</i>	APBN/ KPBUIKN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2031
9	0% kemiskinan pada populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2035	Pengentasan Kemiskinan	Pendataan	Evaluasi 5 tahun pendataan terintegrasi basis data terpadu di Wilayah Ibu Kota Nusantara	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen evaluasi terhadap data masyarakat lokal dan pendatang di Wilayah Ibu Kota Nusantara	APBN	2030
			Rujukan dan Layanan Sosial	Penguatan kapasitas Pemda, Desa, Kelurahan, dan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	DMD/K yang terintegrasi dengan Puskesmas di seluruh Ibu	APBN	2030



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 643 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Masyarakat untuk mengelola dan memberikan rujukan terhadap masalah dan layanan sosial yang dihadapi/ diperlukan penduduk rentan		Kota Nusantara terlaksana dengan kapasitas rujukan pemberdayaan		
			Kemandirian Ekonomi	Pelaksanaan program pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui akses pengelolaan lahan dan kemudahan akses permodalan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Program pemberdayaan masyarakat lokal di Wilayah Ibu Kota Nusantara	APBN	2030
10	Rasio Gini regional	Pengurangan ketimpangan	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan lanjutan untuk peningkatan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Modul pelatihan dan jumlah tenaga kerja	APBN/ Swasta Murni/	2030



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 644 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	terendah di Indonesia pada 2045			kemampuan UMKM dan tenaga kerja lokal melalui BLK yang sudah ada di wilayah terdekat dengan Ibu Kota Negara		lokal yang terlatih yang sesuai dengan bidang dan kebutuhan klaster ekonomi.	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
				Penyaluran tenaga kerja terlatih pada berbagai industri dan kegiatan di wilayah Ibu Kota Nusantara bekerja sama dengan pemerintah daerah dan badan swasta		Tersalurnya tenaga kerja terlatih ke berbagai industri di Wilayah Ibu Kota Negara	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2030



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 704 -

Tabel 6-20 Arahana Pemanfaatan Ruang Aspek Infrastruktur dan Lingkungan di Tahap 4 Tahun 2035-2039

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
1.	Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara	Infrastruktur Ketenagalistrikan	Panel surya atap	Pemasangan panel surya atap (Penambahan dari panel surya atap pada tahap sebelumnya)	KIPP dan seluruh perkotaan Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan potensi atap gedung untuk dibangun panel surya atap	BUMN/Badan Usaha Otorita/Swasta Murni/KPBU IKN	Setiap tahun
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i> (Penambahan dari pembangunan <i>Solar Farm</i> pada tahap sebelumnya)	KIKN	3.632,7 ha (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/Swasta Murni/KPBU IKN	2039
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i> (Penambahan dari pembangunan <i>Solar Farm</i> pada tahap sebelumnya)	KPIKN	2.484,7 ha (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/Swasta Murni/KPBU IKN	2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 705 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i> (Penambahan dari pembangunan <i>Solar Farm</i> pada tahap sebelumnya)	KPIKN	392,6 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2039
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i> (Penambahan dari pembangunan <i>Solar Farm</i> pada tahap sebelumnya)	KPIKN	3.675,3 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2039
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i> (Penambahan dari pembangunan <i>Solar Farm</i> pada tahap sebelumnya)	KPIKN	310,7 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 706 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i>	KIKN	621,6 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2039
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i>	KPIKN	2.607,4 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2039
			Cadangan dan Penyimpanan Energi	Pembangkit listrik cadangan dan baterai sebagai penyimpanan untuk menjaga stabilitas jaringan dan meningkatkan keandalan	KIKN dan KPIKN (Tergabung di wilayah <i>solar farm</i>)	15%-20% dari total kapasitas pasokan listrik	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 707 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Gardu induk terisolasi gas (<i>Gas Insulated Substation/ GIS</i>) 150kV	Pembangunan Gardu Induk	KIPP	1 Unit	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2039
			Gardu Induk 150kV	Pembangunan Gardu Induk	KPIKN	Menyesuaikan dengan penambahan permintaan pasokan listrik	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2039
			Gardu Distribusi 20kV	Pembangunan Gardu Distribusi	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan penambahan permintaan pasokan listrik	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 708 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Jaringan Transmisi dan Distribusi	Pemasangan jaringan transmisi dan distribusi bawah tanah (bila sudah tersedia jaringan utilitas terpadu di lokasi setempat)	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2039
			Gardu Induk 500kV	Pembangunan Gardu Induk dan tapak tower transmisi untuk interkoneksi Sistem Ketenagalistrikan Kalimantan (Pembangunan menyesuaikan dengan penambahan permintaan pasokan listrik)	Wilayah Ibu Kota Nusantara	1 Unit	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 709 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			<i>Smart metering</i>	Pemasangan <i>smart metering</i> yang dapat berkomunikasi dua arah dengan <i>database</i> penyedia listrik	Tersebar di Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	APBN/ Masyarakat Pelanggan	Setiap tahun
		Infrastruktur Gas	Jaringan Gas Kota	Pemasangan jaringan gas kota	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman yang dibangun	BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2035
2.	60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan - Daur Ulang Sampah Rumah Tangga dan	Fasilitas Pengomposan	Pengolahan limbah organik	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 710 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
		Sampah Sejenis Rumah Tangga	Fasilitas daur ulang	Terdiri dari berbagai fasilitas untuk mendaur ulang berbagai macam material	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2039
		Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan - Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Fasilitas pengolahan sampah melalui proses termal (<i>Waste to Energy</i>) dan/atau pengolahan sampah menjadi barang (<i>Waste to Product</i>)	Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang tidak bisa didaur ulang	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 711 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Lahan Urug Saniter (<i>Sanitary Landfill</i>)	Tempat pemrosesan akhir untuk residu pengolahan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang tidak dapat didaur ulang	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2039
		Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan	Jaringan pengangkutan sampah melalui <i>pneumatic Collection System</i> atau PWCS)	Jaringan pengumpul sampah dari bangunan vertikal ke stasiun pengumpulan PWCS	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 712 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Stasiun Pengumpulan PWCS	Tempat pengumpulan sampah dari jaringan PWCS	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2039
			Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	Sarana pengumpulan sampah dari sumber dan pengangkutan sampah ke TPST	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan		APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2039
3.	100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035	Infrastruktur Air Limbah	SPALD-T (IPAL-D dan jaringan perpipaan air limbah domestik)	Pengelolaan Air Limbah dengan Sistem Terpusat (<i>off- site</i>) dilengkapi dengan fasilitas pengolahan lumpur	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 713 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
4.	Permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045	Infrastruktur SDA - Sumber Air	Mempertahankan layanan infrastruktur terbangun	Operasi dan Pemeliharaan Sumber dan Intake Air Baku	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Intake Spekau dan bendungan Sepaku Semoi	APBN/ KPBU IKN	Setiap tahun
		Infrastruktur SDA -Banjir dan Drainase Perkotaan	Pembangunan infrastruktur drainase, pengendali banjir dan pengendali sedimen	1. Lanjutan pembangunan infrastruktur drainase, pengendali banjir dan pengendali sedimen 2. Operasi dan pemeliharaan infrastruktur drainase, pengendali banjir dan pengendali sedimen	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN	2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 714 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
		Infrastruktur Air Minum untuk KIPP	Instalasi Pengolahan Air Minum (1x300)	Fasilitas Pengolahan untuk peningkatan kualitas air minum	Di luar KIPP	Satu kawasan dengan IPA Tahap 1	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2040
			Reservoir pembagi	Penyimpanan air yang akan melayani setiap daerah pengembangan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2040
			Jaringan Distribusi	Pengaliran air minum yang memenuhi air minum aman dan 3K (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas)	KIPP	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan serta ketersediaan MUT	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2040



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 715 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
		Infrastruktur Air Minum untuk KIKN	Instalasi Pengolahan Air Minum	Target kualitas air minum aman	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBK IKN/ Swasta Murni	2039
			Jaringan perpipaan transmisi air minum	Jaringan transmisi air minum dari IPA menuju reservoir	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBK IKN/ Swasta Murni	2039
			Reservoir Induk	Penyimpanan air yang akan melayani setiap daerah pengembangan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/ KPBK IKN/ Swasta Murni	2039
			Jaringan Distribusi	Pengaliran air minum yang memenuhi 3K (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas)	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan MUT	APBN/ KPBK IKN/ Swasta Murni	2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 716 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
5.	100% konektivitas digital dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk semua penduduk dan bisnis	Pusat Data Tepi (<i>Edge Data Center</i>)	Pusat Data	Sebagai Pusat Data Tepi guna menunjang Sistem Data dan Teknologi Informasi	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Total 3 unit	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2039
		<i>Fixed Broadband</i>	Serat Optik	Penghubung jaringan telekomunikasi	KIPP	2-4 Ring (100, 400 GbE)	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2035
		<i>Mobile Broadband</i>	BTS	Penghubung jaringan telekomunikasi	Jarbersel KIPP	100-200 unit	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2035
6.	80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif	Transportasi Umum	Bus	Pengembangan layanan angkutan umum bus dan fasilitas pendukung (halte/ <i>shelter</i>)	KIKN/ KPIKN	Operasional layanan angkutan umum bus dan fasilitas pendukung (halte/ <i>shelter</i>)	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 717 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Fasilitas transit atau perpindahan antar-moda	Sistem transit dan/atau TOD	KIKN/ KPIKN	Operasional sistem transit dan/atau TOD	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2039
			Kereta Api	Penyiapan pengembangan angkutan umum massal berbasis KA di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra sekitarnya	Wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra sekitarnya	Penyiapan angkutan umum massal berbasis KA	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2039
7	10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	Infrastruktur Jalan	Jalan di KIKN	Operasional jaringan Jalan di KIKN dan sekitarnya	KPIKN dan Daerah Mitra sekitarnya	100% jaringan jalan di KIPP dan fasilitas pendukung	APBN/ Swasta Murni	2035



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 718 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
		Infrastruktur Perumahan dan Permukiman*	Penataan lingkungan	Penataan perumahan dan permukiman terintegrasi	KPIKN	100% prasarana/sarana dasar perumahan dan simpul transportasi umum dapat ditempuh <10 menit	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni/ Masyarakat	
8.	100 persen penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian	Infrastruktur SDA - Konservasi air penerapan prinsip kota spons	Penerapan <i>Zero Delta Q</i>	Fasilitas pemanenan maupun peresapan air hujan yang diterapkan di gedung-gedung dan bangunan-bangunan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	100% ketaatan pemilik gedung dan bangunan dalam penerapan <i>zero delta Q</i>	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 719 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
9.	Net zero emission untuk Ibu Kota Nusantara di 2045 di kawasan 256.142 hektare	Transportasi umum	Bus, Kereta Api	Penerapan moda transportasi umum berbasis listrik serta fasilitas pendukung (<i>charging facility</i>)	KIKN dan KPIKN	Operasional moda transportasi umum berbasis listrik	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2039
10.	>75% dari 256.142 hektare area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)	Konservasi dan Restorasi Hutan	Pengurangan deforestasi	Moratorium dan/atau pencabutan izin tambang dan sawit dalam kawasan hutan dan lindung	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Seluruh izin tambang batu bara dan kebun sawit dalam Kawasan hutan	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 720 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Penyelesaian penguasaan kawasan dan/atau tenurial hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	30.000 hektare	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	setiap tahun
			Perlindungan hutan	Patroli dan penegakan hukum pidana kehutanan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tergantung ancaman dan kejadian	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 721 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Patroli dan pemadaman kebakaran hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tergantung kerawanan kebakaran	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	setiap tahun
			Konservasi keanekaragaman hayati	Perlindungan koridor satwa alami	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Koridor Samboja Koridor KIKN	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 722 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Perlindungan koridor satwa buatan (jembatan atau terowongan)	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Di lokasi pembangunan infrastruktur	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	setiap tahun
				Konservasi eksitu keanekaragaman hayati	Wilayah Ibu Kota Nusantara	BOSF Samboja, Yayasan Jejak Pulang, PSO Arsari	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 723 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Inventarisasi dan monitoring tanaman dan satwa liar	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	setiap tahun
			Pengelolaan hutan/wanatani berkelanjutan	Pegembangan bisnis kehutanan dari jasa ekosistem dan HHBK	Wilayah Ibu Kota Nusantara	3 bisnis kehutanan (karbon, wisata alam, HHBK)	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 724 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Restorasi Hutan	Rehabilitasi dan/atau penanaman pohon	Wilayah Ibu Kota Nusantara	15.000 hektare	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
				Reklamasi dan/atau pemanfaatan lahan bekas tambang dan kebun sawit	Wilayah Ibu Kota Nusantara	1.000 hektare /tahun	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 725 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Integrasi konservasi hutan dalam tata ruang	Penetapan kawasan dilindungi berdasarkan nilai keanekaragaman hayati dan karbon stok	Wilayah Ibu Kota Nusantara	159.180 hektare	APBN	Setiap tahun
		Infrastruktur sumber daya air-Konservasi air penerapan prinsip kota spons	Pengelolaan kolam retensi dan embung multiguna	Lanjutan pembangunan kolam-kolam tampungan air yang memiliki multifungsi untuk penyediaan air, pengendalian banjir, konservasi air, vista, serta mengurangi <i>urban heat</i>	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN	2039



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 726 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
		Produksi makanan sehat dan organik	Area Pertanian Regeneratif Pangan	1. Intensifikasi pertanian 2. Peningkatan kapasitas bagi petani lokal	KPIKN	±35.000 hektare (memenuhi >10% lahan untuk pemenuhan pangan sebesar ±25.000 hektare)	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita /Swasta Murni	Setiap tahun
			<i>Urban Farming</i> (Pertanian Perkotaan), Permakultur, Sirkular, dan presisi	Pengembangan <i>urban farming</i>	KIPP	> ±46 hektare (asumsi untuk pemanfaatan <i>green house</i>), permakultur, sirkular, dan presisi	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita /Swasta Murni	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 727 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
11	100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif	Infrastruktur Kawasan Permukiman	Pengembangan kawasan permukiman yang sudah ada	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman saat ini dan pengembangan kawasan permukiman baru (jika diperlukan) secara bertahap termasuk penyediaan fasum fasos	KIKN	Kualitas permukiman yang meningkat	APBN/ KPBUIKN/ BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2034
		Infrastruktur KIKN	Pembangunan KIKN	Pembangunan KIKN secara bertahap termasuk penyediaan fasum fasos	KIKN	56.920 hektare	APBN/ KPBUIKN/ BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 728 -

6.4.2.3 Pembangunan Industri dan Pusat Ekonomi

Pada Tahap 4 (dan dilanjutkan pada Tahap 5), pembangunan ekonomi yang dikembangkan meliputi 6 klaster industri dan 2 klaster pemampu (*enabler*) yang terdiri atas hal berikut:

- a. peningkatan kapasitas dan diversifikasi klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan di Daerah Mitra yang akan berfokus pada peningkatan produksi dan investasi di industri nutrisi;
- b. peningkatan kapasitas klaster industri masa depan yang berbasis energi terbarukan di Daerah Mitra yang akan berfokus pada perluasan kapasitas pabrik perakitan untuk melayani permintaan dalam dan luar negeri, serta didukung penyediaan insentif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengembangan kapabilitas penelitian dan pengembangan, dan investasi baru di bidang suku cadang dan komponen kendaraan listrik roda dua dan panel surya;
- c. penguatan klaster farmasi terintegrasi di Daerah Mitra yang akan difokuskan untuk meningkatkan produksi bahan baku obat di dalam negeri, inovasi produk farmasi baru berbasis bahan kimia, produksi vaksin di dalam negeri, dan perluasan pasar ekspor;
- d. penguatan daya saing produk dan layanan klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif, responsif gender, dan ramah anak;
- e. peningkatan kapasitas klaster industri kimia maju dan turunannya di Daerah Mitra yang akan difokuskan untuk meningkatkan investasi di produk kimia khusus, memperluas penggunaan produk petrokimia lintas sektor, meningkatkan ekspor produk petrokimia, menambah kilang untuk produksi minyak nabati, menambah pabrik olekimia, serta memperkuat penelitian dan pengembangan;
- f. penguatan klaster energi rendah karbon di Daerah Mitra yang akan difokuskan untuk memperluas gasifikasi batu bara untuk mengurangi ketergantungan pada impor, memperkuat pusat OEM, mengembangkan *biofuel* baru, serta meningkatkan rehabilitasi pertambangan dan penerapan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan;
- g. penguatan kota cerdas dan pusat digital yang didukung perluasan penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dan teknologi digital terbaru lainnya;
- h. penguatan pendidikan Abad ke-21 yang berfokus pada pengembangan bidang keilmuan yang selaras dengan kebutuhan industri yang semakin maju dan berstandar dunia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 729 -

Tabel 6-21 Penahapan Arahkan Pemanfaatan Ruang Aspek Industri dan Pusat Ekonomi di Tahap 4 Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2035-2039

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
1.	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita negara (setara ekonomi) berpendapatan tinggi	Infrastruktur Kawasan Industri dan pusat ekonomi	Perencanaan	1. Pemutakhiran <i>Masterplan</i> Kawasan dan/atau <i>site plan</i> 2. Penyusunan Kajian Kelayakan	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di wilayah Kalimantan Timur lainnya	Paket dokumen per indikasi program per lokasi	APBN/APBD/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2035
			Perizinan	1. Penyusunan dan/atau pemutakhiran dokumen Izin Lingkungan 2. Proses pengajuan baru dan/atau perpanjangan perizinan lahan 3. Proses pengajuan baru dan/atau perpanjangan Izin Usaha		Paket dokumen per indikasi program per lokasi	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2035



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 730 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Tata Ruang dan Wilayah	1. Revisi RTRW 2. Penetapan dan/atau revisi RDTR		Paket dokumen per indikasi program per lokasi	APBN/ APBD	2035
			Infrastruktur Dalam Kawasan	1. Pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas produksi 2. Pengadaan dan/atau perluasan lahan Kawasan Industri 3. Pematangan Lahan Kawasan 4. Pemeliharaan infrastruktur dalam kawasan	KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur),	1. Paket kegiatan per lokasi 2. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	Swasta Murni/ KPBK IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ APBD/ APBN	2035



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 731 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Infrastruktur pemampu (<i>enabler</i>)	1. Pengembangan pusat dan infrastruktur digital 2. Penguatan pusat pendidikan dan pelatihan vokasi dan perguruan tinggi 3. Penyusunan kebijakan dan penerapan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dan teknologi digital terbaru lainnya	Wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara	1. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program sesuai kebutuhan 2. Paket kebijakan per indikasi program per klaster ekonomi sesuai kebutuhan	APBN/APBD/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2037



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 732 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Konektivitas Luar Kawasan	1. Pembangunan dan/atau peningkatan Jalan mendukung akses menuju kawasan industri 2. Pengembangan pelabuhan mendukung kawasan industri 3. Penyiapan jalur kereta api mendukung kawasan industri	KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), serta di wilayah Kalimantan Timur lainnya	Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/APBD/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2037



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 733 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Infrastruktur Penunjang Luar Kawasan	1. Pengadaan Lahan untuk pengembangan infrastruktur penunjang luar kawasan 2. Pembangunan dan pemeliharaan lanjutan infrastruktur penunjang lainnya		1. Paket kegiatan per lokasi 2. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/APBD/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita /Swasta Murni	2037



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 734 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Peningkatan Investasi	1. Fasilitasi Investasi 2. Pameran/Roadshow Investasi 3. Penyusunan dan/atau pemutakhiran profil Investasi 4. Pendampingan Investasi 5. Investasi Pembangunan Fasilitas Produksi	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), serta di wilayah Kalimantan Timur lainnya	Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN	2035



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 735 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Promosi Ekspor	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelesaian Hambatan Perdagangan dengan Negara Mitra2. Simplifikasi Regulasi Ekspor3. Perumusan Insentif Fiskal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan		Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/APBD/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2035



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 736 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Kemitraan Usaha	1. Pengembangan Rantai Pasok UMKM 2. Fasilitasi Produksi UMKM 3. Logistik UMKM 4. Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Mikro dan Besar		Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/APBD/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2035
			Penyediaan SDM	1. Pelatihan SDM 2. Riset permintaan pasar (<i>market demand analysis</i>) dan analisis kebutuhan pelatihan (<i>training needs analysis</i>) 3. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja (<i>manpower planning</i>) 4. Pembangunan layanan		Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2035



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 737 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				informasi pasar kerja 5. Pengembangan konsep afirmasi pelibatan tenaga kerja lokal				
			Harmonisasi Regulasi	1. Kebijakan Rantai Pasok Hulu Hilir 2. Penyusunan Insentif Fiskal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan, dan Non Fiskal		Paket kebijakan per indikasi program per klaster ekonomi sesuai kebutuhan	APBN/ APBD	2035

Catatan:

Rencana indikasi program Infrastruktur pemampu (*enabler*) dijabarkan dalam penahapan Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia serta Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan.

Paket kegiatan pembangunan infrastruktur dan penyiapan SDM terbuka untuk dilaksanakan melalui investasi swasta/BUMN/Badan Usaha Otorita atau dukungan pemerintah, atau kerja sama antara swasta, BUMN/Badan Usaha Otorita dan pemerintah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 738 -

6.4.2.4 Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Pada periode 2035 - 2039 sistem yang akan dibangun terdiri atas:

- a. Sistem dan strategi pertahanan:
 1. Mabes TNI (lanjutan);
 2. Mabrigif & Yonmek B;
 3. Yonkav B;
 4. Yonarhanud;
 5. Flite Penerbad di KP-IKN;
 6. Lanud (KPIKN), Wing Udara, Skadron 17 45 9, Skadron Jet Tanker, Skatek (lanjutan);
 7. Kosek IKN, Satrudal Jauh-Sedang, Sat Anti Drone Taktis-Strategis (lanjutan);
 8. Resimen Arhanud (lanjutan);
 9. Yonko 467 (lanjutan);
- b. Simbol dan sistem dan strategi keamanan cerdas: Taman Makam Bahagia;
- c. Sistem dan strategi keamanan cerdas:
 1. Diklat SSDM;
 2. Brimob Resimen IV Yon E;
 3. Polsek luar IKN;
 4. Pemenuhan peralatan;
 5. Pemenuhan rumah dinas.

6.4.3 Pemindahan Pelayanan Publik Bagi PNA dan OI, serta Pemindahan TNI dan Polri

6.4.3.1 Pemindahan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi PNA dan OI

Pada Tahap 4, yaitu periode 2035-2039, akan berfokus pada peningkatan digitalisasi, pemantapan integrasi pelayanan publik, serta pemenuhan standar pelayanan publik. Upaya pendekatan bilateral, promosi dan sosialisasi akan kemajuan pembangunan Ibu kota Nusantara terus disampaikan kepada PNA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 739 -

dan OI. Pada tahapan ini diharapkan PNA dan OI dapat didorong untuk mulai membangun di kompleks diplomatik dan OI di KIPP.

6.4.3.2 Pemindahan TNI dan Polri

Jumlah personil bidang Pertahanan dan Keamanan yang akan dipindahkan pada Tahap 4 berjumlah 22.785 orang, seperti tercantum dalam Tabel 6-22.

Tabel 6-22 Jumlah pemindahan personil bidang pertahanan dan keamanan pada Tahap 4

KEMENTERIAN/LEMBAGA	TAHAP 4
Kementerian Pertahanan	-
TNI	-
TNI AD	4.927
TNI AL	4.227
TNI AU	1.977
Paspampres	-
Polri	10.520
BIN	335
BSSN	-
BAKAMLA	799
Total	22.785

6.5 TAHAP 5: PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2040-2045

Pada Tahap 5, pengembangan Ibu Kota Nusantara diharapkan telah mencapai puncaknya ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil. Populasi KIKN dicanangkan mencapai kurang lebih 1,7 s.d. 1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan perkotaan mencapai sekitar 100 jiwa per hektare. Proyeksi jumlah populasi Ibu Kota Nusantara pada Tahap 5 adalah sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 740 -

Tabel 6-23 Proyeksi Jumlah Populasi Ibu Kota Nusantara
Sampai Dengan Tahap 5 (Tahun 2040-2045)

No	Populasi	2040	2041	2042	2043	2024	2045
1.	Jumlah Tenaga Kerja						573.287
1.1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023
1.2	Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla						103.742
1.3	Pegawai Lembaga Negara Independen/ Badan Publik						1.234
1.4	Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	85.193	87.983	90.773	93.563	96.389	99.213
1.5	Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	195.377	201.983	208.589	215.195	221.450	227.703
1.6	Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan Ibu Kota Nusantara	33.346	34.952	36.557	38.162	39.767	41.372
2.	Populasi Tanggungan/ Dependen						1.167.664
2.1	Anggota Keluarga ASN	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092
2.2	Anggota Keluarga Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla						290.478



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 741 -

No	Populasi	2040	2041	2042	2043	2024	2045
2.3	Anggota Keluarga Pegawai Lembaga Negara Independen/ Badan Publik						4.961
2.4	Mahasiswa	44.406	48.846	54.708	62.367	72.970	88.812
2.5	Keluarga Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	88.670	91.574	94.478	97.382	100.323	103.263
2.6	Keluarga Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	203.352	210.227	217.103	223.978	230.489	236.997
2.7	Keluarga Tenaga Kerja Konstruksi pada masa Pembangunan Ibu Kota Nusantara	34.707	36.379	38.049	39.720	41.390	43.061
3.	Jumlah Penduduk Eksisting yang berada dalam delineasi Ibu Kota Nusantara	168.660	169.133	169.607	170.082	170.559	171.037
	TOTAL POPULASI						1.911.988

- Catatan :
- a. pemindahan ASN diproyeksikan selesai pada tahap kedua.
 - b. proyeksi tenaga kerja konstruksi merupakan angka sementara berdasarkan data historis di luar perhitungan investasi sektor konstruksi.
 - c. proyeksi Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik beserta keluarga baru mencakup data pegawai Bank Indonesia.

Pada Tahap 5, pengembangan kawasan akan difokuskan pada KIPP tahap 2B sub-BWP II, tahap 3A dan 3B Sub-BWP III; Kawasan Ibu Kota Nusantara Barat; Kawasan Ibu Kota Nusantara Timur; serta Kawasan Ibu Kota Nusantara Utara. Pembangunan pada Tahap 3 akan difokuskan kepada zona *mixed-use* dengan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 742 -

sejumlah tipologi, meliputi (1) Perluasan Kawasan Perkantoran Pemerintahan Pusat (Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Eksaminatif) dengan penerapan *smart government*; (2) Perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri; serta (3) Perluasan Kawasan bisnis dan ekonomi pendukung termasuk pengembangan hotel bisnis, *Eco resort* dan MICE; (4) Perluasan Kluster Industri (termasuk Industri 4.0 *center of excellence*); (5) Perluasan riset dan pengembangan talenta serta Universitas unggulan; (6) Perluasan rumah sakit internasional; (7) Perluasan Kawasan Industri di Daerah Mitra. Pengembangan kawasan zona *mixed-use* tersebut didukung dengan menjaga ruang terbuka hijau, serta pengembangan infrastruktur transportasi, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Dalam rangka mendukung pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara pada tahap kelima, maka diperlukan langkah persiapan, pembangunan dan pemindahan dengan rincian penjelasan sebagai berikut.

6.5.1 Persiapan

Penyediaan tanah pada Tahap 5 dapat dilakukan melalui pelepasan kawasan hutan maupun pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah langsung. Sementara itu, pada wilayah yang telah ada pemilikan dan penguasaan masyarakat, apabila dilakukan melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun DPPT dan menganggarkan biaya pembebasan lahan.

Untuk mendukung pembangunan dan pengembangan pada tahap 5, maka akan terus dilanjutkan sosialisasi secara lebih luas ke berbagai pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sosialisasi ini tidak hanya mencakup masyarakat lokal dan calon penduduk pendatang di Ibu Kota Nusantara serta PNA dan OI, namun juga terhadap berbagai investor potensial yang akan berperan dalam pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara.

6.5.2 Pembangunan

6.5.2.1 Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia

Adapun arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pada Tahap 5 adalah sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 743 -

Tabel 6-24 Penahapan Arahannya Pemanfaatan Ruang Aspek Sosial dan Sumber Daya Manusia di Tahap 5 Tahun 2040-2045

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
1	>75% dari 256.142 hektare area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)	Konservasi dan Restorasi hutan dan lahan	Pelibatan tokoh dan masyarakat dalam pelestarian dan konservasi dan restorasi hutan	Pemberian penghargaan kepada tokoh adat dan masyarakat lokal yang berkomitmen menjaga dan melestarikan lingkungan dan hutan	KIKN	Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada tokoh adat dan masyarakat lokal yang berkomitmen menjaga dan melestarikan lingkungan dan hutan	APBN	Setiap tahun
				Penghijauan kembali area yang terdampak pembangunan fisik dan area pemukiman penduduk	KIKN	Area penghijauan yang meningkat di area sekitar permukiman	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 744 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
2	100% integrasi seluruh penduduk	Ruang Publik, Fasilitas Nasional, dan Integrasi Sosial	Diskusi forum sosial dan keagamaan	Penguatan pelaksanaan forum diskusi dengan pemangku kepentingan dari komunitas lokal/adat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Forum dengan lembaga dan masyarakat adat dan lokal yang diperkuat	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2045
			Pergelaran Festival	Pergelaran Festival Nusantara untuk menghamornisasikan hubungan antar seluruh penduduk di Wilayah Ibu Kota Nusantara	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Pergelaran Festival yang dihadiri oleh penduduk lokal dan pendatang	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2043
			Pergelaran Festival	Perayaan 100 Tahun Indonesia merdeka dengan mengintegrasikan seluruh aspek sosial	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Kegiatan Perayaan 100 Tahun Indonesia Merdeka	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 745 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				budaya dalam kegiatan "Bulan 100 Tahun Kemerdekaan"				
			Aset bernilai sosial dan budaya penting	Lanjutan pengkajian dan pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan melibatkan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan kebudayaan, serta perguruan tinggi	KIKN	Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayah Ibu Kota Negara	APBN	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 746 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Pemeliharaan cagar budaya dan aset penting nasional dengan melibatkan peran masyarakat adat dan lokal dan pemeliharanya	KIPP	Fasilitas keagamaan dan fasilitas sosial pada tingkat nasional yaitu Rumah Ibadah, Museum Nasional, Galeri, serta Perpustakaan Nasional	APBN	2040
3	100% warga dapat menjangkau layanan sosial/ masyarakat dalam waktu 10 menit	Infrastruktur Perkotaan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Aset bernilai sosial dan budaya penting	Lanjutan pembangunan fasilitas sosial dan budaya di luar pembangunan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Fasilitas keagamaan dan fasilitas sosial di berbagai skala pelayanan, seperti Rumah Ibadah, Perpustakaan, Taman Rekreasi, dan ruang terbuka	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2041



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 747 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Fasilitas Kesehatan	Penyediaan Posyandu	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Minimal 1 per skala layanan wilayah setara RW	APBN/APBD	2040-2045
				Penyediaan Puskesmas	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Minimal 1 puskesmas per skala pelayanan setara kecamatan dapat bertambah dengan memperhatikan pada tingkat kepadatan penduduk	APBN/APBD	2040-2045
				Penyediaan Rumah Sakit Berstandar Internasional	KIPP	Minimal 1 RS Berstandar Internasional	APBN/KPBU IKN	2040-2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 748 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Penyediaan Rumah Sakit	Wilayah Ibu Kota Nusantara	minimal 1 RS	APBN/APBD/ KPBU IKN/Swasta Murni	2040-2045
				Penyediaan Laboratorium Kesehatan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 Laboratorium terstandar minimal tingkat keamanan hayati (<i>Bio Safety Level/BSL</i>) 3 dan dapat ditingkatkan sampai dengan minimal BSL 4	APBN/APBD/ KPBU IKN/Swasta murni	2040-2045
				Peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ada	APBN/APBD/ KPBU IKN	2040-2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 749 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Fasilitas Pendidikan	Pembangunan lanjutan unit sekolah baru dan pengembangan tingkat TK/RA/BA/PAUD	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 TK/RA/BA/ PAUD di setiap wilayah setingkat desa/kelurahan atau tersedia minimal 1 TK/RA/BA/ PAUD untuk 270 anak usia 3-6 tahun	APBN/ Swasta Murni	2045
				Pembangunan lanjutan unit sekolah baru dan pengembangan tingkat SD/MI/SDLB/ Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SD/MI/SDLB/ Sederajat untuk 672 anak usia 7-12 tahun	APBN/ Swasta Murni	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 750 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Pembangunan lanjutan unit sekolah baru dan pengembangan tingkat SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SMP/MTs/SMPLB/Sederajat untuk 1.056 anak usia 13-15 tahun	APBN/ Swasta Murni	2045
				Pembangunan lanjutan unit sekolah baru dan pengembangan tingkat SMA/SMK/MA/SMALB/Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SMA/SMK/MA/SMALB/Sederajat untuk 1.296 anak usia 16-18 tahun	APBN/ Swasta Murni	2045
				Penguatan perguruan tinggi unggulan	Wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara	Tercukupinya sarana dan prasarana PT unggulan untuk mendapatkan akreditasi internasional	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 751 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Pembangunan lanjutan unit Tempat Penitipan Anak/ <i>Day Care</i>	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 TPA/DC di setiap wilayah setingkat desa/ kelurahan atau tersedia minimal 1 TPA/DC untuk 270 anak usia 0 - 12 tahun (sama dengan TK/RA/BA/PAUD)	APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2045
4	100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif	Fasilitas umum	Balai Adat/ Pusat kebudayaan	Konstruksi tahap akhir pembangunan balai adat/pusat kebudayaan di Wilayah Ibu Kota Nusantara	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Balai adat/pusat kebudayaan pada skala pelayanan setara kecamatan	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2041
				<i>Monitoring</i> pembangunan Balai Adat agar tetap sejalan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen evaluasi pembangunan balai adat	APBN/	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 752 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	gender dan inklusif			dengan prinsip yang telah ditetapkan.			Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
		Pembangunan universal	Diskusi forum sosial	Pelibatan secara aktif kelompok kelompok rentan seperti Organisasi Penyandang Disabilitas, Perempuan, Anak, dan Lansia untuk sama sama mengevaluasi pembangunan fisik dan sosial yang telah dan akan berjalan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen evaluasi pembangunan fisik dan sosial dari kelompok kelompok rentan.	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2040



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 753 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
5	10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	Infrastruktur Permukiman- Kohehi dan Inklusi Sosial	Ruang Publik yang aksesibel dan penuh interaksi	Melengkapi ruang ruang publik dengan berbagai fasilitas hiburan sederhana yang mendukung terjalannya komunikasi antar-masyarakat	KIKN	Tersedianya fasilitas hiburan di berbagai ruang publik dan fasilitas transportasi	APBN/KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2040
				Evaluasi melalui survei kepuasan masyarakat terhadap layanan, fasilitas, dan sistem yang ada pada fasilitas publik secara umum	Area Luar KIKN	Hasil survei kepuasan masyarakat dan dokumen evaluasi	APBN	2042



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 754 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
6	>10% dari lahan 256.142 hektare tersedia untuk kebutuhan produksi pangan	Ketahanan Pangan	Pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam mendorong aspek ketahanan pangan	Penguatan kelompok kelompok tani lokal dengan pelatihan pertanian modern dan bantuan subsidi dan lahan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Modul pelatihan bagi desa dan/atau masyarakat yang hidup dalam kawasan hutan dan/atau kawasan pertanian	APBN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2040
				Kolaborasi dan komitmen masyarakat lokal, swasta dan pemerintah dalam menyerap produk lokal pertanian melalui program pertanian tiga sektor	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Kemitraan antara masyarakat lokal, swasta dan pemerintah untuk mendukung produk lokal	APBN	2041
7	60% daur ulang timbulan	Ekonomi Sirkular	Pemanfaatan Sisa Pangan dan	Pengintegrasian produk daur ulang untuk pemenuhan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Produk daur ulang menjadi budaya masyarakat	APBN/	2040



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 775 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
8.	Net Zero Emission untuk Ibu Kota Nusantara di 2045 di kawasan 256.142 hektare	Transportasi umum	Bus, Kereta Api	Penerapan moda transportasi umum berbasis listrik serta fasilitas pendukung (<i>charging facility</i>)	KPIKN dan Daerah Mitra sekitarnya	Operasional moda transportasi umum berbasis listrik	APBN/ Swasta Murni	2045
9.	100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif	Infrastruktur Kawasan Permukiman	Pengembangan kawasan permukiman yang sudah ada	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman saat ini dan pengembangan kawasan permukiman baru (jika diperlukan) secara bertahap termasuk penyediaan fasum fasos	KIKN	Kualitas permukiman yang meningkat	APBN/KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 756 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	256.142 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045			Infrastruktur Permukiman di area permukiman masyarakat		permukiman masyarakat		
				Evaluasi keterlibatan tenaga kerja lokal pada pembangunan Ibu Kota Nusantara	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen evaluasi ketenagakerjaan penduduk lokal usia kerja	APBN	2040
9	0% kemiskinan pada populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2035	Pengentasan Kemiskinan	Pendataan	Evaluasi 5 tahun pendataan terintegrasi basis data terpadu di Wilayah Ibu Kota Nusantara	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen evaluasi pendataan masyarakat lokal dan pendatang	APBN	2040
			Rujukan dan Layanan Sosial	Penguatan kapasitas Pemda, Desa, Kelurahan, dan Masyarakat untuk mengelola dan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	DMD/K yang terintegrasi dengan Puskesmas di seluruh Ibu Kota Nusantara terlaksana dengan	APBN	2040



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 757 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				memberikan rujukan terhadap masalah dan layanan sosial yang dihadapi/diperlukan penduduk rentan		kapasitas komprehensif dan berkesinambungan		
			Kemandirian Ekonomi	[Lanjutan] Membangun kemandirian ekonomi dengan membuka akses terhadap permodalan mandiri (perbankan) dan permodalan bantuan (pemerintah), serta internet (teknologi)	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Bertambahnya jumlah masyarakat yang dapat mengakses layanan perbankan dan layanan teknologi (internet)	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2040



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 758 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
10	Rasio Gini regional terendah di Indonesia pada 2045	Pengentasan Ketimpangan	Pemberdayaan Masyarakat	Implementasi kurikulum pelatihan tenaga kerja terbaru di BLK dan pusat pusat pelatihan dengan memperhatikan kebutuhan pasar	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Modul/kurikulum bagi BLK yang sudah ada dan yang baru di wilayah Ibu Kota Nusantara	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2040
				Penyaluran tenaga kerja terlatih pada berbagai industri dan kegiatan di wilayah Ibu Kota Nusantara bekerja sama dengan pemerintah daerah dan badan swasta	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersalurnya tenaga kerja terlatih ke berbagai industri di Wilayah Ibu Kota Negara	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2040



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 759 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Pemanfaatan potensi lokal baik itu pariwisata, produk unggulan, produk ekonomi kreatif, maupun seni budaya untuk membuka peluang ekonomi baru masyarakat lokal	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Peningkatan ekonomi baru bagi Masyarakat lokal dan masyarakat adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2040



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 760 -

6.5.2.2 Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan

Pada tahun 2040-2045, pembangunan KIPP ditargetkan antara lain tahap 2B Sub-BWP II, Tahap 3A, dan 3B Sub-BWP III, pembangunan infrastruktur ditargetkan telah terbangun secara menyeluruh, baik sarana prasarana pendukung kawasan maupun koridor transportasi penghubung antar pusat kegiatan. Penambahan fasilitas infrastruktur pada Tahap 5 adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan dari KA di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra sekitarnya;
- b. Lanjutan pembangunan jalan di KIKN dan KPIKN;
- c. Pembangunan dan pengembangan utilitas terintegrasi, seperti:
 1. Pemantapan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan 100 persen pengembangan Ibu Kota Nusantara Tahap 5;
 2. Penambahan amenities digital dan perkotaan untuk penerapan solusi kota cerdas di KIKN;
 3. Pemantapan infrastruktur (hijau dan abu-abu) untuk penerapan prinsip kota spons dan pengembangan/pemutakhiran *smart early warning system*;
 4. Penambahan kapasitas penyediaan tenaga listrik dan gas melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan gas: pembangunan pembangkit, sistem penyaluran tenaga listrik, cadangan dan penyimpanan energi, serta jaringan gas kota.
- d. Program konservasi dan restorasi hutan;
 1. Rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;
 2. Penambahan penanaman di area pengembangan;
 3. Penambahan penanaman pohon dan vegetasi di area KIPP dan KIKN;
 4. Pelibatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan lokal, termasuk perempuan dan anak dalam pengelolaan hutan/wanatani.
- e. Pengembangan sarana pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, olahraga).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 761 -

- f. Penyediaan Perumahan sesuai dengan jumlah kebutuhan rumah tangga yang mempertimbangkan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya KPBU IKN untuk:
1. pengembangan rumah umum (lanjutan);
 2. rumah negara/rumah dinas ASN, TNI dan Polri (lanjutan);
 3. rumah masyarakat/tenaga pendukung Ibu Kota Nusantara (komersial maupun swadaya).

Arahan pemanfaatan ruang untuk pembangunan infrastruktur dan lingkungan pada Tahap 5 dapat dilihat pada tabel Tabel 6-25.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 762 -

Tabel 6-25 Arahana Pemanfaatan Ruang Aspek Sosial di Tahap 5 Tahun 2040-2045

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
1.	Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara	Infrastruktur Ketenagalistrikan	Panel surya atap	Pemasangan panel surya atap (Penambahan dari panel surya atap pada tahap sebelumnya)	KIPP dan seluruh perkotaan Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan potensi atap gedung untuk dibangun panel surya atap	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	Setiap tahun
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i> (Penambahan dari pembangunan <i>Solar Farm</i> pada tahap sebelumnya)	KIKN	3.632,7 ha (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2045
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i> (Penambahan dari pembangunan <i>Solar Farm</i> pada tahap sebelumnya)	KPIKN	2.484,7 ha (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 763 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i> (Penambahan dari pembangunan <i>Solar Farm</i> pada tahap sebelumnya)	KPIKN	392,6 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2045
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i> (Penambahan dari pembangunan <i>Solar Farm</i> pada tahap sebelumnya)	KPIKN	3.675,3 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2045
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i> (Penambahan dari pembangunan <i>Solar Farm</i> pada tahap sebelumnya)	KPIKN	310,7 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 764 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i> (Penambahan dari pembangunan <i>Solar Farm</i> pada tahap sebelumnya)	KIKN	621,6 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/Swasta Murni/KPBU IKN	2045
			<i>Solar Farm</i>	Pemasangan <i>Solar PV</i> (Penambahan dari pembangunan <i>Solar Farm</i> pada tahap sebelumnya)	KPIKN	2.607,4 hektare (Potensi lahan untuk dibangun <i>solar farm</i>)	BUMN/Badan Usaha Otorita/Swasta Murni/KPBU IKN	2045
		Cadangan dan Penyimpanan Energi		Pembangkit listrik cadangan dan baterai sebagai penyimpanan untuk menjaga stabilitas jaringan dan meningkatkan keandalan	KIKN dan KPIKN (Tergabung di wilayah <i>solar farm</i>)	15%-20% dari total kapasitas pasokan listrik	BUMN/Badan Usaha Otorita/Swasta Murni/KPBU IKN	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 765 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Gardu induk terisolasi gas (<i>Gas Insulated Substation</i> /GIS) 150kV	Pembangunan Gardu Induk	KIPP	1 Unit	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2045
			Gardu Induk 150kV	Pembangunan Gardu Induk	KPIKN	Menyesuaikan dengan penambahan permintaan pasokan listrik	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2045
			Gardu Distribusi 20kV	Pembangunan Gardu Distribusi	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan penambahan permintaan pasokan listrik	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 766 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Jaringan Transmisi dan Distribusi	Pemasangan jaringan transmisi dan distribusi bawah tanah (bila sudah tersedia jaringan utilitas terpadu di lokasi setempat)	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2045
			Gardu Induk 500kV	Pembangunan Gardu Induk dan tapak tower transmisi untuk interkoneksi Sistem Ketenagalistrikan Kalimantan (Pembangunan menyesuaikan dengan penambahan permintaan pasokan listrik)	Wilayah Ibu Kota Nusantara	1 Unit	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 767 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			<i>Smart metering</i>	Pemasangan <i>smart metering</i> yang dapat berkomunikasi dua arah dengan <i>database</i> penyedia listrik	Tersebar di Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	APBN/ Masyarakat Pelanggan	Setiap tahun
		Infrastruktur Gas	Jaringan Gas Kota	Pemasangan jaringan gas kota	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman yang dibangun	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2040
2.	60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan - Daur Ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Fasilitas Pengomposan	Pengolahan sampah organik	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2045
			Fasilitas daur ulang	Terdiri dari berbagai fasilitas untuk mendaur ulang	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 768 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				berbagai macam material sampah			Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
		Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan - Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Fasilitas pengolahan sampah melalui proses termal (<i>Waste to Energy</i>) dan/atau pengolahan sampah menjadi barang (<i>Waste to Product</i>)	Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang tidak bisa didaur ulang	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2045
			Lahan Urug Saniter (<i>Sanitary Landfill</i>)	Tempat pemrosesan akhir untuk residu pengolahan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 769 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				yang tidak dapat didaur ulang				
		Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan - Pengumpulan Sampah	Jaringan pengangkutan sampah melalui <i>pneumatic</i> (<i>Pneumatic Waste Collection System</i> atau PWCS)	Jaringan pengumpul sampah dari bangunan vertikal ke stasiun pengumpulan PWCS	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2045
			Stasiun Pengumpulan PWCS	Tempat pengumpulan sampah dari jaringan PWCS	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	2045
			Sarana Pengumpulan dan	Sarana pengumpulan sampah dari sumber dan pengangkutan sampah ke TPST	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 770 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Pengangkutan Sampah				Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
3.	100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035	Infrastruktur Air Limbah	SPALD-T (IPAL-D dan jaringan perpipaan air limbah domestik)	Pengelolaan Air Limbah dengan Sistem Terpusat (<i>off-site</i>) dilengkapi dengan fasilitas pengolahan lumpur	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2045
4.	Permukiman yang ada dan terencana di kawasan	Infrastruktur SDA - Sumber Air	Pengelolaan infrastruktur penyediaan air baku	Operasi dan Pemeliharaan Sumber dan Intake Air Baku	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 771 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	256.142 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045	Infrastruktur SDA -Banjir dan Drainase Perkotaan	Pembangunan infrastruktur drainase, pengendali banjir dan pengendali sedimen	1. Lanjutan pembangunan infrastruktur drainase, pengendali banjir dan pengendali sedimen 2. Operasi dan pemeliharaan infrastruktur drainase, pengendali banjir dan pengendali sedimen	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN	2045
		Infrastruktur Air Minum untuk KIPP	Jaringan Distribusi	Optimalisasi penyerapan <i>idle capacity</i> IPA yang terbangun pada tahap 4	KIPP	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan serta ketersediaan MUT	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 772 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
		Air Minum untuk KPIKN	Instalasi Pengolahan Air Minum	Target kualitas air minum aman	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2045
			Jaringan perpipaan transmisi air minum	Jaringan transmisi air minum dari IPA menuju reservoir	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2045
			Reservoir Induk	Penyimpanan air yang akan melayani setiap daerah pengembangan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2045
			Jaringan Distribusi	Pengaliran air minum yang memenuhi 3K (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas)	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan MUT	APBN/KPBU IKN/Swasta Murni	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 773 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
5.	80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif	Transportasi Umum	Bus	Pengembangan angkutan umum bus dan fasilitas pendukung (Halte/ <i>shelter</i>)	KPIKN dan Daerah Mitra sekitarnya	Operasional angkutan umum berbasis bus dan fasilitas pendukung (halte/ <i>shelter</i>)	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/ Badan Usaha Otorita	2045
			Kereta Api	Pembangunan angkutan umum massal berbasis kereta api di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra sekitarnya	KPIKN dan Daerah Mitra sekitarnya	Operasional angkutan umum berbasis kereta api	APBN/ KPBU IKN/ BUMN/ Badan Usaha Otorita	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 774 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
6.	10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik transportasi umum	Infrastruktur Jalan	Jalan di KIKN dan KPIKN	Operasional jaringan Jalan di KIKN dan KPIKN	KIKN dan KPIKN dan Daerah Mitra sekitarnya	100% jaringan jalan di KPIKN dan daerah sekitarnya	APBN/ Swasta Murni	2040
7.	100 persen penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian	Infrastruktur SDA - Konservasi air penerapan prinsip kota spons	Penerapan <i>Zero Delta Q</i>	Fasilitas pemanenan maupun peresapan air hujan yang diterapkan di gedung-gedung dan bangunan-bangunan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	100% ketaatan pemilik gedung dan bangunan dalam penerapan <i>zero delta Q</i>	APBN/KPBU/ Swasta Murni	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 775 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
8.	Net Zero Emission untuk Ibu Kota Nusantara di 2045 di kawasan 256.142 hektare	Transportasi umum	Bus, Kereta Api	Penerapan moda transportasi umum berbasis listrik serta fasilitas pendukung (<i>charging facility</i>)	KPIKN dan Daerah Mitra sekitarnya	Operasional moda transportasi umum berbasis listrik	APBN/ Swasta Murni	2045
9.	100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif	Infrastruktur Kawasan Permukiman	Pengembangan kawasan permukiman yang sudah ada	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman saat ini dan pengembangn kawasan permukiman baru (jika diperlukan) secara bertahap termasuk penyediaan fasum fasos	KIKN	Kualitas permukiman yang meningkat	APBN/KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 776 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
	gender dan inklusif	Infrastruktur KIKN	Pembangunan KIKN	Pembangunan KIKN secara bertahap termasuk penyediaan fasum fasos	KIKN	56.920 ha	APBN/KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	
10.	>75% dari 256.142 hektare area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)	Konservasi dan Restorasi Hutan	Pengurangan deforestasi	Moratorium dan/atau pencabutan izin tambang dan sawit dalam kawasan hutan dan lindung	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Seluruh izin tambang batubara dan kebun sawit dalam Kawasan hutan	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
				Penyelesaian penguasaan dan/atau tenurial kawasan hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	30.000 ha	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 777 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
							Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
			Perlindungan hutan	Patroli dan penegakan hukum pidana kehutanan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tergantung ancaman dan kejadian	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
				Patroli dan pemadaman kebakaran hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tergantung kerawanan kebakaran	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 778 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Konservasi keanekaragaman hayati	Perlindungan koridor satwa alami	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Koridor Samboja Koridor KIKN	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
				Perlindungan koridor satwa buatan (jembatan atau terowongan)	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Di lokasi pembangunan infrastruktur	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 779 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Konservasi eksitu keanekaragaman hayati	Wilayah Ibu Kota Nusantara	BOSF Samboja, Yayasan Jejak Pulang, PSO Arsari	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
				Pembangunan Pusat Penyelamatan Satwa terpadu	Wilayah Ibu Kota Nusantara	1 unit Pusat Penyelamatan Satwa Terpadu	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
				Inventarisasi dan monitoring tanaman dan satwa liar	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 780 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
							Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	
			Pengelolaan hutan/wanatani berkelanjutan	Pegembangan bisnis kehutanan dari jasa ekosistem dan HHBK	Wilayah Ibu Kota Nusantara	3 bisnis kehutanan (karbon, wisata alam, HHBK)	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
			Restorasi Hutan	Rehabilitasi dan/atau penanaman pohon	Wilayah Ibu Kota Nusantara	15.000 hektare	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 781 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				Reklamasi dan/atau pemanfaatan lahan bekas tambang dan kebun sawit	Wilayah Ibu Kota Nusantara	1.000 hektare/tahun	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Setiap tahun
			Integrasi konservasi hutan dalam tata ruang	Penetapan kawasan dilindungi berdasarkan nilai keanekaragaman hayati dan karbon stok	Wilayah Ibu Kota Nusantara	159.180 hektare	APBN	Setiap tahun
		Infrastruktur sumber daya air -Konservasi air penerapan prinsip kota spons	Pengelolaan kolam retensi dan embung multiguna	Lanjutan pembangunan kolam-kolam tampungan air yang memiliki multifungsi untuk penyediaan air, pengendalian banjir,	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU	2045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 782 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
				konservasi air, vista, serta mengurangi <i>urban heat</i>				
		Produksi makanan sehat dan organik	Area Pertanian Regeneratif Pangan	1. Intensifikasi pertanian 2. Peningkatan kapasitas bagi petani lokal	KPIKN	±35.000 hektare (memenuhi >10% lahan untuk pemenuhan pangan sebesar ±25.000 hektare)	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/KPBU IKN/Swasta Murni	Setiap tahun
			<i>Urban Farming</i> (Pertanian Perkotaan), Permakultur, Sirkular, dan presisi	Pengembangan <i>urban farming</i>	KIPP	> ±46 hektare (asumsi untuk pemanfaatan <i>green house</i>), permakultur, sirkular, dan presisi	APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/KPBU IKN/Swasta Murni	Setiap tahun



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 783 -

6.5.2.3 Pembangunan Industri dan Pusat Ekonomi

Rencana pengembangan 6 klaster industri dan 2 klaster pemampu dilanjutkan dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut.

- a. Penguatan klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan di Daerah Mitra yang akan berfokus pada penelitian dan pengembangan pangan protein yang lebih baru dan penarikan investasi untuk perluasan ke bahan-bahan *nutraceutical*;
- b. Penguatan klaster industri masa depan yang berbasis energi terbarukan di Daerah Mitra yang akan berfokus pada eksplorasi teknologi generasi berikutnya serta peningkatan kapasitas paripurna (*end-to-end*) dalam produksi panel surya dan kendaraan listrik berbasis teknologi baru;
- c. Penguatan klaster farmasi terintegrasi akan difokuskan pada penelitian dan pengembangan serta inovasi yang berkelanjutan untuk memperluas kapasitas dari fasilitas produksi di Daerah Mitra yang pangsa ekspor dan penyediaan pasokan bahan baku dan produk akhir yang cukup di dalam negeri;
- d. Penguatan klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif yang akan difokuskan pada diversifikasi destinasi wisata, inovasi layanan wisata dan penguatan daya dukung yang akan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan pariwisata;
- e. Penguatan klaster industri kimia maju dan turunannya di Daerah Mitra yang difokuskan pada peningkatan investasi dan perluasan produksi produk kimia khusus untuk API farmasi dan produk farmasi baru;
- f. Penguatan klaster energi rendah karbon di Daerah Mitra yang akan difokuskan untuk meningkatkan teknologi yang mengurangi dampak lingkungan dan perluasan penerapan teknologi dekarbonisasi mutakhir;
- g. Penguatan kota cerdas dan pusat digital dengan dukungan teknologi digital terbaru; dan
- h. Penguatan pendidikan abad ke-21 yang berfokus pada peningkatan daya saing pengembangan talenta kelas dunia.

Setelah tahun 2045, keseluruhan enam klaster akan terus dikembangkan dari segi inovasi dan teknologinya untuk pemenuhan kebutuhan produksi domestik, regional ataupun global, serta penurunan ekspor dan perluasan pangsa ekspor.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 784 -

Tabel 6-26 Penahapan Arahana Pemanfaatan Ruang Aspek Industri dan Pusat Ekonomi di Tahap 5 Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2040-2045

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
1.	Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita negara (setara ekonomi) berpendapatan tinggi	Infrastruktur Kawasan Industri dan pusat ekonomi	Perencanaan	1. Pemutakhiran Masterplan Kawasan dan/atau <i>site plan</i> 2. Penyusunan <i>Feasibility Study</i>	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di wilayah Kalimantan Timur lainnya	Paket dokumen per indikasi program per lokasi	APBN/APBD/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta	2040
			Perizinan	1. Penyusunan dan/atau pemutakhiran dokumen Izin Lingkungan 2. Proses pengajuan baru dan/atau perpanjangan perizinan lahan 3. Proses pengajuan baru dan/atau perpanjangan izin Usaha		Paket dokumen per indikasi program per lokasi	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2040



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 785 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Tata Ruang dan Wilayah	1. Revisi RTRW 2. Penetapan dan/atau revisi RDTR		Paket dokumen per indikasi program per lokasi	APBN/APBD	2040
			Infrastruktur Dalam Kawasan	1. Pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas produksi 2. Pengadaan dan/atau perluasan lahan Kawasan Industri 3. Pematangan Lahan Kawasan Pemeliharaan infrastruktur dalam kawasan	KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur)	1. Paket kegiatan per lokasi 2. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	Swasta Murni/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ APBD/ APBN	2040



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 786 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Infrastruktur pemampu (<i>enabler</i>)	1. Pengembangan pusat dan infrastruktur digital 2. Penguatan pusat pendidikan dan pelatihan vokasi, dan perguruan tinggi	Wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara	1. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program sesuai kebutuhan 2. Paket kebijakan per indikasi program per klaster ekonomi sesuai kebutuhan	APBN/APBD/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta	2042
			Konektivitas Luar Kawasan	1. Pembangunan Jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/kota sebagai jalan akses menuju kawasan 2. Pengembangan Pelabuhan mendukung Kawasan Industri Pengembangan jalur Kereta Api mendukung kawasan industri	KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di wilayah Kalimantan Timur lainnya	Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/APBD/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta	2042



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 787 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Infrastruktur Penunjang Luar Kawasan	Pembangunan dan pemeliharaan lanjutan infrastruktur penunjang lainnya		1. Paket kegiatan per lokasi 2. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/APBD/ KPBK IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta	2042
			Peningkatan Investasi	1. Fasilitas Investasi 2. Pameran/ <i>Roadshow</i> Investasi 3. Penyusunan dan/atau pemutakhiran profil Investasi 4. Pendampingan Investasi 5. Investasi Pembangunan Fasilitas Produksi	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di	Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN	2040



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 788 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Promosi Ekspor	1. Penyelesaian Hambatan Perdagangan dengan Negara Mitra 2. Simplifikasi Regulasi Ekspor 3. Perumusan Insentif Fiskal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanaan	wilayah Kalimantan Timur lainnya	Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/APBD/ Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2040
			Kemitraan Usaha	1. Pengembangan Rantai Pasok UMKM 2. Fasilitasi Produksi UMKM 3. Logistik UMKM 4. Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Mikro dan Besar		Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/APBD/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2040



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 789 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Penyediaan SDM	<ol style="list-style-type: none">1. Pelatihan SDM2. Riset permintaan pasar (<i>market demand analysis</i>) dan analisis kebutuhan pelatihan (<i>training needs analysis</i>)3. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja (<i>manpower planning</i>)4. Pembangunan layanan informasi pasar kerja5. Pengembangan konsep afirmasi pelibatan tenaga kerja lokal		Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2040



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 790 -

No	KPI Ibu Kota Nusantara 2045	Jenis/ Komponen	Rencana Proyek/ Aktivitas/ Guna Lahan	Indikasi Program untuk Aktivitas	Lokasi	Target	Indikasi Skema Pembiayaan	Indikasi Tahun Operasional
			Harmonisasi Regulasi	1. Kebijakan Rantai Pasok Hulu Hilir 2. Penyusunan Insentif Fiskal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan, dan Non Fiskal		Paket kebijakan per indikasi program per klaster ekonomi sesuai kebutuhan	APBN/ APBD	2040

Catatan:

- Rencana indikasi program Infrastruktur pemampu (*enabler*) dijabarkan dalam penahapan Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia serta Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan.
- Paket kegiatan pembangunan infrastruktur dan penyiapan SDM terbuka untuk dilaksanakan melalui investasi swasta/BUMN/Badan Usaha Otorita atau dukungan pemerintah, atau kerja sama antara swasta, BUMN/Badan Usaha Otorita dan pemerintah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 791 -

6.5.2.4 Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Pada Tahap 5 atau tahap akhir pembangunan bidang pertahanan dan keamanan, pembangunan simbol dan sistem yang akan dilakukan adalah untuk pemenuhan:

- a. Sistem dan strategi pertahanan:
 1. Mabes TNI (lanjutan);
 2. Mabrigkav;
 3. Mamenarhanud;
 4. Kodim IKN;
 5. Lanud (KPIKN), Wing Udara, Skadron 17 45 9, Skadron Jet Tanker, Skatek (lanjutan);
 6. Kosek IKN, Satrudal Jauh-Sedang, Sat Anti Drone Taktis-Strategis (lanjutan);
 7. Resimen Arhanud (lanjutan);
 8. Yonko 467 (lanjutan);
- b. Simbol untuk system dan strategi keamanan cerdas:
 1. Museum Polri;
 2. Pusjarah;
 3. Taman Lalu Lintas;
- c. Sistem dan strategi keamanan cerdas:
 1. Puslitbang Polri;
 2. Digital Center TIK;
 3. Indonesia Safety Driving Center;
 4. Pemenuhan peralatan; dan
 5. Pemenuhan rumah dinas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 792 -

6.5.3 Pemindahan Pelayanan Publik Bagi PNA dan OI, serta Pemindahan TNI dan Polri

6.5.3.1 Pemindahan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi PNA dan OI

Pada Tahap 5, yaitu periode 2040-2045, penyelenggaraan pelayanan publik bagi PNA dan OI telah berjalan dan akan berfokus pada optimalisasi pelayanan publik. Pergeseran pelayanan publik di Jakarta telah teralihkan menjadi unit pelayanan perwakilan (kota) yang tetap terintegrasi dengan pelayanan publik di Ibu Kota Nusantara. Proses pendekatan dan sosialisasi yang mendorong pemindahan PNA dan OI tetap dilaksanakan, dan diharapkan sudah terdapat peningkatan komitmen akan rencana dan pembangunan dari PNA dan OI guna memindahkan kantornya di Ibu Kota Nusantara.

6.5.3.2 Pemindahan TNI dan Polri

Jumlah personil bidang Pertahanan dan Keamanan yang akan dipindahkan pada Tahap 5 berjumlah 14.051 orang. Sehingga, total personil bidang pertahanan dan keamanan yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara hingga tahun 2045 berjumlah 103.742 orang, seperti tercantum dalam Tabel 6-27.

Tabel 6-27 Jumlah Pemindahan Personil Bidang Pertahanan dan keamanan pada Tahap 5

KEMENTERIAN/LEMBAGA	TAHAP 5
Kementerian Pertahanan	-
TNI	-
TNI AD	6.489
TNI AL	5.481
TNI AU	2.081
Paspampres	-
Polri	-
BIN	-
BSSN	-
BAKAMLA	-
Total	14.051